



PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG

JABATAN, KELAS JABATAN, DAN PETA JABATAN  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi jabatan dan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap kelas Jabatan bagi jabatan pelaksana di lingkungan Kementerian Perdagangan, perlu melakukan penyesuaian jabatan, kelas jabatan, dan peta jabatan di lingkungan Kementerian Perdagangan;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 101 Tahun 2020 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Perdagangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 101 Tahun 2020 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Peta Jabatan di lingkungan Kementerian Perdagangan;
- c. bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 101 Tahun 2020 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Perdagangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 101 Tahun 2020 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Peta Jabatan di lingkungan Kementerian Perdagangan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dan perkembangan organisasi, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Peta Jabatan di lingkungan Kementerian Perdagangan;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6264);
6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1258);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG JABATAN, KELAS JABATAN, DAN PETA JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai aparatur sipil negara dalam suatu organisasi.
2. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang pegawai dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
3. Peta Jabatan adalah susunan nama dan tingkat Jabatan manajerial dan nonmanajerial yang tergambar dalam struktur unit organisasi dari tingkat yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi.
4. Jabatan Manajerial adalah sekelompok Jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung di bawahnya untuk mencapai tujuan organisasi.
5. Jabatan Nonmanajerial adalah sekelompok Jabatan yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggung jawab langsung.
6. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan tinggi di lingkungan Kementerian Perdagangan.
7. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai yang besarnya didasarkan pada capaian kinerja dan capaian perilaku dengan besaran bobot yang telah ditentukan serta mempertimbangkan jam kerja, nilai Jabatan, dan Kelas Jabatan.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Perdagangan yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Perdagangan.

**BAB II**  
**JABATAN, KELAS JABATAN, DAN PETA JABATAN**

**Pasal 2**

- (1) Pegawai ASN wajib melaksanakan tugas sesuai dengan Jabatannya.
- (2) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. Jabatan Manajerial; dan
  - b. Jabatan Nonmanajerial.

**Pasal 3**

- (1) Jabatan Manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. JPT madya;
  - b. JPT pratama;
  - c. Jabatan administrator; dan
  - d. Jabatan pengawas.
- (2) JPT sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dan huruf b merupakan Jabatan Manajerial tingkat tinggi yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, mendayagunakan sumber daya serta mengambil keputusan menurut tingkatan Jabatannya, untuk mencapai tujuan organisasi.
- (3) Jabatan administrator sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c merupakan Jabatan Manajerial tingkat menengah yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan strategi pencapaian tujuan organisasi serta pelayanan publik dan administrasi.
- (4) Jabatan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d merupakan Jabatan Manajerial tingkat dasar yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan strategi pencapaian tujuan organisasi serta pelayanan publik dan administrasi.

**Pasal 4**

- (1) Jabatan Nonmanajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. Jabatan fungsional; dan
  - b. Jabatan pelaksana.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
- (3) Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin dan sederhana.

#### Pasal 5

Pengisian kebutuhan bagi Jabatan pelaksana pengelola umum operasional hanya dilakukan melalui pengangkatan dengan mekanisme pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk tahun anggaran 2024.

#### Pasal 6

- (1) Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) memiliki Kelas Jabatan.
- (2) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu komponen pemberian Tunjangan Kinerja.
- (3) Besaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan teknis pemberian Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-udangan.

#### Pasal 7

- (1) Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) disusun ke dalam Peta Jabatan.
- (2) Peta Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penyusunan kebutuhan Pegawai ASN, pengangkatan Pegawai ASN, penempatan Pegawai ASN, dan mutasi Pegawai ASN ke dalam Jabatan di lingkungan Kementerian Perdagangan.
- (3) Kebutuhan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan hasil analisis beban kerja.
- (4) Kebutuhan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

#### Pasal 8

- (1) Daftar Jabatan dan Kelas Jabatan untuk Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Peta Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### BAB III KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 9

Nomenklatur Jabatan pelaksana yang telah ada sebelum Peraturan Menteri ini berlaku harus disesuaikan dengan nomenklatur Jabatan pelaksana dalam Peraturan Menteri ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini berlaku.

#### Pasal 10

- (1) Pejabat pelaksana yang telah diangkat dan belum memenuhi syarat Jabatan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, tetap diberikan Kelas Jabatan yang sama

- dengan Kelas Jabatan sebelumnya untuk jangka waktu paling lama sampai dengan Desember 2028.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlewati dan syarat Jabatan belum terpenuhi, pejabat pelaksana diangkat dalam Jabatan dengan syarat Jabatan yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan kompetensi yang dimiliki.

#### Pasal 11

Pejabat pelaksana yang telah diangkat dan telah memenuhi syarat Jabatan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku namun memiliki Kelas Jabatan di atas Kelas Jabatan yang ditetapkan di dalam Peraturan Menteri ini, diberikan Kelas Jabatan sesuai dengan Kelas Jabatan sebelumnya.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 12

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 101 Tahun 2020 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1617);
- b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 101 Tahun 2020 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 903);
- c. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 101 Tahun 2020 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 323);
- d. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 101 Tahun 2020 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 693);
- e. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 101 Tahun 2020 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 222); dan
- f. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 101 Tahun 2020 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 591), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Agustus 2024



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

PLT. DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR



LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 19 TAHUN 2024  
TENTANG  
JABATAN, KELAS JABATAN, DAN PETA  
JABATAN DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN PERDAGANGAN

NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN

I. NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN MANAJERIAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

NO	NAMA JABATAN	KELAS
A.	JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA	
1	Sekretaris Jenderal	17
2	Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri	17
3	Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	17
4	Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri	17
5	Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional	17
6	Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional	17
7	Inspektur Jenderal	17
8	Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi	17
9	Kepala Badan Kebijakan Perdagangan	17
10	Staf Ahli Bidang Pengamanan Pasar	16
11	Staf Ahli Bidang Manajemen dan Tata Kelola	16
12	Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional	16
13	Staf Ahli Bidang Iklim Usaha dan Hubungan Antar Lembaga	16
B.	JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA	
I.	Sekretariat Jenderal	
1	Kepala Biro Perencanaan	15
2	Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	15
3	Kepala Biro Keuangan	15
4	Kepala Biro Hukum	15
5	Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan	15
6	Kepala Biro Hubungan Masyarakat	15
7	Kepala Biro Advokasi Perdagangan	15
8	Kepala Pusat Penanganan Isu Strategis	15
9	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Perdagangan	15
10	Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan	15
11	Kepala Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Ekspor dan Jasa Perdagangan	15

NO	NAMA JABATAN	KELAS
12	Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi	15
II.	Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri	
13	Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri	15
14	Direktur Bina Usaha Perdagangan	15
15	Direktur Sarana Perdagangan dan Logistik	15
16	Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	15
17	Direktur Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	15
18	Direktur Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa	15
III.	Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	
19	Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	15
20	Direktur Pemberdayaan Konsumen	15
21	Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu	15
22	Direktur Metrologi	15
23	Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa	15
24	Direktur Tertib Niaga	15
IV.	Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri	
25	Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri	15
26	Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan	15
27	Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan	15
28	Direktur Impor	15
29	Direktur Fasilitasi Ekspor dan Impor	15
30	Direktur Pengamanan Perdagangan	15
V.	Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional	
31	Sekretaris Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional	15
32	Direktur Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia	15
33	Direktur Perundingan ASEAN	15
34	Direktur Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional	15
35	Direktur Perundingan Bilateral	15
36	Direktur Perundingan Perdagangan Jasa	15
VI.	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional	
37	Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional	15
38	Direktur Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor	15
39	Direktur Pengembangan Ekspor Produk Manufaktur	15
40	Direktur Pengembangan Ekspor Jasa dan Produk Kreatif	15
41	Direktur Pengembangan Ekspor Produk Primer	15

NO	NAMA JABATAN	KELAS	
VII.	Inspektorat Jenderal		
42	Sekretaris Inspektorat Jenderal	15	
43	Inspektur I	15	
44	Inspektur II	15	
45	Inspektur III	15	
46	Inspektur IV	15	
VIII.	Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi		
47	Sekretaris Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi	15	
48	Kepala Biro Peraturan Perundangan-undangan dan Penindakan	15	
49	Kepala Biro Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas	15	
50	Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas	15	
51	Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi	15	
IX.	Badan Kebijakan Perdagangan		
52	Sekretaris Badan Kebijakan Perdagangan	15	
53	Kepala Pusat Kebijakan Perdagangan Domestik	15	
54	Kepala Pusat Kebijakan Perdagangan Internasional	15	
55	Kepala Pusat Kebijakan Ekspor Impor dan Pengamanan Perdagangan	15	
C.	JABATAN ADMINISTRATOR		
I.	Sekretariat Jenderal		
1	Kepala Bagian Barang Milik Negara	Biro Keuangan 13	
2	Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan	Biro Umum dan Layanan Pengadaan 13	
3	Kepala Bagian Perlengkapan		
4	Kepala Bagian Rumah Tangga		
5	Kepala Bagian Tata Usaha	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Perdagangan 13	
6	Kepala Balai Pelatihan Aparatur Metrologi dan Mutu		
7	Kepala Balai Pelatihan Aparatur Perdagangan Yogyakarta		
8	Kepala Balai Pelatihan Aparatur Perdagangan Padang		
9	Kepala Balai Pelatihan Aparatur Perdagangan Makassar		

NO	NAMA JABATAN		KELAS
10	Kepala Bagian Tata Usaha	Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Perdagangan	13
11	Kepala Bagian Tata Usaha	Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Ekspor dan Jasa Perdagangan	13
12	Kepala Balai Pelatihan Sumber Daya Manusia Metrologi, Mutu, dan Jasa Perdagangan		13
13	Kepala Bagian Tata Usaha	Pusat Data dan Sistem Informasi	13
II.	Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri		
14	Kepala Bagian Umum	Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri	13
III.	Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga		
15	Kepala Bagian Umum	Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	13
16	Kepala Balai Pengujian Mutu Barang	Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu	13
17	Kepala Balai Kalibrasi	Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu	13
18	Kepala Balai Sertifikasi	Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu	13
19	Kepala Balai Pengujian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan	Direktorat Metrologi	13
20	Kepala Balai Pengelolaan Standar Ukuran Metrologi Legal	Direktorat Metrologi	13
21	Kepala Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional I	Direktorat Metrologi	13
22	Kepala Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional II	Direktorat Metrologi	13
23	Kepala Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional III	Direktorat Metrologi	13
24	Kepala Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional IV	Direktorat Metrologi	13
25	Kepala Balai Pengawasan Tertib Niaga Medan	Direktorat Tertib Niaga	13
26	Kepala Balai Pengawasan Tertib Niaga Bekasi	Direktorat Tertib Niaga	13
27	Kepala Balai Pengawasan Tertib Niaga Surabaya	Direktorat Tertib Niaga	13
28	Kepala Balai Pengawasan Tertib Niaga Makassar	Direktorat Tertib Niaga	13

NO	NAMA JABATAN		KELAS
IV.	Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri		
29	Kepala Bagian Umum	Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri	13
V.	Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional		
30	Kepala Bagian Umum	Sekretariat Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional	13
VI.	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional		
31	Kepala Bagian Umum	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional	13
VII.	Inspektorat Jenderal		
32	Kepala Bagian Umum	Sekretariat Inspektorat Jenderal	13
VIII.	Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi		
33	Kepala Bagian Umum	Sekretariat Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi	13
IX.	Badan Kebijakan Perdagangan		
34	Kepala Bagian Umum	Sekretariat Badan Kebijakan Perdagangan	13
D.	JABATAN PENGAWAS		
I.	Sekretariat Jenderal		
1	Kepala Subbagian Tata Usaha	Biro Perencanaan	10
2	Kepala Subbagian Tata Usaha	Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	10
3	Kepala Subbagian Penatausahaan Barang Milik Negara	Biro Keuangan	10
4	Kepala Subbagian Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik Negara		10
5	Kepala Subbagian Tata Usaha		10
6	Kepala Subbagian Tata Usaha	Biro Hukum	10
7	Kepala Subbagian Tata Usaha Menteri	Biro Umum dan Layanan Pengadaan	10
8	Kepala Subbagian Tata Usaha Wakil Menteri, Staf Ahli, dan Staf Khusus		10
9	Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Jenderal		10
10	Kepala Subbagian Protokol		10

NO	NAMA JABATAN		KELAS
11	Kepala Subbagian Urusan Dalam		10
12	Kepala Subbagian Pemeliharaan		10
13	Kepala Subbagian Keamanan		10
14	Kepala Subbagian Tata Usaha	Biro Hubungan Masyarakat	10
15	Kepala Subbagian Tata Usaha	Biro Advokasi Perdagangan	10
16	Kepala Subbagian Tata Usaha	Balai Pelatihan Aparatur Metrologi dan Mutu	10
17	Kepala Subbagian Tata Usaha	Balai Pelatihan Aparatur Perdagangan Yogyakarta	10
18	Kepala Subbagian Tata Usaha	Balai Pelatihan Aparatur Perdagangan Padang	10
19	Kepala Subbagian Tata Usaha	Balai Pelatihan Aparatur Perdagangan Makassar	10
20	Kepala Subbagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan	Akademi Metrologi dan Instrumentasi	10
21	Kepala Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan		10
22	Kepala Subbagian Tata Usaha	Pusat Penanganan Isu Strategis	10
23	Kepala Subbagian Tata Usaha	Balai Pelatihan Sumber Daya Manusia Metrologi, Mutu, dan Jasa Perdagangan	10
II.	Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri		
24	Kepala Subbagian Barang Milik Negara dan Rumah Tangga	Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri	10
25	Kepala Subbagian Tata Usaha	Direktorat Bina Usaha Perdagangan	10
26	Kepala Subbagian Tata Usaha	Direktorat Sarana Perdagangan dan Logistik	10
27	Kepala Subbagian Tata Usaha	Direktorat Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	10
28	Kepala Subbagian Tata Usaha	Direktorat Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	10
29	Kepala Subbagian Tata Usaha	Direktorat Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa	10
III.	Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga		
30	Kepala Subbagian Barang Milik Negara dan Rumah	Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan	10

NO	NAMA JABATAN			KELAS
	Tangga		Konsumen dan Tertib Niaga	
31	Kepala Subbagian Tata Usaha		Direktorat Pemberdayaan Konsumen	10
32	Kepala Subbagian Tata Usaha		Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu	10
33	Kepala Subbagian Tata Usaha		Balai Pengujian Mutu Barang	10
34	Kepala Subbagian Tata Usaha		Balai Kalibrasi	10
35	Kepala Subbagian Tata Usaha		Balai Sertifikasi	10
36	Kepala Subbagian Tata Usaha		Direktorat Metrologi	10
37	Kepala Subbagian Tata Usaha		Balai Pengujian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan	10
38	Kepala Subbagian Tata Usaha		Balai Pengelolaan Standar Ukuran Metrologi Legal	10
39	Kepala Subbagian Tata Usaha		Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional I	10
40	Kepala Subbagian Tata Usaha		Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional II	10
41	Kepala Subbagian Tata Usaha		Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional III	10
42	Kepala Subbagian Tata Usaha		Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional IV	10
43	Kepala Subbagian Tata Usaha		Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa	10
44	Kepala Subbagian Tata Usaha		Direktorat Tertib Niaga	10
45	Kepala Subbagian Tata Usaha		Balai Pengawasan Tertib Niaga Medan	10
46	Kepala Subbagian Tata Usaha		Balai Pengawasan Tertib Niaga Bekasi	10
47	Kepala Subbagian Tata Usaha		Balai Pengawasan Tertib Niaga Surabaya	10
48	Kepala Subbagian Tata Usaha		Balai Pengawasan Tertib Niaga Makassar	10
IV.	Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri			
49	Kepala Subbagian Barang Milik Negara dan Rumah Tangga	Sekretariat	Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri	10
50	Kepala Subbagian Tata Usaha	Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan		10

NO	NAMA JABATAN			KELAS
51	Kepala Subbagian Tata Usaha	Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan	10	
52	Kepala Subbagian Tata Usaha	Direktorat Impor	10	
53	Kepala Subbagian Tata Usaha	Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor	10	
54	Kepala Subbagian Tata Usaha	Direktorat Pengamanan Perdagangan	10	
V.	Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional			
55	Kepala Subbagian Barang Milik Negara dan Rumah Tangga	Sekretariat Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional	10	
56	Kepala Subbagian Tata Usaha	Direktorat Perundingan Organisasi Perdagangan Dunia	10	
57	Kepala Subbagian Tata Usaha	Direktorat Perundingan ASEAN	10	
58	Kepala Subbagian Tata Usaha	Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional	10	
59	Kepala Subbagian Tata Usaha	Direktorat Perundingan Bilateral	10	
60	Kepala Subbagian Tata Usaha	Direktorat Perundingan Perdagangan Jasa	10	
VI.	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional			
61	Kepala Subbagian Barang Milik Negara dan Rumah Tangga	Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional	10	
62	Kepala Subbagian Tata Usaha	Direktorat Pengembangan Pasar dan Informasi Ekspor	10	
63	Kepala Subbagian Tata Usaha	Direktorat Pengembangan Ekspor Produk Manufaktur	10	
64	Kepala Subbagian Tata Usaha	Direktorat Pengembangan Ekspor Jasa dan Produk Kreatif	10	
65	Kepala Subbagian Tata Usaha	Direktorat Pengembangan Ekspor Produk Primer	10	
VII.	Inspektorat Jenderal			
66	Kepala Subbagian Barang Milik Negara dan Rumah Tangga	Sekretariat Inspektorat Jenderal	10	
67	Kepala Subbagian Tata Usaha	Inspektorat I	10	
68	Kepala Subbagian Tata Usaha	Inspektorat II	10	
69	Kepala Subbagian Tata Usaha	Inspektorat III	10	

NO	NAMA JABATAN		KELAS
70	Kepala Subbagian Tata Usaha	Inspektorat IV	10
VIII.	Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi		
71	Kepala Subbagian Barang Milik Negara dan Rumah Tangga	Sekretariat Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi	10
72	Kepala Subbagian Tata Usaha	Biro Peraturan Perundangan-undangan dan Penindakan	10
73	Kepala Subbagian Tata Usaha	Biro Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas	10
74	Kepala Subbagian Tata Usaha	Biro Pembinaan dan Pengembangan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas	10
75	Kepala Subbagian Tata Usaha	Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi	10
IX.	Badan Kebijakan Perdagangan		
76	Kepala Subbagian Barang Milik Negara dan Rumah Tangga	Sekretariat Badan Kebijakan Perdagangan	10
77	Kepala Subbagian Tata Usaha	Pusat Kebijakan Perdagangan Domestik	10
78	Kepala Subbagian Tata Usaha	Pusat Kebijakan Perdagangan Internasional	10
79	Kepala Subbagian Tata Usaha	Pusat Kebijakan Ekspor Impor dan Pengamanan Perdagangan	10

III. NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN NONMANAJERIAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

NO.	NAMA JABATAN	KELAS
A.	JABATAN FUNGSIONAL	
I.	Rumpun Manajemen	
1	Analisis Kebijakan	
a.	Analisis Kebijakan Ahli Utama/Analisis Kebijakan Utama	14
b.	Analisis Kebijakan Ahli Madya/Analisis Kebijakan Madya	13
		12
c.	Analisis Kebijakan Ahli Muda/Analisis Kebijakan Muda	10
d.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama/Analisis Kebijakan Pertama	8
2	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	
a.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya	13
		12
b.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	10
c.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	8
3	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur	
a.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Penyelia	8
b.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Mahir	7
c.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil	6
4	Perencana	
a.	Perencana Ahli Utama/Perencana Utama	14
b.	Perencana Ahli Madya/Perencana Madya	13
		12
c.	Perencana Ahli Muda/Perencana Muda	10
d.	Perencana Ahli Pertama/Perencana Pertama	8
5	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	
a.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya	13
		12
b.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	10
c.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	8
6	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur	
a.	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Madya	13
		12
b.	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Muda	10
c.	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Pertama	8
7	Penata Laksana Barang	
a.	Penata Laksana Barang Penyelia	9
b.	Penata Laksana Barang Mahir	8
c.	Penata Laksana Barang Terampil	7
II.	Rumpun Akuntan dan Anggaran	
8	Auditor	
a.	Auditor Ahli Utama/Auditor Utama	14
b.	Auditor Ahli Madya/Auditor Madya	12
c.	Auditor Ahli Muda/Auditor Muda	10

NO.	NAMA JABATAN		KELAS
9	d.	Auditor Ahli Pertama/Auditor Pertama	8
	e.	Auditor Terampil Penyelia/Auditor Penyelia	9
	f.	Auditor Terampil Pelaksana Lanjutan/Auditor Pelaksana Lanjutan/Auditor Mahir	7
	g.	Auditor Terampil Pelaksana/Auditor Pelaksana/Auditor Terampil	6
10	Analisis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara		
	a.	Analisis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Madya	13
			12
	b.	Analisis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Muda	10
11	c.	Analisis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama	8
	Analisis Anggaran		
	a.	Analisis Anggaran Ahli Madya/ Analisis Anggaran Madya	13
III.			12
	b.	Analisis Anggaran Ahli Muda/ Analisis Anggaran Muda	10
	c.	Analisis Anggaran Ahli Pertama/Analisis Anggaran Pertama	8
12	Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara		
	a.	Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Penyelia	9
	b.	Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Mahir	8
	c.	Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Terampil	7
Rumpun Hukum dan Peradilan			
13	Perancang Peraturan Perundang-undangan		
	a.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Utama/Perancang Peraturan Perundang-undangan Utama	14
	b.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya/Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya	13
	c.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda/Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda	10
	d.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama/Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama	8
	Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan		
	a.	Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Utama/Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Utama	14
	b.	Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Madya/Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Madya	13
			12
	c.	Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Muda/Analisis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Muda	10

NO.	NAMA JABATAN		KELAS
	d. Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Ahli Pertama/Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan Pertama		
14	Analisis Hukum		
	a. Analis Hukum Ahli Madya/Analis Hukum Madya	11	
	b. Analis Hukum Ahli Muda/ Analis Hukum Muda	9	
	c. Analis Hukum Ahli Pertama/ Analis Hukum Pertama	8	
IV	Rumpun Kekomputeran		
15	Pranata Komputer		
	a. Pranata Komputer Ahli Madya/Pranata Komputer Madya	13 11	
	b. Pranata Komputer Ahli Muda/Pranata Komputer Muda	10 9	
	c. Pranata Komputer Ahli Pertama/Pranata Komputer Pertama	8	
	d. Pranata Komputer Terampil Penyelia/Pranata Komputer Penyelia	8	
	e. Pranata Komputer Terampil Pelaksana Lanjutan/Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan/Pranata Komputer Mahir	7	
	f. Pranata Komputer Terampil Pelaksana/Pranata Komputer Pelaksana/Pranata Komputer Terampil	6	
V	Rumpun Matematika, Statistik dan yang berkaitan		
16	Statistisi		
	a. Statistisi Ahli Madya/Statistisi Madya	13 11	
	b. Statistisi Ahli Muda/Statistisi Muda	10 9	
	c. Statistisi Ahli Pertama/Statistisi Pertama	8	
	d. Statistisi Terampil Penyelia/Statistisi Penyelia	8	
	e. Statistisi Terampil Pelaksana Lanjutan/Statistisi Pelaksana Lanjutan/Statistisi Mahir	7	
	f. Statistisi Terampil Pelaksana/Statistisi Pelaksana/Statistisi Terampil	6	
VI	Rumpun Pengawas Kualitas dan Keamanan		
17	Penera		
	a. Penera Ahli Madya/Penera Madya	13 11	
	b. Penera Ahli Muda/Penera Muda	10 9	
	c. Penera Ahli Pertama/Penera Pertama	8	
	d. Penera Terampil Penyelia/Penera Penyelia	8	
	e. Penera Terampil Pelaksana Lanjutan/Penera Pelaksana Lanjutan/Penera Mahir	7	
	f. Penera Terampil Pelaksana/Penera Pelaksana/Penera Terampil	6	

NO.	NAMA JABATAN		KELAS
18	Pengamat Tera		
	a. Pengamat Tera Terampil Penyelia/Pengamat Tera Penyelia	8	
	b. Pengamat Tera Terampil Pelaksana Lanjutan/Pengamat Tera Pelaksana Lanjutan/Pengamat Tera Mahir	7	
19	Pengawas Kmetrologian		
	a. Pengawas Kmetrologian Ahli Madya/Pengawas Kmetrologian Madya	13 11	
	b. Pengawas Kmetrologian Ahli Muda/Pengawas Kmetrologian Muda	10 9	
	c. Pengawas Kmetrologian Ahli Pertama/Pengawas Kmetrologian Pertama	8	
20	Pranata Laboratorium Kmetrologian		
	a. Pranata Laboratorium Kmetrologian Ahli Madya/Pranata Laboratorium Kmetrologian Madya	13 11	
	b. Pranata Laboratorium Kmetrologian Ahli Muda/Pranata Laboratorium Kmetrologian Muda	10 9	
	c. Pranata Laboratorium Kmetrologian Ahli Pertama/Pranata Laboratorium Kmetrologian Pertama	8	
21	Penguji Mutu Barang		
	a. Penguji Mutu Barang Ahli Madya/Penguji Mutu Barang Madya	13 11	
	b. Penguji Mutu Barang Ahli Muda/Penguji Mutu Barang Muda	10 9	
	c. Penguji Mutu Barang Ahli Pertama/Penguji Mutu Barang Pertama	8	
	d. Penguji Mutu Barang Terampil Penyelia/Penguji Mutu Barang Penyelia	9	
	e. Penguji Mutu Barang Terampil Pelaksana Lanjutan/Penguji Mutu Barang Pelaksana Lanjutan/Penguji Mutu Barang Mahir	8	
	f. Penguji Mutu Barang Terampil Pelaksana/Penguji Mutu Barang Pelaksana/Penguji Mutu Barang Terampil	7	
22	Pengawas Perdagangan		
	a. Pengawas Perdagangan Ahli Madya	13 12	
	b. Pengawas Perdagangan Ahli Muda	10	
	c. Pengawas Perdagangan Ahli Pertama	8	
23	Pemeriksa Perdagangan Berjangka Komoditi		
	a. Pemeriksa Perdagangan Berjangka Komoditi Ahli Utama	14	
	b. Pemeriksa Perdagangan Berjangka Komoditi Ahli Madya	13 12	
	c. Pemeriksa Perdagangan Berjangka Komoditi Ahli	10	

NO.	NAMA JABATAN		KELAS
	Muda		
d.	Pemeriksa Perdagangan Berjangka Komoditi Ahli Pertama		8
24	Penjamin Mutu Produk		
a.	Penjamin Mutu Produk Ahli Utama	14	
b.	Penjamin Mutu Produk Ahli Madya	13	
		12	
c.	Penjamin Mutu Produk Ahli Muda	10	
d.	Penjamin Mutu Produk Ahli Pertama	8	
VII	Rumpun Penerangan dan Seni Budaya		
25	Pranata Hubungan Masyarakat		
a.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya/Pranata Hubungan Masyarakat Madya	13	
		11	
b.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda/Pranata Hubungan Masyarakat Muda	10	
		9	
c.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama/Pranata Hubungan Masyarakat Pertama	8	
d.	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil Penyelia/Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia	8	
e.	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil Pelaksana Lanjutan/Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Lanjutan/Pranata Hubungan Masyarakat Mahir	7	
f.	Pranata Hubungan Masyarakat Terampil Pelaksana/Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana/Pranata Hubungan Masyarakat Terampil	6	
VIII	Rumpun Arsiparis, Pustakawan dan yang berkaitan		
26	Arsiparis		
a.	Arsiparis Ahli Madya/Arsiparis Madya	13	
		11	
b.	Arsiparis Ahli Muda/Arsiparis Muda	10	
		9	
c.	Arsiparis Ahli Pertama/Arsiparis Pertama	8	
d.	Arsiparis Terampil Penyelia/Arsiparis Penyelia	8	
e.	Arsiparis Terampil Pelaksana Lanjutan/Arsiparis Pelaksana Lanjutan/Arsiparis Mahir	7	
f.	Arsiparis Terampil Pelaksana/Arsiparis Pelaksana/Arsiparis Terampil	6	
27	Pustakawan		
a.	Pustakawan Ahli Madya/Pustakawan Madya	13	
		11	
b.	Pustakawan Ahli Muda/Pustakawan Muda	10	
		9	
c.	Pustakawan Ahli Pertama/Pustakawan Pertama	8	
d.	Pustakawan Terampil Penyelia/Pustakawan Penyelia	8	
e.	Pustakawan Terampil Pelaksana Lanjutan/Pustakawan Pelaksana Lanjutan/Pustakawan Mahir	7	
f.	Pustakawan Terampil Pelaksana/Pustakawan Pelaksana/Pustakawan Terampil	6	

NO.	NAMA JABATAN	KELAS
IX	Rumpun Kesehatan	
28	Dokter	
	a. Dokter Ahli Madya/Dokter Madya	12
	b. Dokter Ahli Muda/Dokter Muda	10
	c. Dokter Ahli Pertama/Dokter Pertama	9
29	Dokter Gigi	
	a. Dokter Gigi Ahli Madya/Dokter Gigi Madya	12
	b. Dokter Gigi Ahli Muda/Dokter Gigi Muda	10
	c. Dokter Gigi Ahli Pertama/Dokter Gigi Pertama	9
30	Pranata Laboratorium Kesehatan	
	a. Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Madya/Pranata Laboratorium Kesehatan Madya	11
	b. Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Muda/Pranata Laboratorium Kesehatan Muda	9
	c. Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama/Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama	8
	d. Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil Penyelia/ Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	8
	e. Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil Pelaksana Lanjutan/Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan/Pranata Laboratorium Kesehatan Mahir	7
	f. Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil Pelaksana/Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana/Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	6
31	Apoteker	
	a. Apoteker Ahli Madya/Apoteker Madya	11
	b. Apoteker Ahli Muda/ Apoteker Muda	9
	c. Apoteker Ahli Pertama/ Apoteker Pertama	8
32	Asisten Apoteker	
	a. Asisten Apoteker Terampil Penyelia/Asisten Apoteker Penyelia	8
	b. Asisten Apoteker Terampil Pelaksana Lanjutan/Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan/Asisten Apoteker Mahir	7
	c. Asisten Apoteker Terampil Pelaksana/Asisten Apoteker Pelaksana/Asisten Apoteker Terampil	6
33	Perawat	
	a. Perawat Ahli Madya/Perawat Madya	11
	b. Perawat Ahli Muda/Perawat Muda	9
	c. Perawat Ahli Pertama/Perawat Pertama	8
	d. Perawat Terampil Penyelia/Perawat Penyelia	8
	e. Perawat Terampil Pelaksana Lanjutan/Perawat Pelaksana Lanjutan/Perawat Mahir	7
	f. Perawat Terampil Pelaksana/Perawat Pelaksana/ Perawat Terampil	6
34	Perawat Gigi	
	a. Perawat Gigi Terampil Penyelia/Perawat Gigi Penyelia	8

NO.	NAMA JABATAN		KELAS
	b.	Perawat Gigi Terampil Pelaksana Lanjutan/Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan/Perawat Gigi Mahir	7
	c.	Perawat Gigi Terampil Pelaksana/Perawat Gigi Pelaksana/Perawat Gigi Terampil	6
35	Bidan		
	a.	Bidan Ahli Madya/Bidan Madya	11
	b.	Bidan Ahli Muda/Bidan Muda	9
X	Rumpun Pendidikan Tingkat Pendidikan Tinggi		
	36	Dosen	
		a. Dosen Lektor Kepala	13
XI	37	b. Dosen Lektor	11
		c. Dosen Asisten Ahli	9
		Rumpun Pendidikan Lainnya	
38	39	Widyaaiswara	
		a. Widyaaiswara Ahli Utama/Widyaaiswara Utama	14
		b. Widyaaiswara Ahli Madya/Widyaaiswara Madya	13
			12
		c. Widyaaiswara Ahli Muda/Widyaaiswara Muda	10
XII		d. Widyaaiswara Ahli Pertama/Widyaaiswara Pertama	8
40	Pengembang Teknologi Pembelajaran		
	a. Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya	13	
		12	
	b. Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda	10	
	XIII		c. Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama
39	Pranata Laboratorium Pendidikan		
	a. Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Muda	9	
	b. Pranata Laboratorium Pendidikan Ahli Pertama	8	
	c. Pranata Laboratorium Pendidikan Terampil Penyelia/Pranata Laboratorium Pendidikan Penyelia	8	
XIV	41	d. Pranata Laboratorium Pendidikan Terampil Pelaksana Lanjutan/Pranata Laboratorium Pendidikan Pelaksana Lanjutan	7
		e. Pranata Laboratorium Pendidikan Terampil Pelaksana/Pranata Laboratorium Pendidikan Pelaksana	6
		Rumpun imigrasi, pajak dan asisten profesional	
		Negosiator Perdagangan	
		a. Negosiator Perdagangan Ahli Utama	14
XV	41	b. Negosiator Perdagangan Ahli Madya	13
			12
		c. Negosiator Perdagangan Ahli Muda	10
		d. Negosiator Perdagangan Ahli Pertama	8
Rumpun asisten profesional yang berhubungan dengan keuangan dan penjualan			
41	Analisis Perdagangan		

NO.	NAMA JABATAN		KELAS
a.	Analis Perdagangan Ahli Utama	14	
	Analis Perdagangan Ahli Madya	13	
		12	
	c. Analis Perdagangan Ahli Muda	10	
d.	Analis Perdagangan Ahli Pertama	8	
B.	JABATAN PELAKSANA		
1.	Penelaah Teknis Kebijakan	7	
2.	Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan	7	
3.	Penelaah Pengembangan Jasa Sertifikasi dan Pengujian	7	
4.	Fasilitator Perdagangan	7	
5.	Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi	7	
6.	Pengawas Barang Beredar dan Jasa	7	
7.	Surveyor Perdagangan	7	
8.	Penata Layanan Operasional	7	
9.	Pengolah Data dan Informasi	6	
10.	Penata Keprotokolan	6	
11.	Pengelola Layanan Operasional	6	
12.	Pengadministrasi Perkantoran	5	
13.	Operator Layanan Operasional	5	
14.	Pengelola Umum Operasional	1	

IV. NAMA JABATAN DAN KELAS JABATAN STAF KHUSUS MENTERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

NO.	NAMA JABATAN	KELAS
1.	Staf Khusus Menteri	16

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

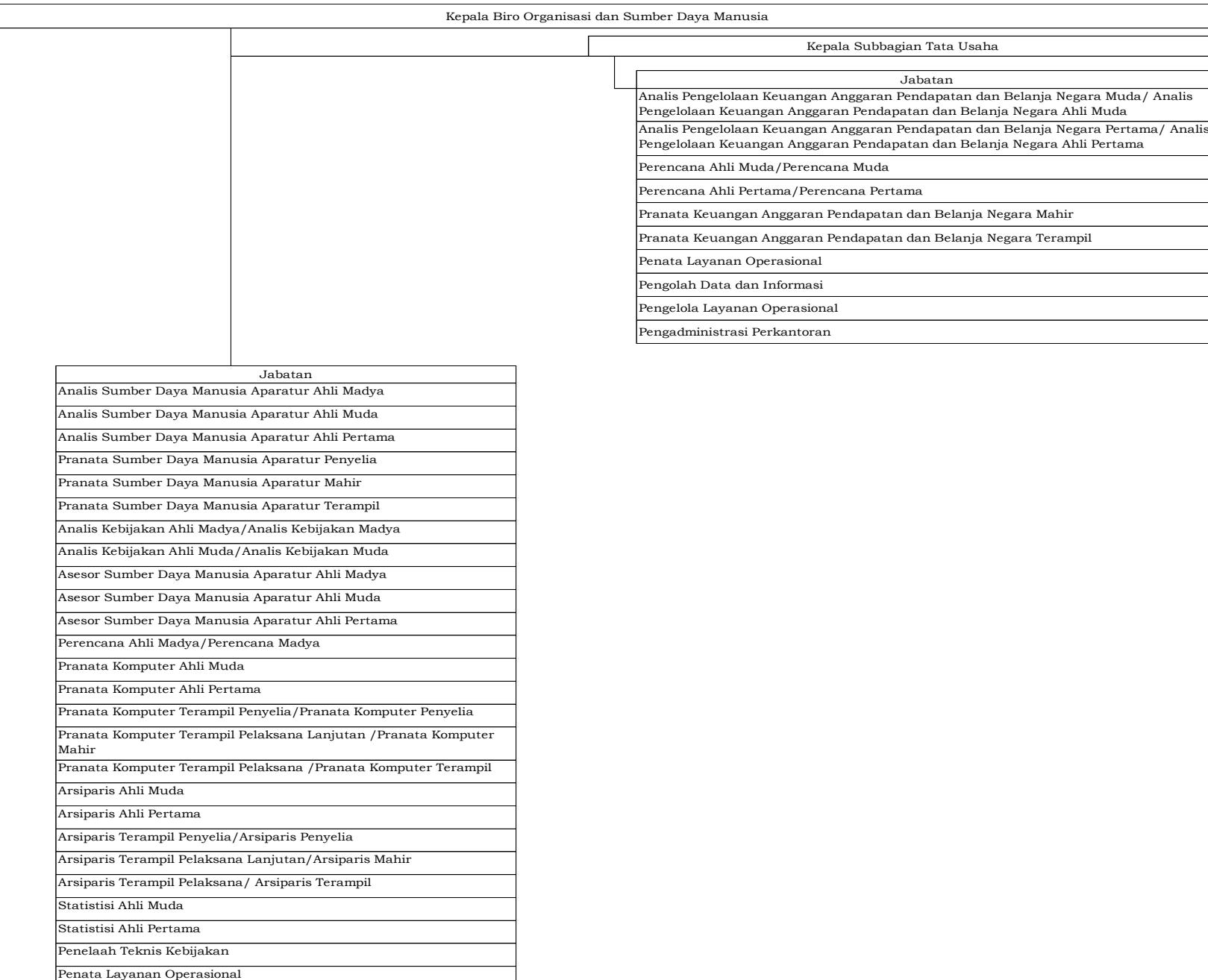
LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 19 TAHUN 2024  
TENTANG  
JABATAN, KELAS JABATAN, DAN PETA JABATAN DI  
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

PETA JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

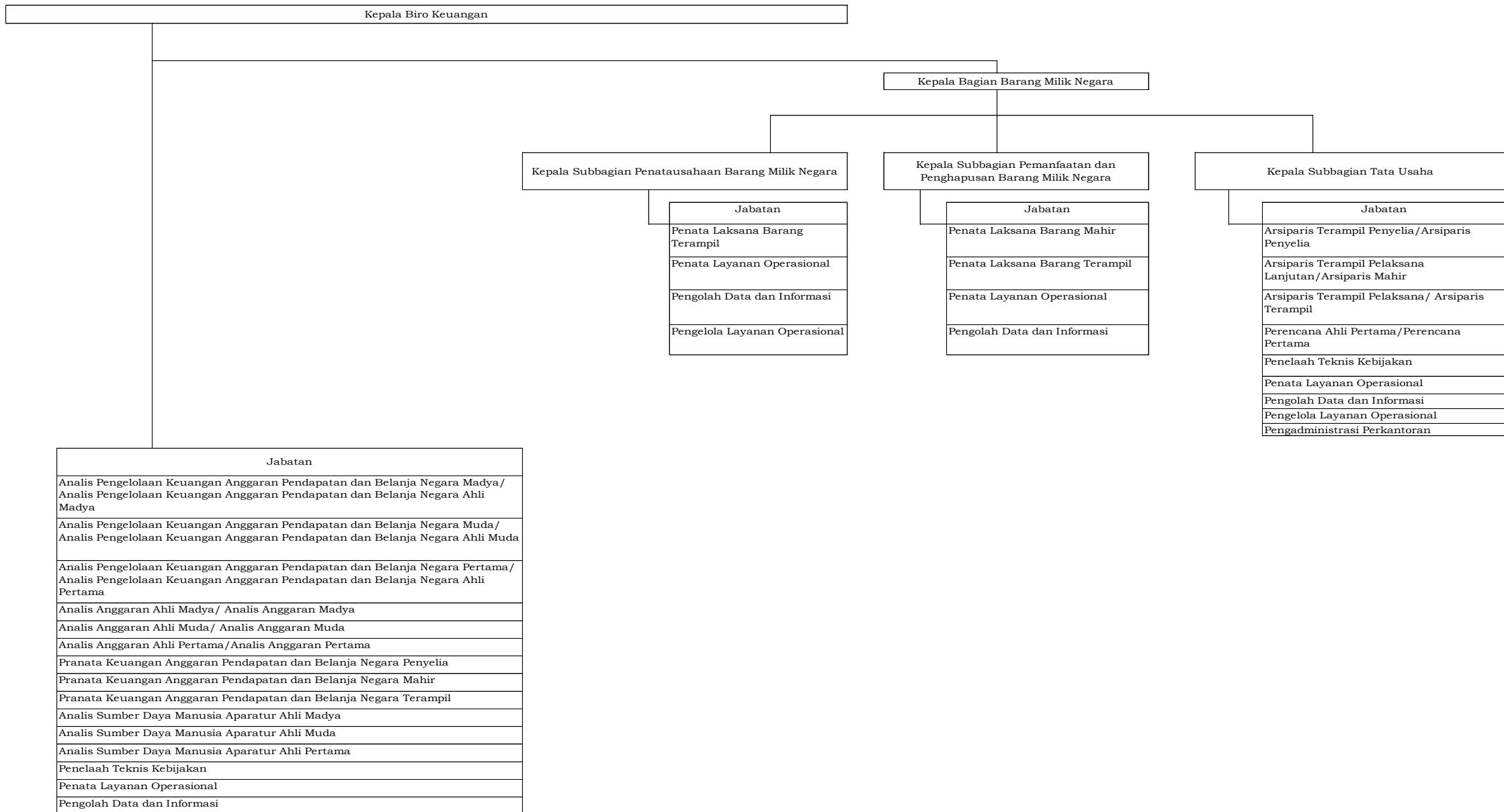
I. PETA JABATAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL  
A. PETA JABATAN BIRO PERENCANAAN

Kepala Biro Perencanaan	
Kepala Subbagian Tata Usaha	
Jabatan	
	Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Muda/ Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Muda
	Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pertama/ Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama
	Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Terampil
	Arsiparis Terampil Penyelia/Arsiparis Penyelia
	Arsiparis Terampil Pelaksana Lanjutan/Arsiparis Mahir
	Arsiparis Terampil Pelaksana/ Arsiparis Terampil
	Penata Layanan Operasional
	Pengolah Data dan Informasi
	Pengelola Layanan Operasional
	Pengadministrasi Perkantoran
Jabatan	
Perencana Ahli Utama/Perencana Utama	
Perencana Ahli Madya/Perencana Madya	
Perencana Ahli Muda/Perencana Muda	
Perencana Ahli Pertama/Perencana Pertama	
Pranata Komputer Ahli Muda	
Pranata Komputer Ahli Pertama	
Analis Kebijakan Ahli Muda/Analis Kebijakan Muda	
Analis Kebijakan Ahli Pertama/Analis Kebijakan Pertama	
Analis Perdagangan Ahli Madya	
Analis Anggaran Ahli Muda/ Analis Anggaran Muda	
Analis Anggaran Ahli Pertama/Analis Anggaran Pertama	
Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	
Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	
Penelaah Teknis Kebijakan	
Penata Layanan Operasional	

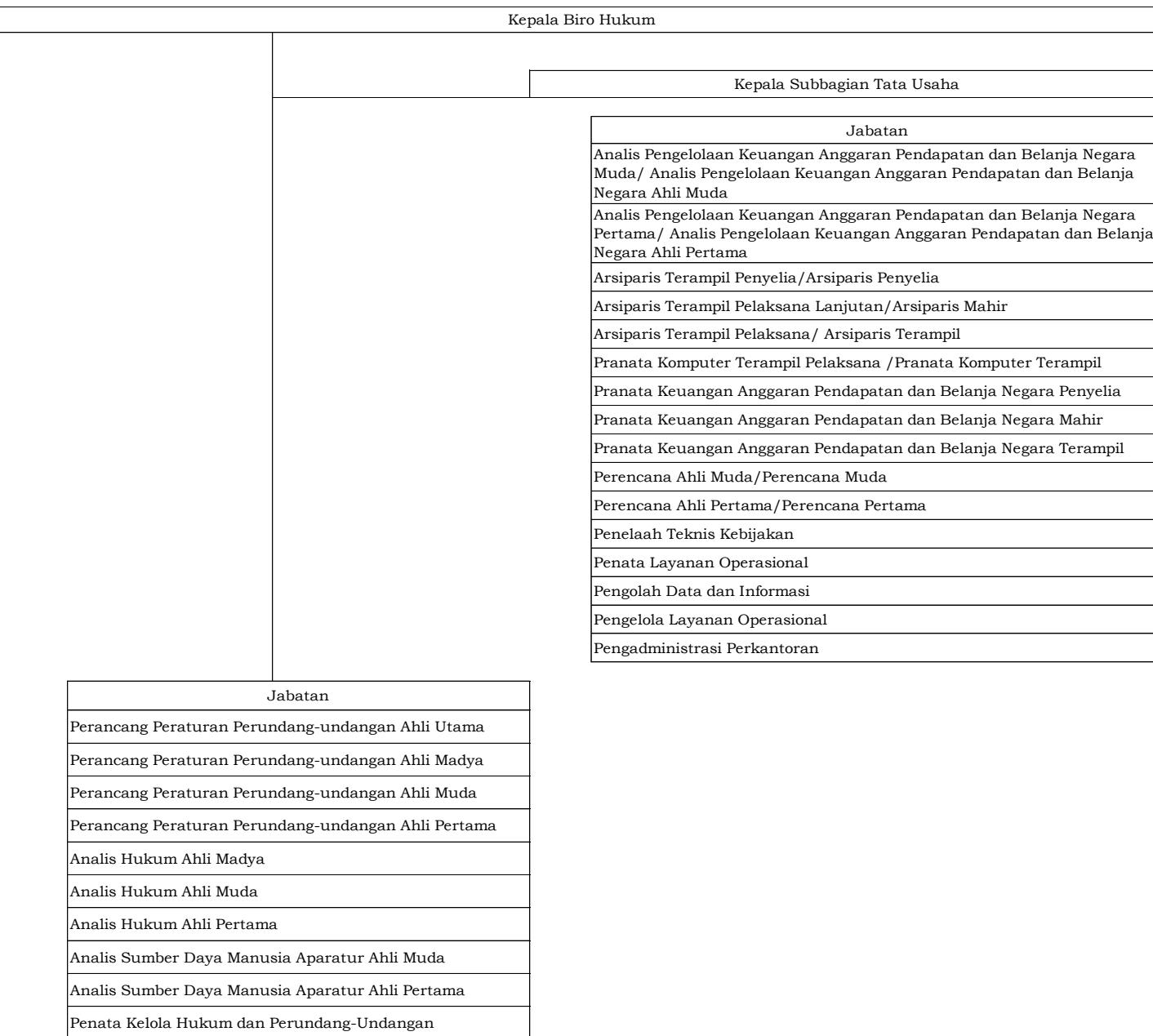
B. PETA JABATAN BIRO ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA



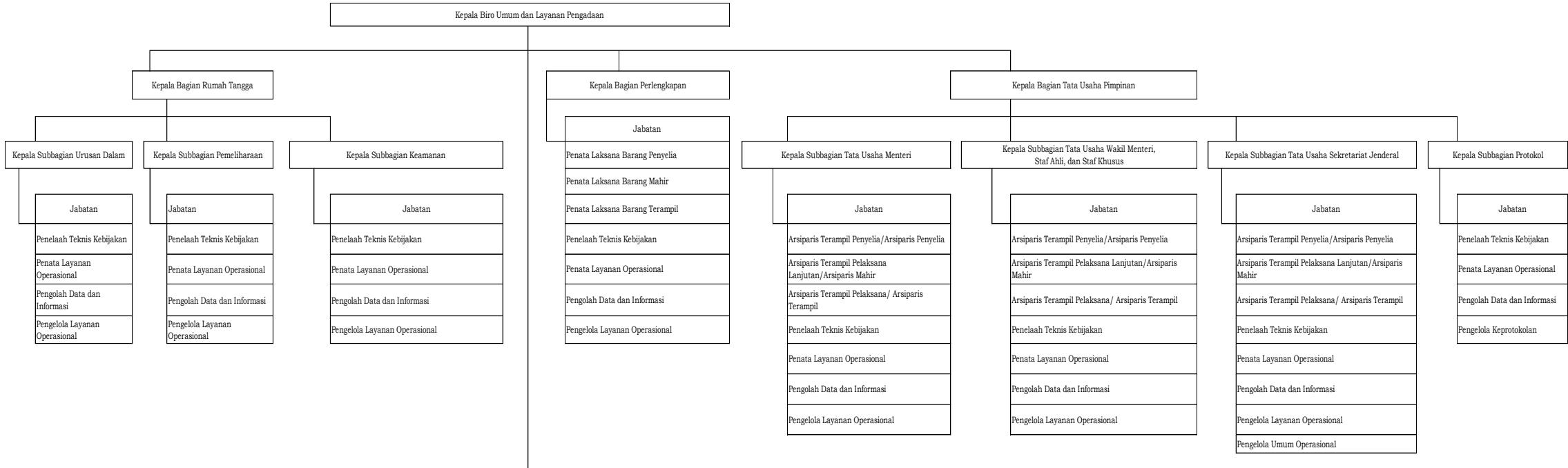
### C. PETA JABATAN BIRO KEUANGAN



#### D. PETA JABATAN BIRO HUKUM



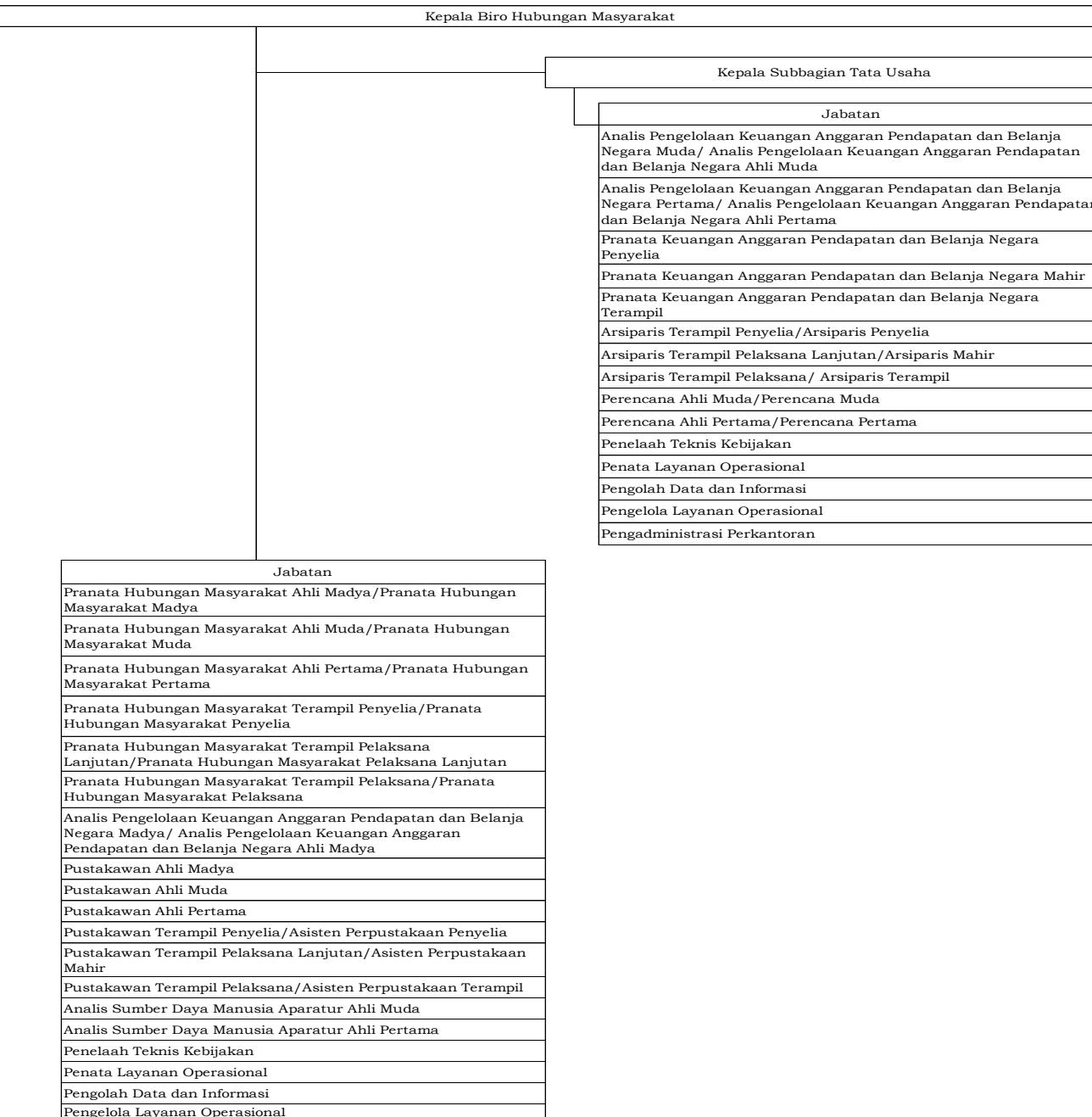
## E. PETA JABATAN BIRO UMUM DAN LAYANAN PENGADAAN



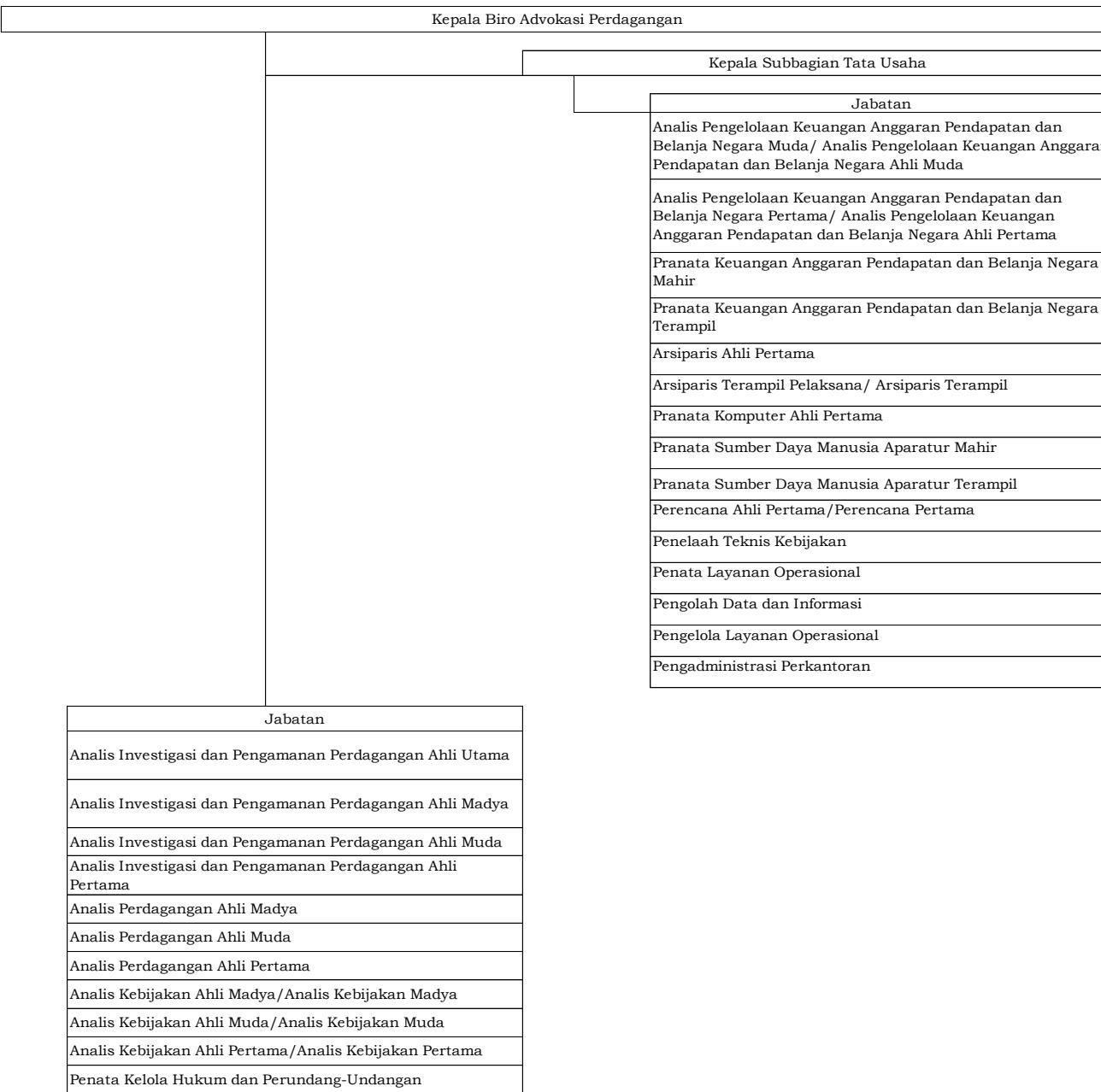
## PETA JABATAN BIRO UMUM DAN LAYANAN PENGADAAN

Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan	
Jabatan	
Dokter Gigi Ahli Madya/Dokter Gigi Madya	Analis Perdagangan Ahli Muda
Dokter Gigi Ahli Muda/Dokter Gigi Muda	Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Mahir
Dokter Gigi Ahli Pertama/Dokter Gigi Pertama	Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Terampil
Dokter Ahli Madya/Dokter Madya	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya
Dokter Ahli Muda/Dokter Muda	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda
Dokter Ahli Pertama/Dokter Pertama	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama
Apoteker Ahli Muda	Perencana Ahli Muda/Perencana Muda
Apoteker Ahli Pertama	Perencana Ahli Pertama/Perencana Pertama
Asisten Apoteker Terampil Penyelia/Asisten Apoteker Penyelia	Arsiparis Ahli Madya
Asisten Apoteker Terampil Pelaksana Lanjutan/Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan	Arsiparis Ahli Muda
Asisten Apoteker Terampil Pelaksana/Asisten Apoteker Pelaksana	Arsiparis Ahli Pertama
Perawat Terampil Penyelia/Perawat Penyelia	Arsiparis Terampil Penyelia/Arsiparis Penyelia
Perawat Terampil Pelaksana Lanjutan/Perawat Mahir	Arsiparis Terampil Pelaksana Lanjutan/Arsiparis Mahir
Perawat Terampil Pelaksana/Perawat Terampil	Arsiparis Terampil Pelaksana/ Arsiparis Terampil
Terapis Gigi dan Mulut Terampil	Pranata Komputer Ahli Muda
Bidan Ahli Madya	Pranata Komputer Ahli Pertama
Bidan Ahli Muda	Pranata Komputer Terampil Penyelia/Pranata Komputer Penyelia
Bidan Ahli Pertama	Pranata Komputer Terampil Pelaksana Lanjutan /Pranata Komputer Mahir
Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	Pranata Komputer Terampil Pelaksana /Pranata Komputer Terampil
Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan	Penata Laksana Barang Penyelia
Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana	Penata Laksana Barang Mahir
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya / Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya	Penata Laksana Barang Terampil
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda/ Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda	Penelaah Teknis Kebijakan
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama / Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama	Penata Layanan Operasional
Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Muda/ Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Madya	Pengadministrasi Perkantoran
Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pertama/ Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama	

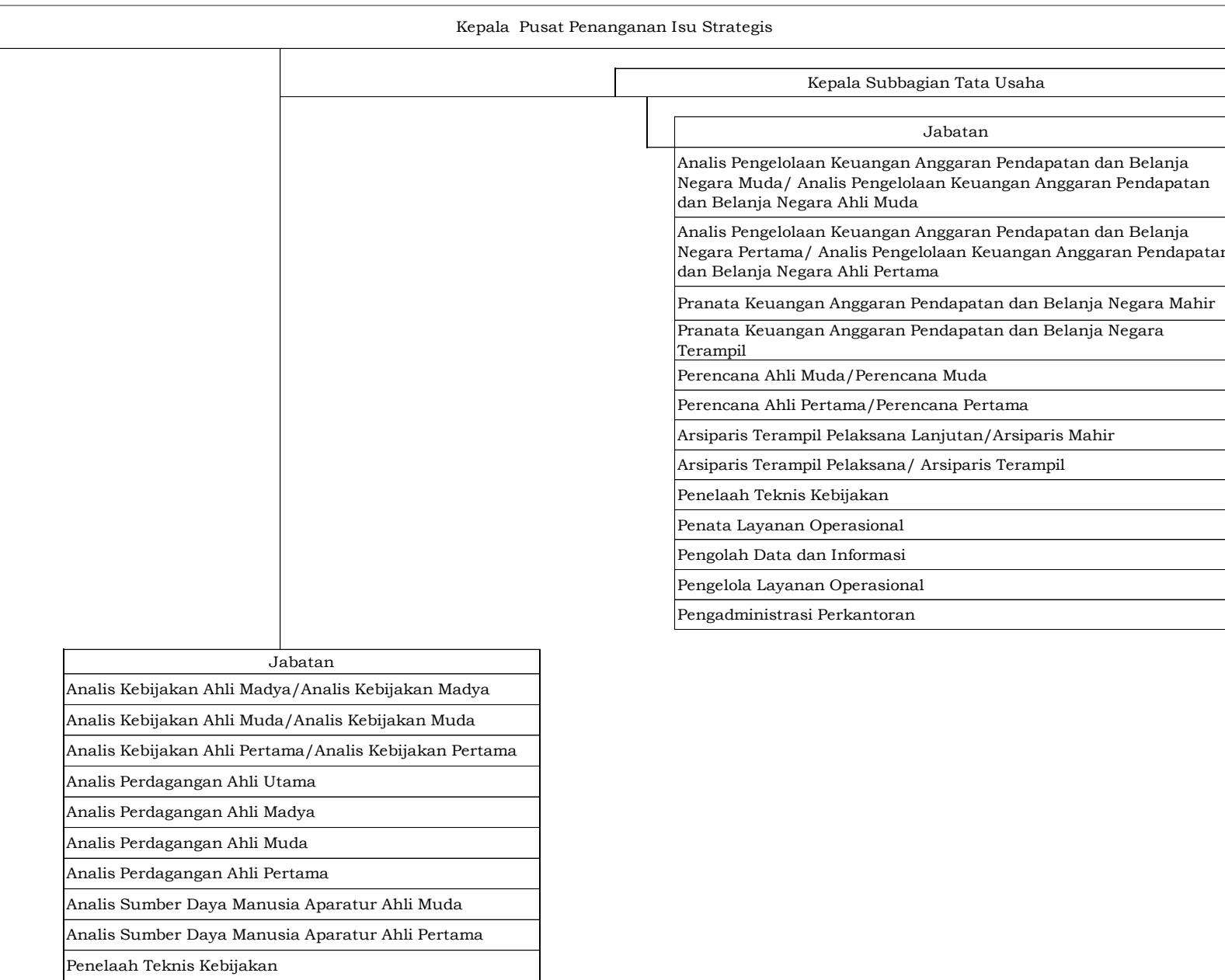
F. PETA JABATAN BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT



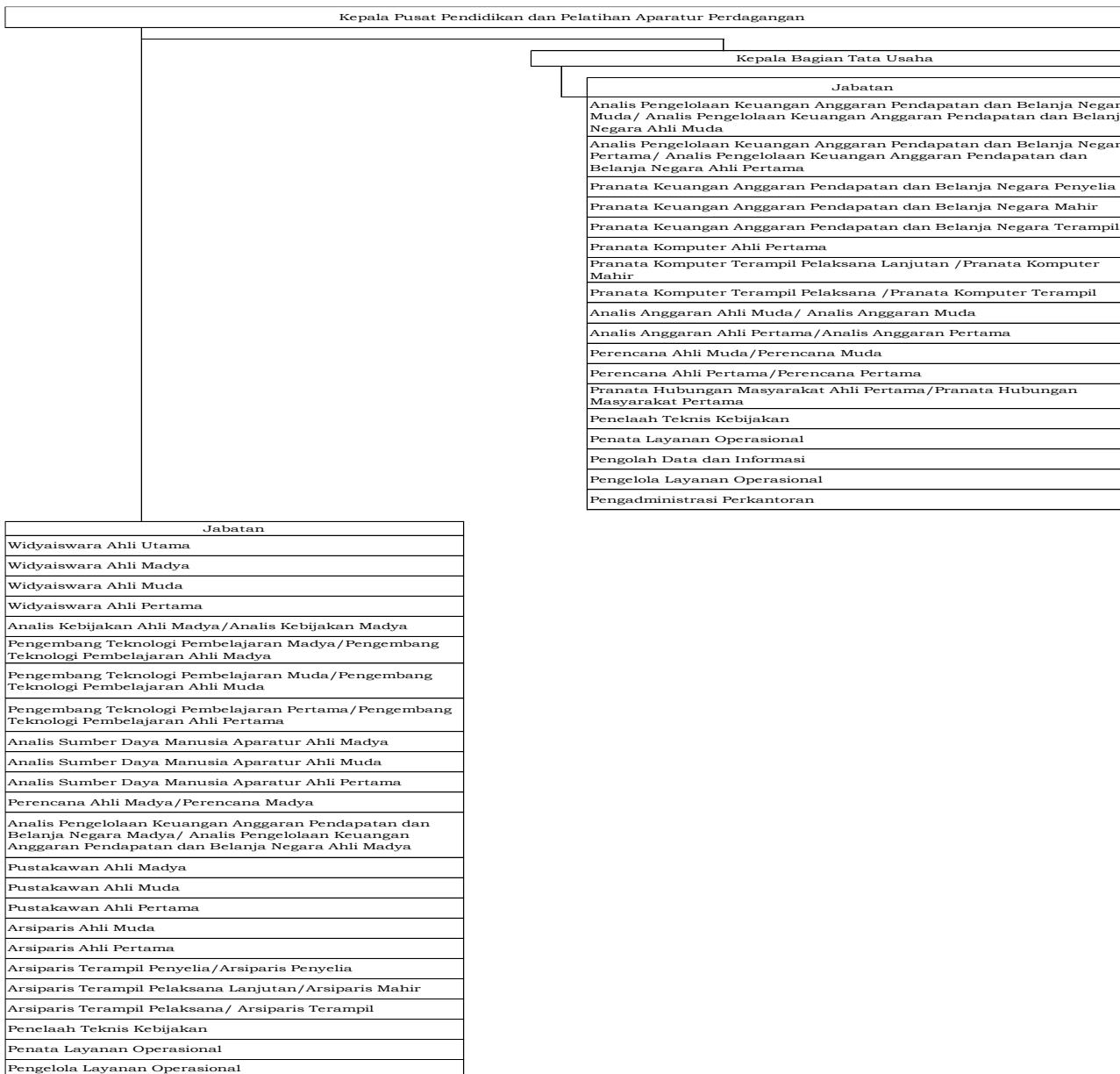
## G. PETA JABATAN BIRO ADVOKASI PERDAGANGAN



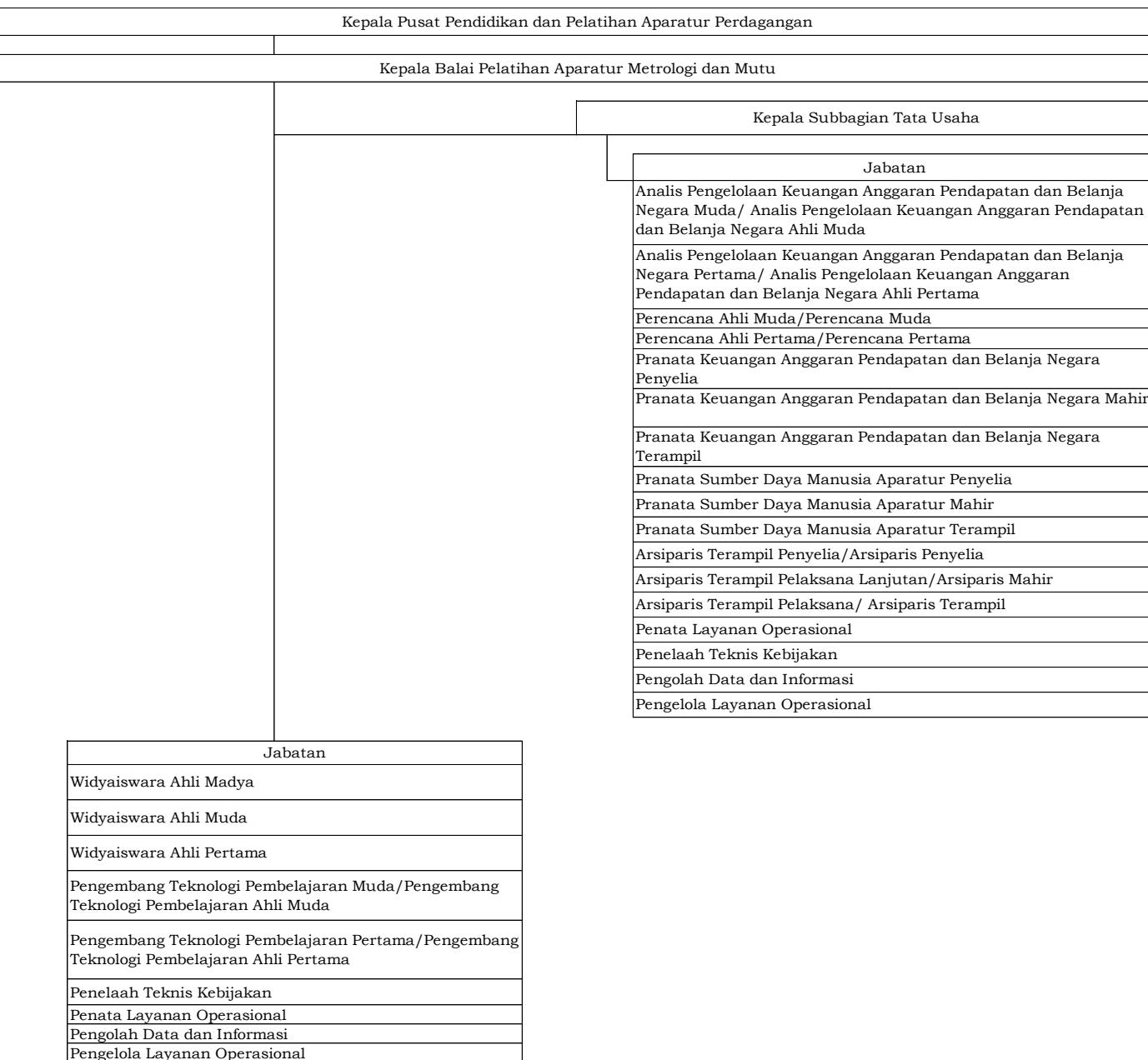
## H. PETA JABATAN PUSAT PENANGANAN ISU STRATEGIS



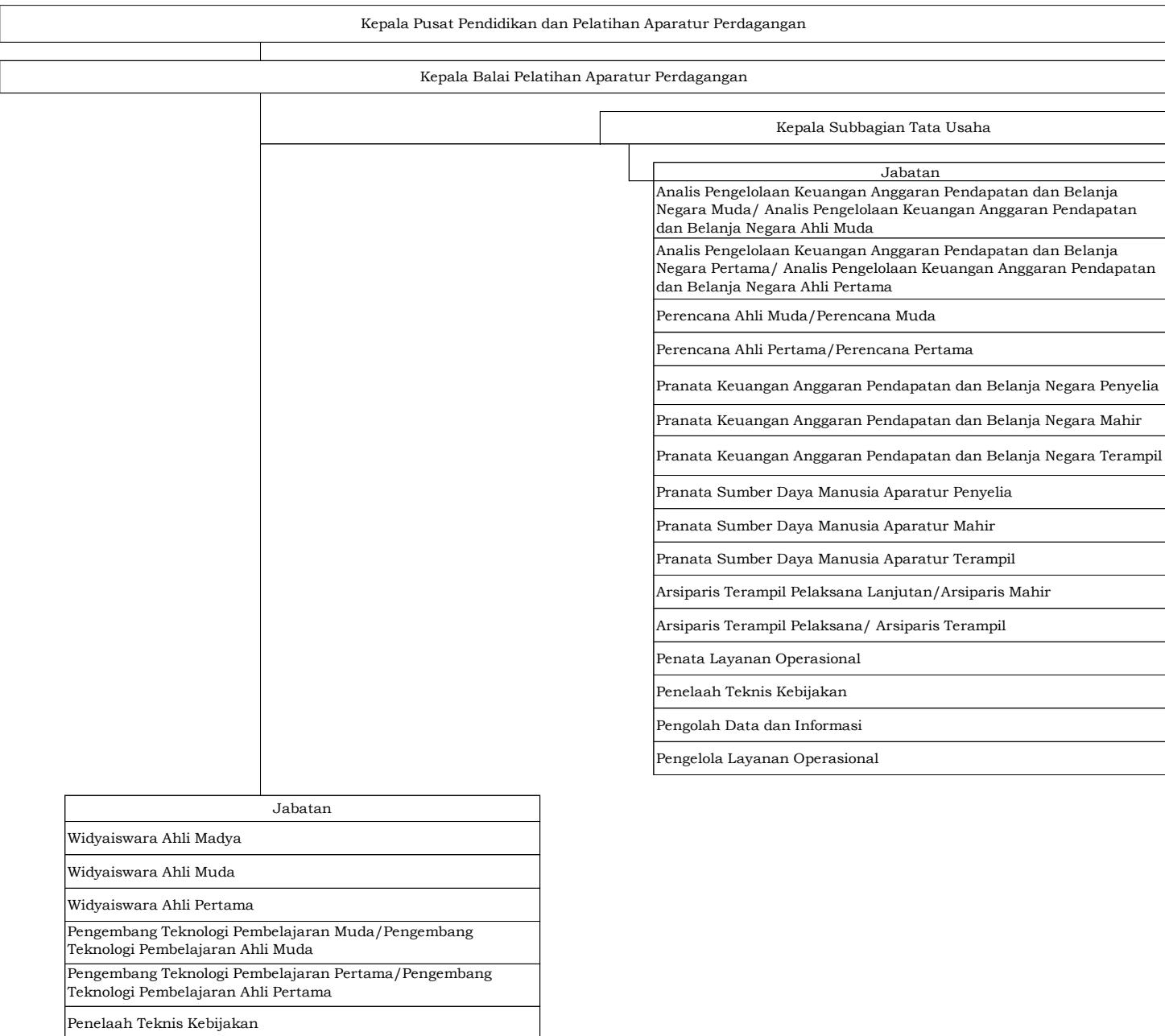
## I. PETA JABATAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR PERDAGANGAN



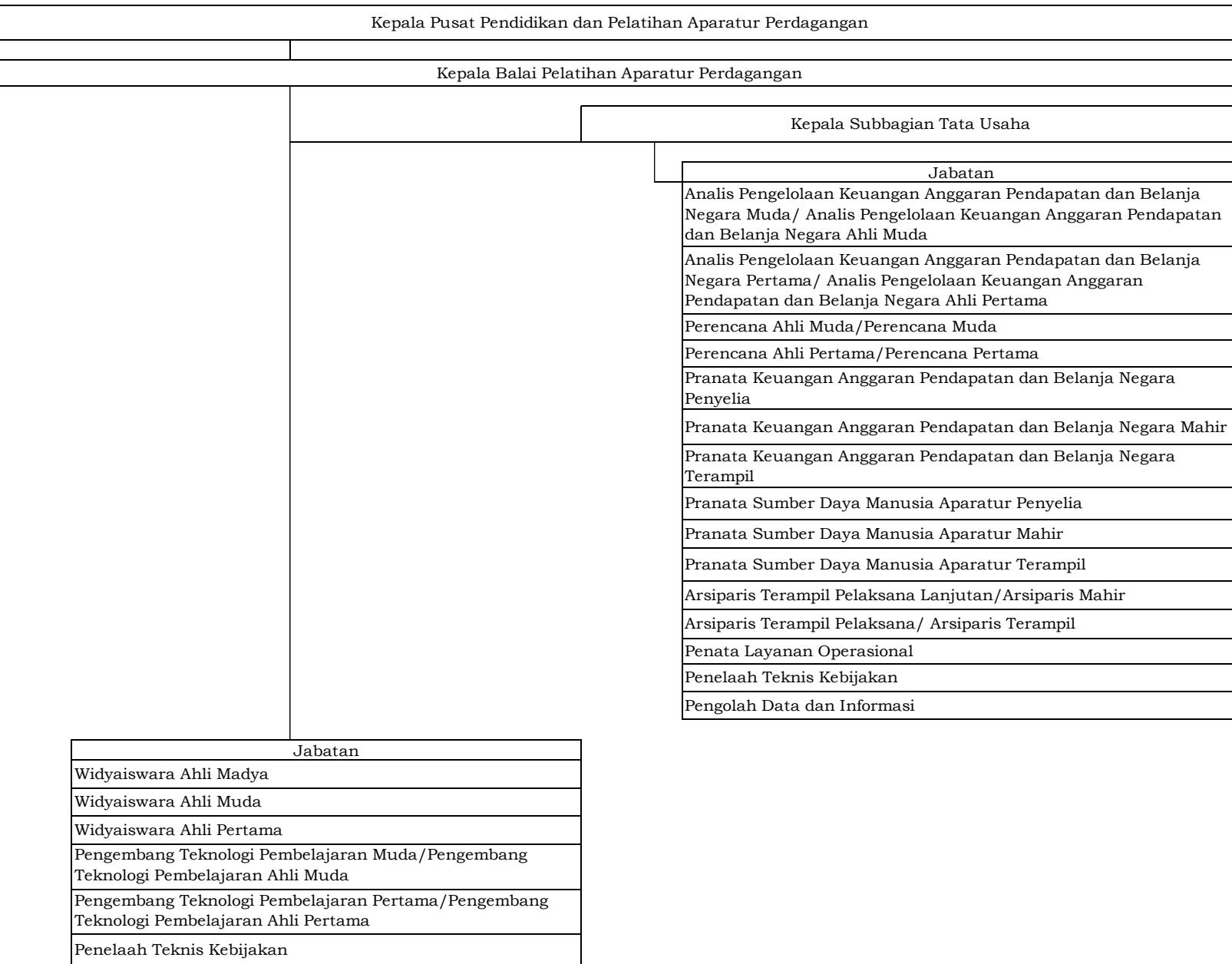
## I. PETA JABATAN BALAI PELATIHAN APARATUR METROLOGI DAN MUTU



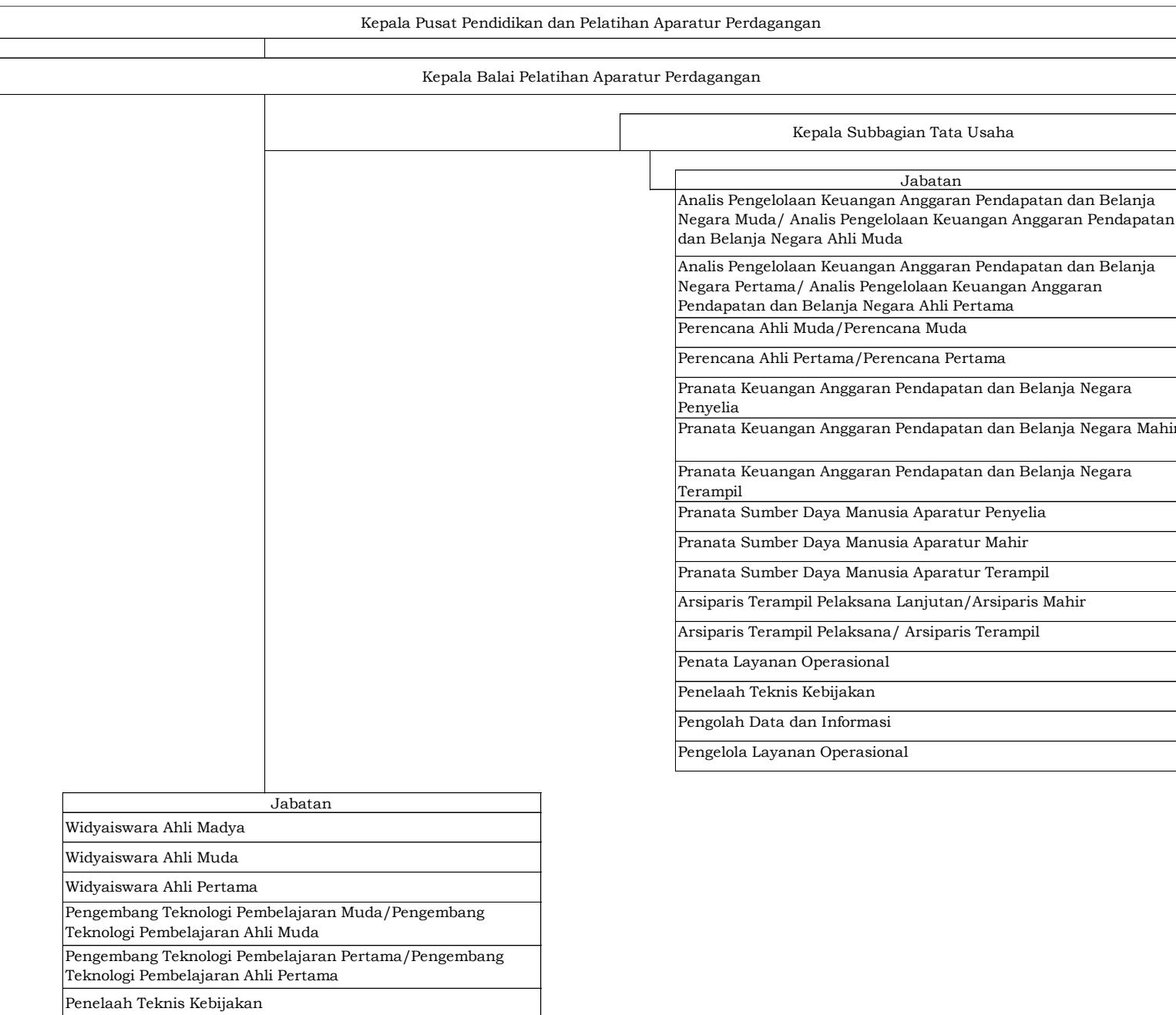
J. PETA JABATAN BALAI PELATIHAN APARATUR PERDAGANGAN PADANG



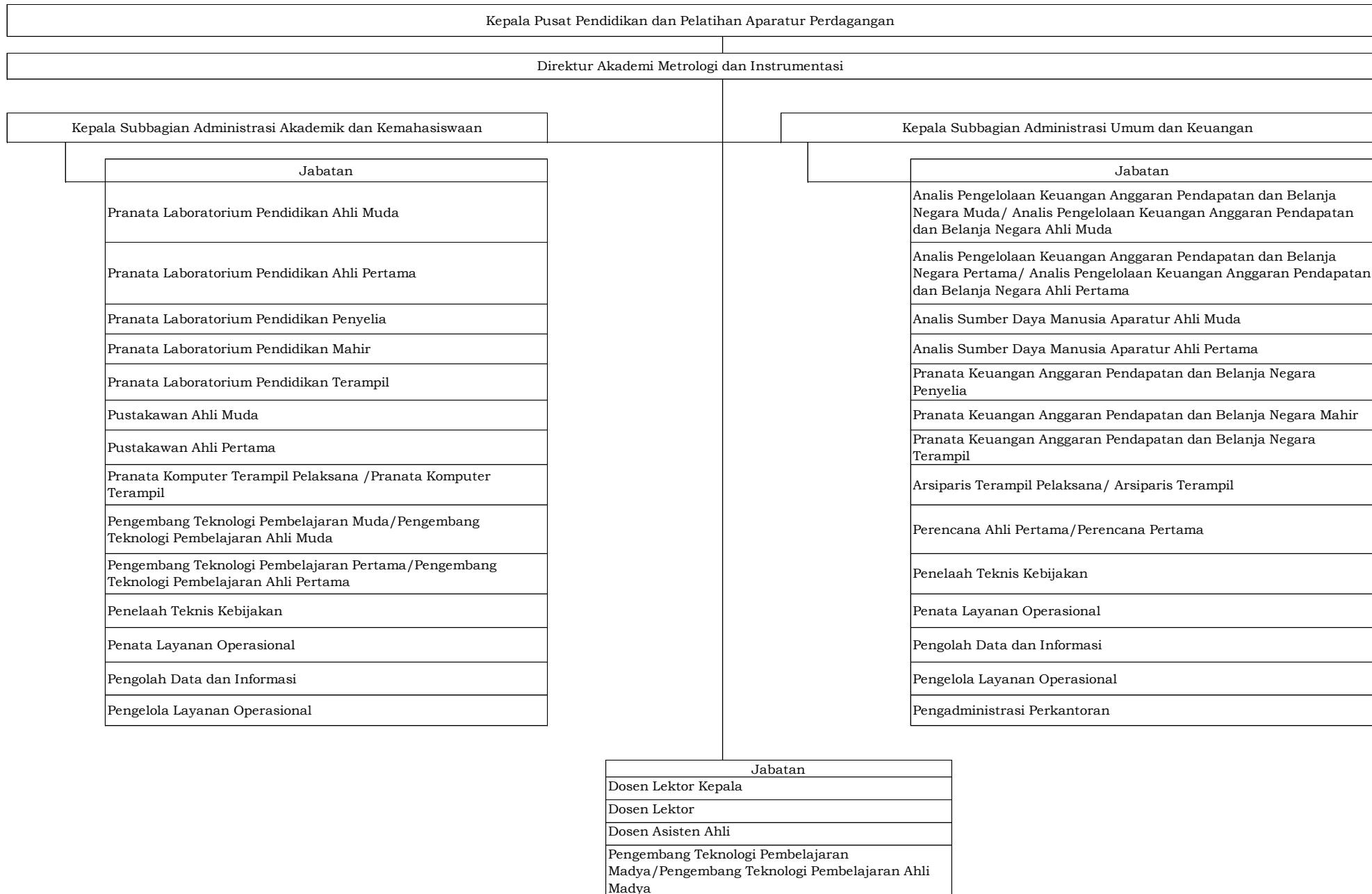
## K.PETA JABATAN BALAI PELATIHAN APARATUR PERDAGANGAN YOGYAKARTA



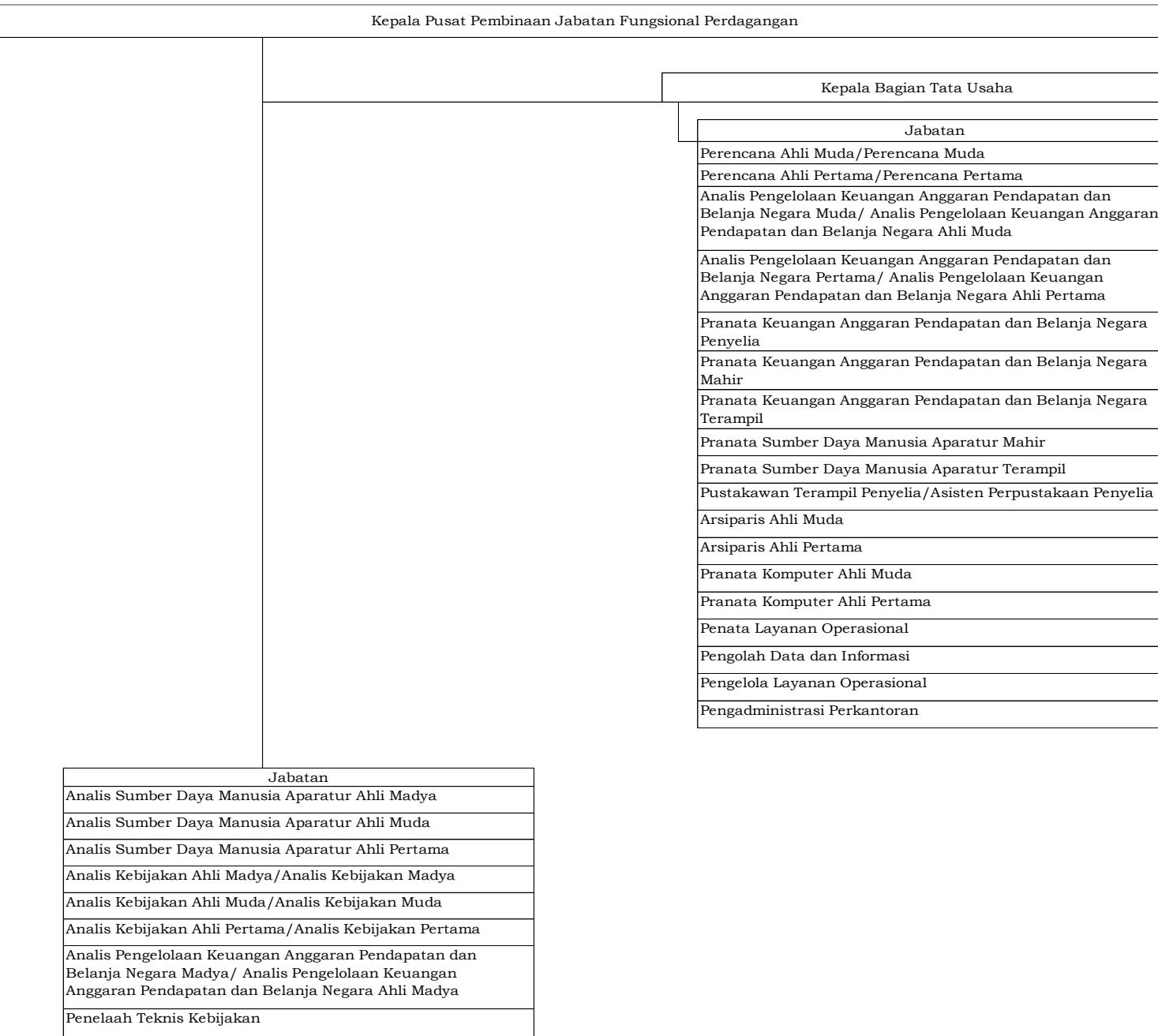
## L. PETA JABATAN BALAI PELATIHAN APARATUR PERDAGANGAN MAKASSAR



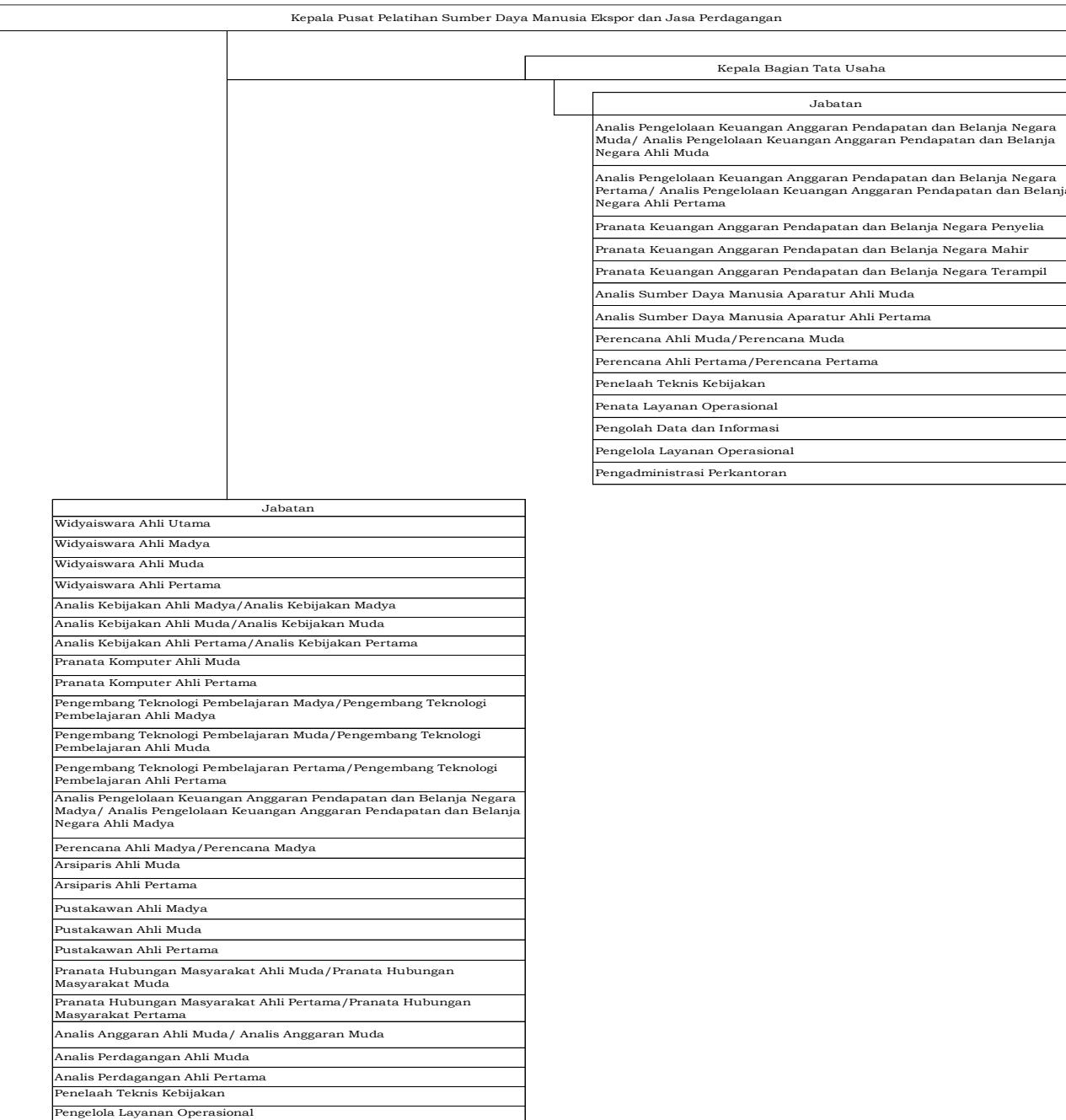
## M. PETA JABATAN AKADEMI METROLOGI DAN INSTRUMENTASI



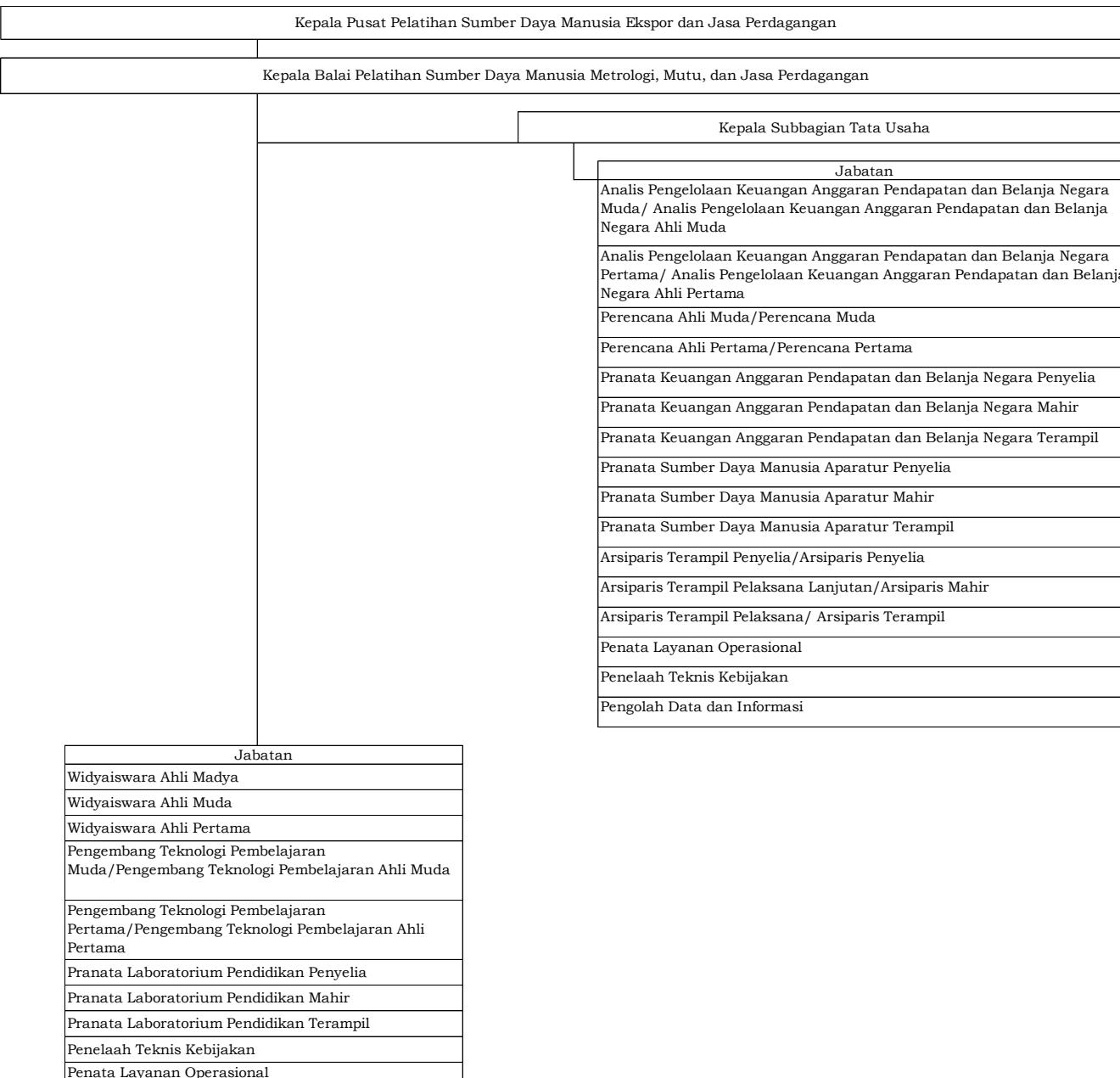
## O. PETA JABATAN PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PERDAGANGAN



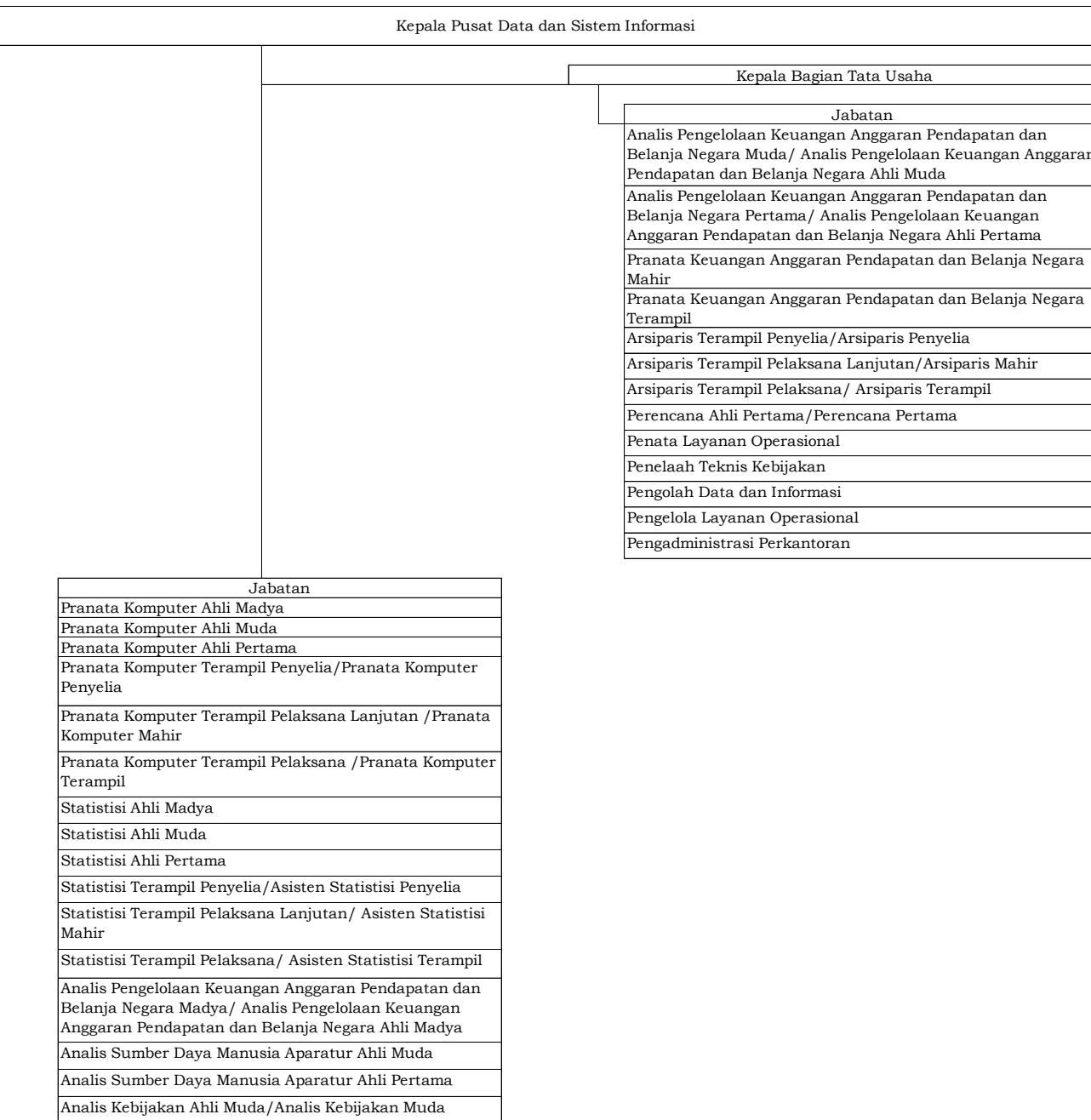
P. PETA JABATAN PUSAT PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA EKSPOR DAN JASA PERDAGANGAN



Q. PETA JABATAN BALAI PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA METROLOGI, MUTU, DAN JASA PERDAGANGAN

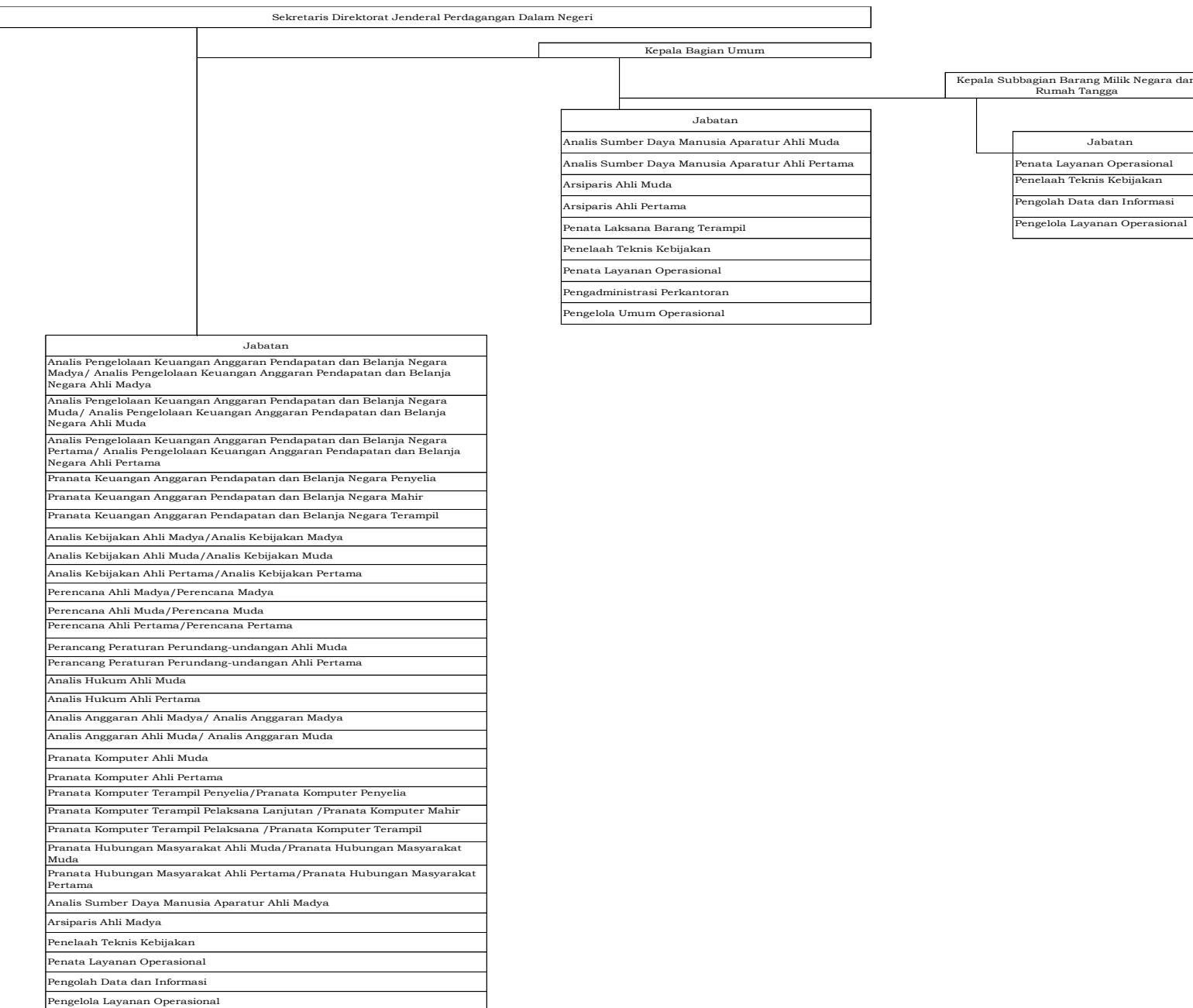


## R. PETA JABATAN PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI

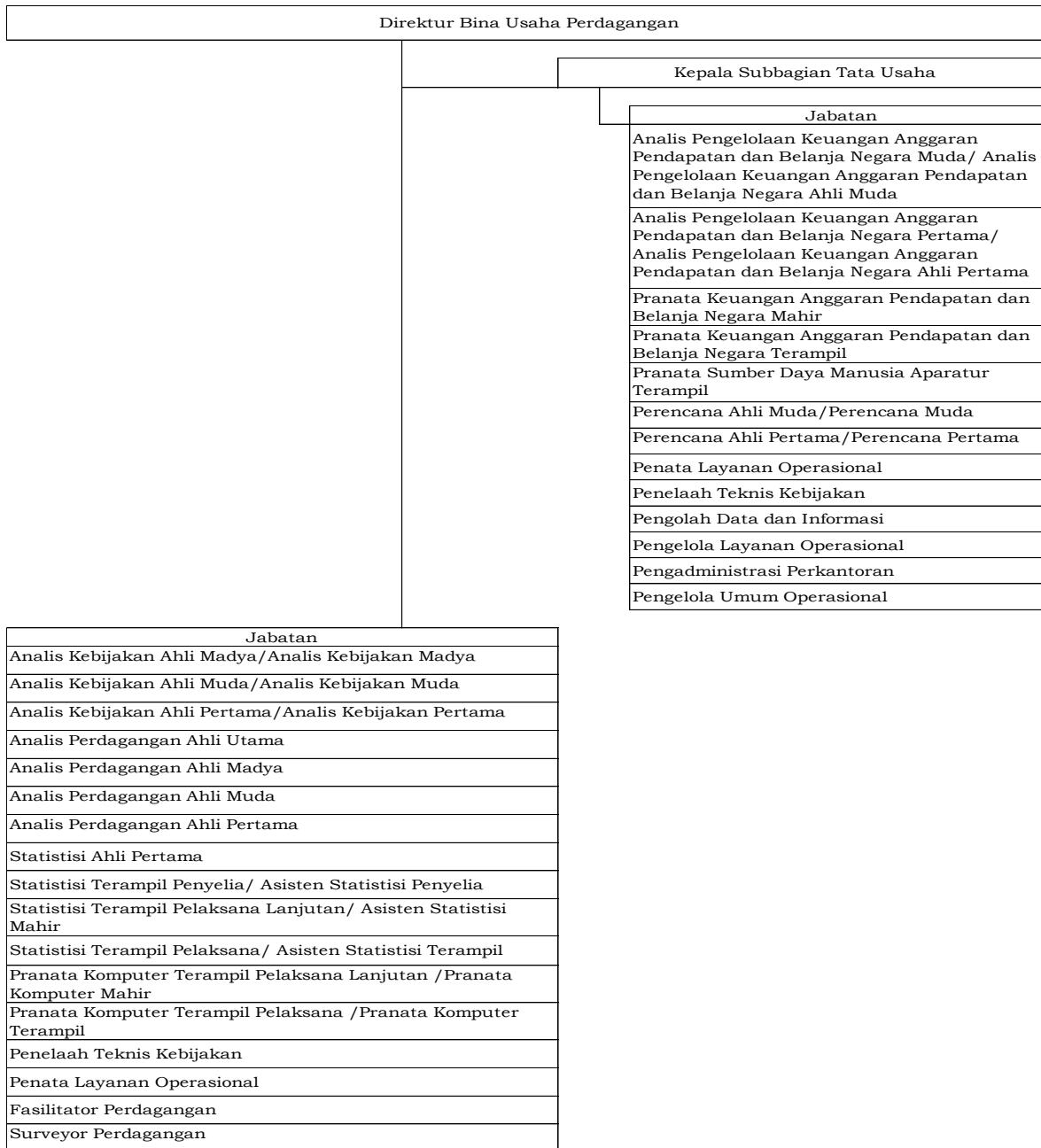


## II. PETA JABATAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI

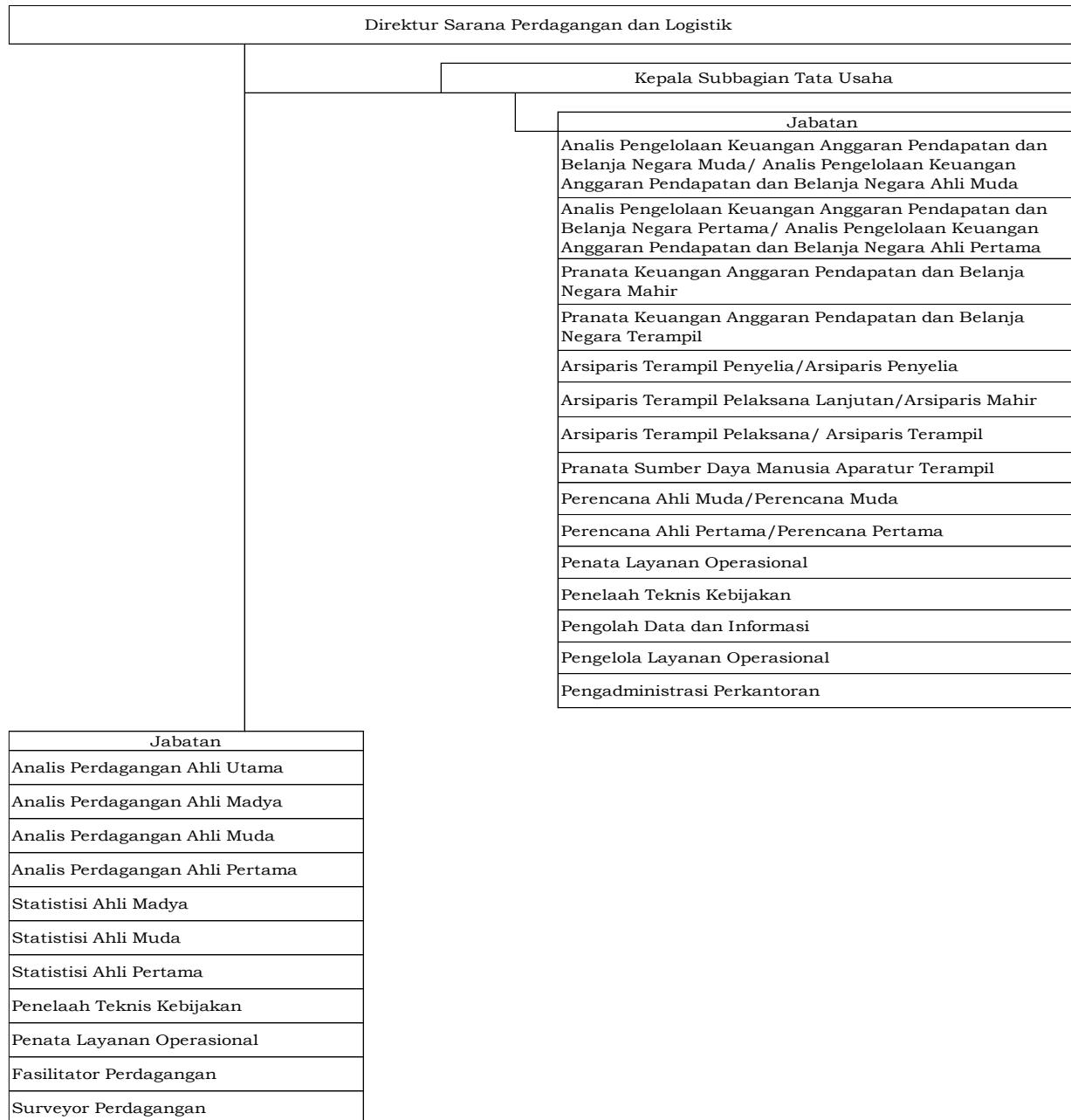
### A. PETA JABATAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI



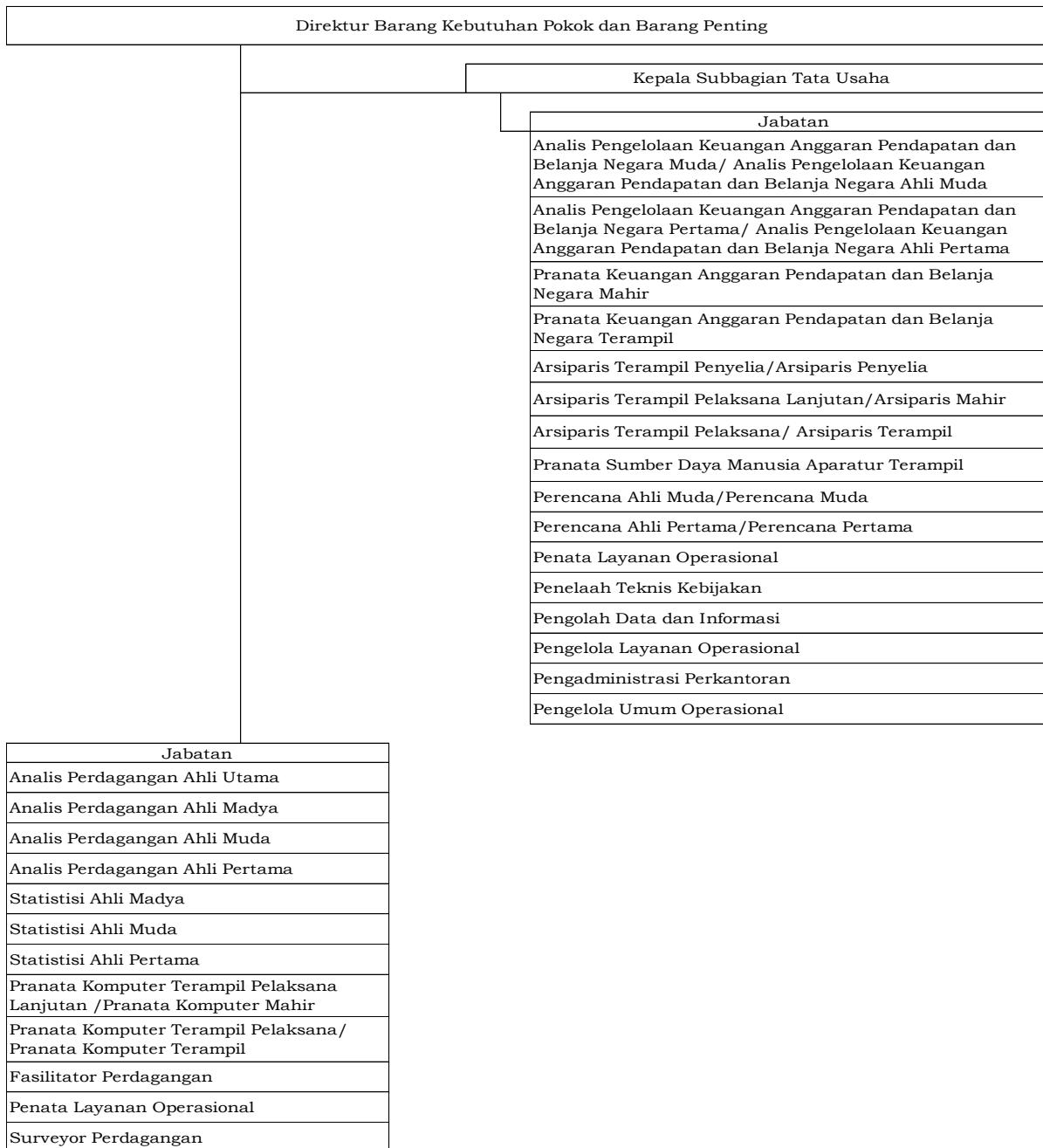
B. PETA JABATAN DIREKTORAT BINA USAHA PERDAGANGAN



### C. PETA JABATAN DIREKTORAT SARANA PERDAGANGAN DAN LOGISTIK



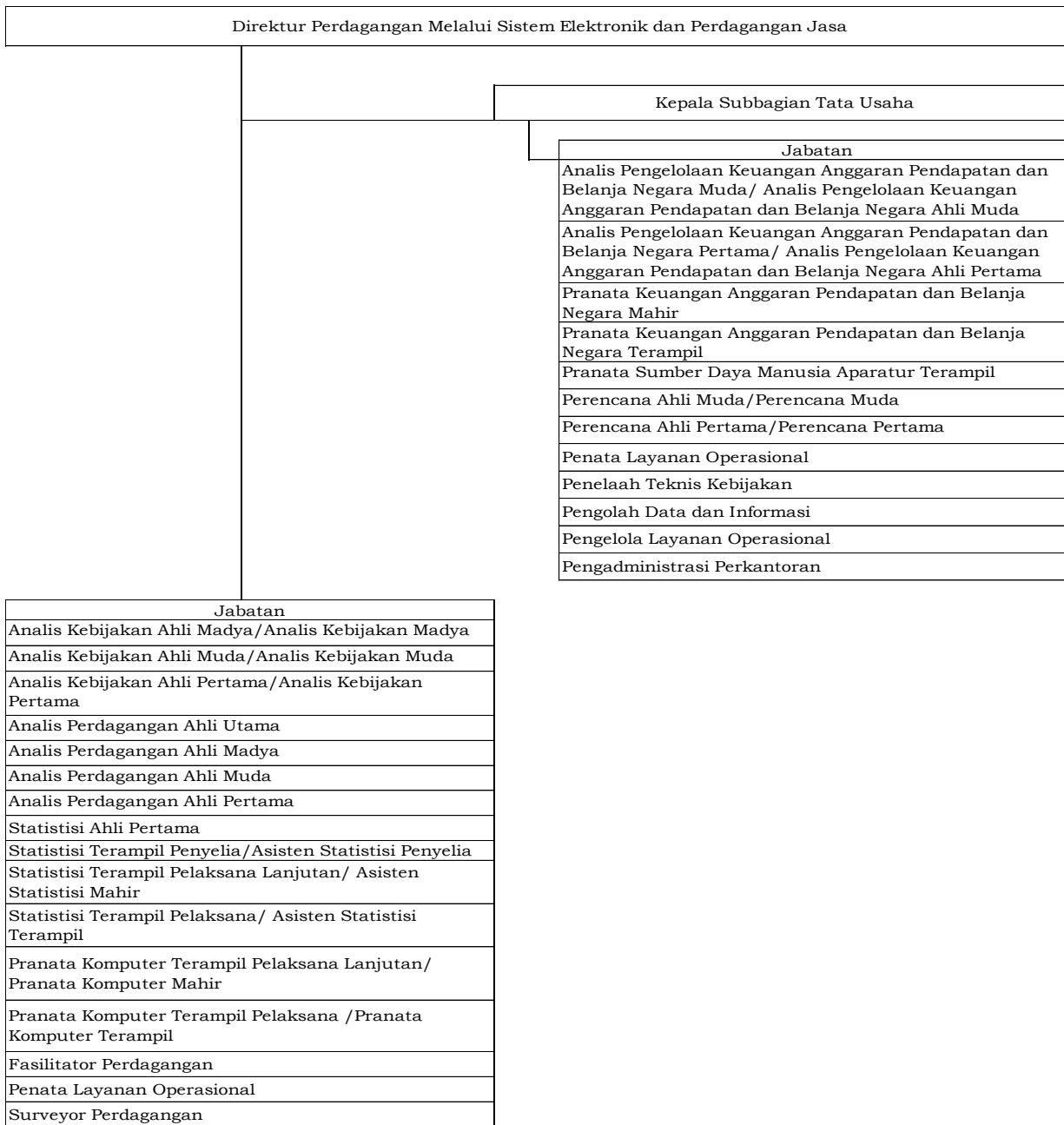
#### D. PETA JABATAN DIREKTORAT BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING



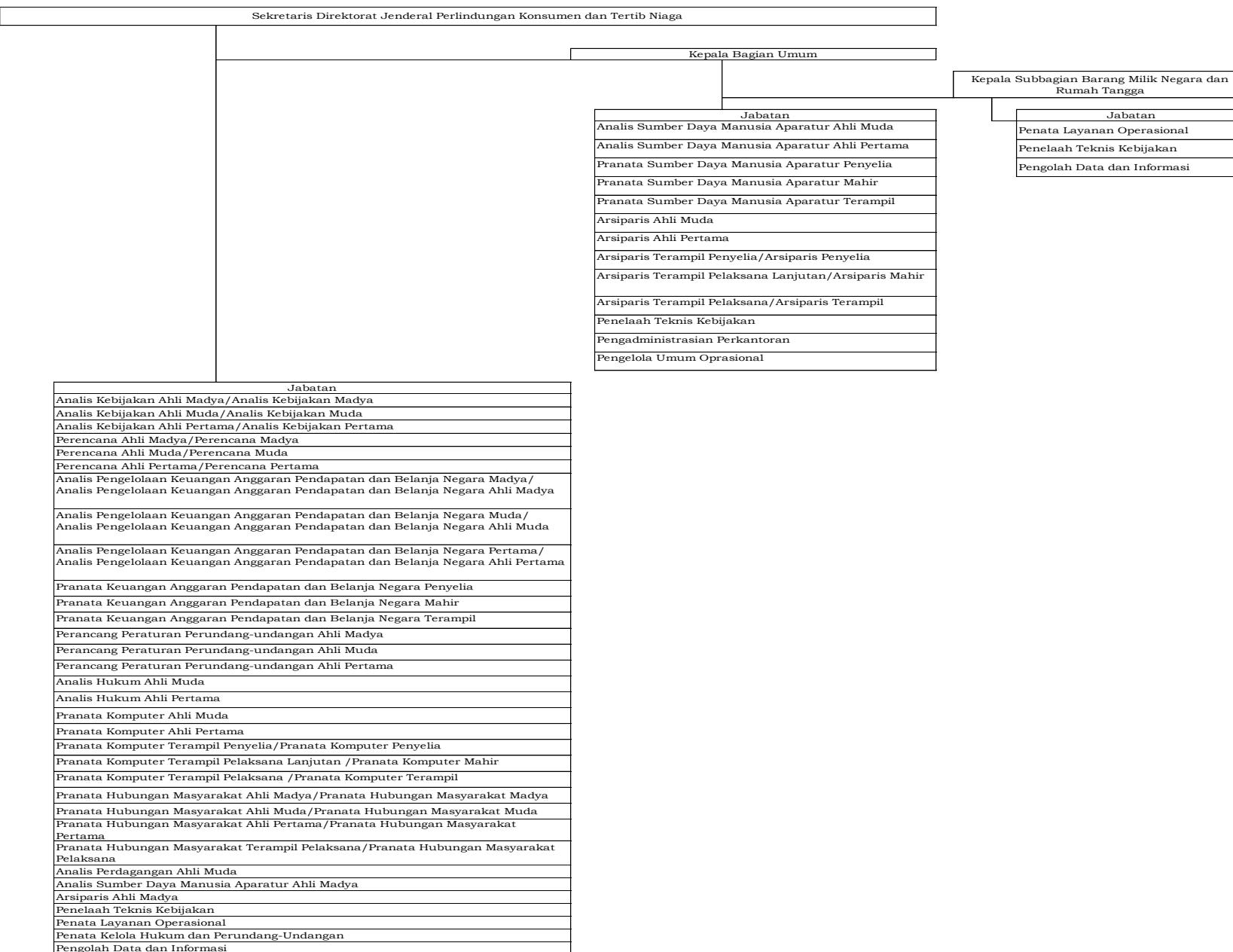
## E. PETA JABATAN DIREKTORAT PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI

	Direktur Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
	Kepala Subbagian Tata Usaha
	Jabatan
	Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Muda/ Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Muda
	Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pertama/ Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama
	Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Mahir
	Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Terampil
	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil
	Perencana Ahli Muda/Perencana Muda
	Perencana Ahli Pertama/Perencana Pertama
	Arsiparis Terampil Pelaksana Lanjutan/Arsiparis Mahir
	Arsiparis Terampil Pelaksana / Arsiparis Terampil
	Penata Layanan Operasional
	Penelaah Teknis Kebijakan
	Pengolah Data dan Informasi
	Pengelola Layanan Operasional
	Pengadministrasi Perkantoran
	Jabatan
	Analis Perdagangan Ahli Utama
	Analis Perdagangan Ahli Madya
	Analis Perdagangan Ahli Muda
	Analis Perdagangan Ahli Pertama
	Analis Kebijakan Ahli Madya/Analis Kebijakan Madya
	Analis Kebijakan Ahli Muda/Analis Kebijakan Muda
	Analis Kebijakan Ahli Pertama/Analis Kebijakan Pertama
	Statistisi Ahli Pertama
	Statistisi Terampil Penyelia/Asisten Statistisi Penyelia
	Statistisi Terampil Pelaksana Lanjutan/ Asisten Statistisi Mahir
	Statistisi Terampil Pelaksana/ Asisten Statistisi Terampil
	Pranata Komputer Ahli Madya
	Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Madya/ Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Madya
	Penelaah Teknis Kebijakan
	Penata Layanan Operasional
	Fasilitator Perdagangan
	Surveyor Perdagangan

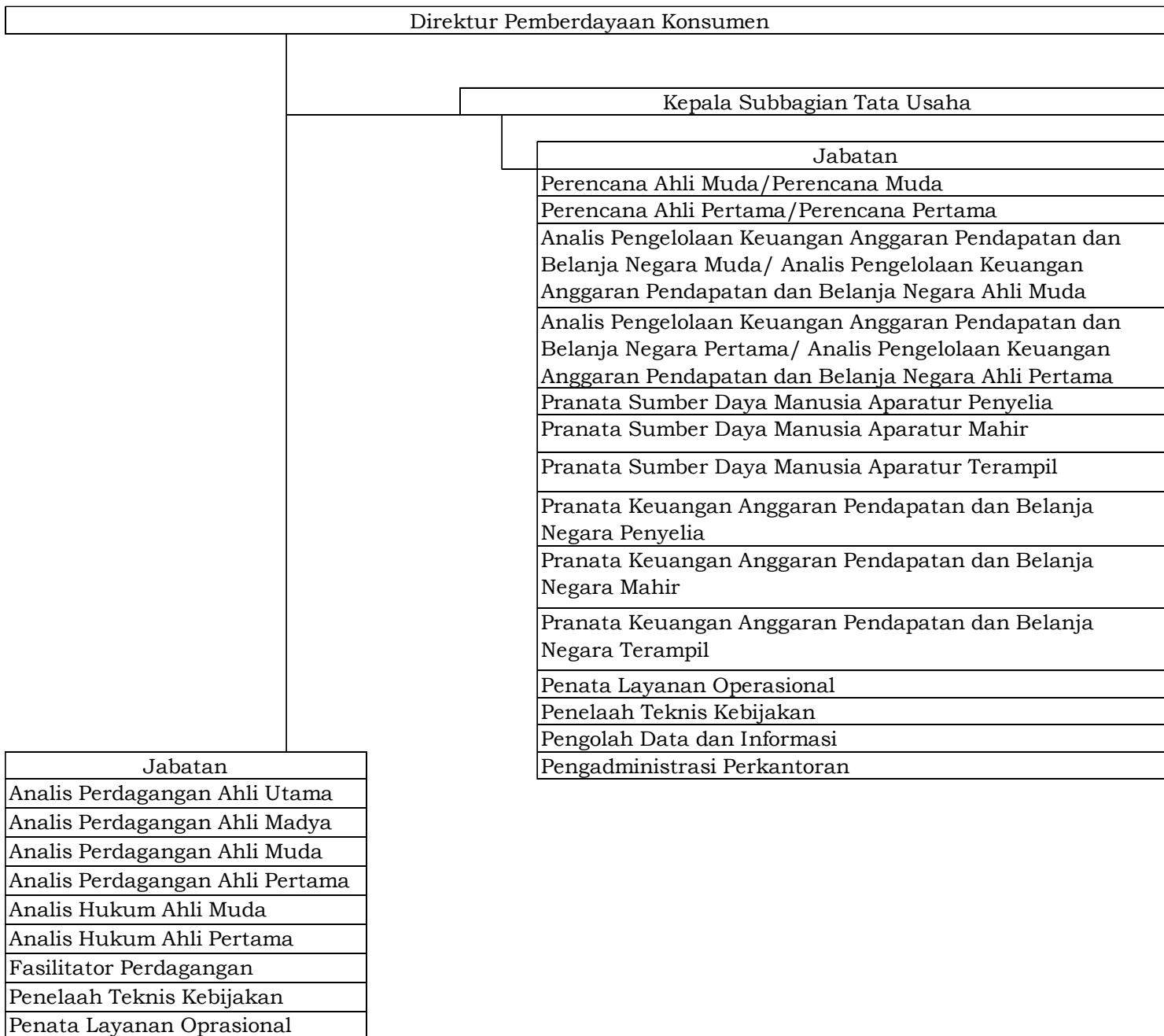
## F. PETA JABATAN DIREKTORAT PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK DAN PERDAGANGAN JASA



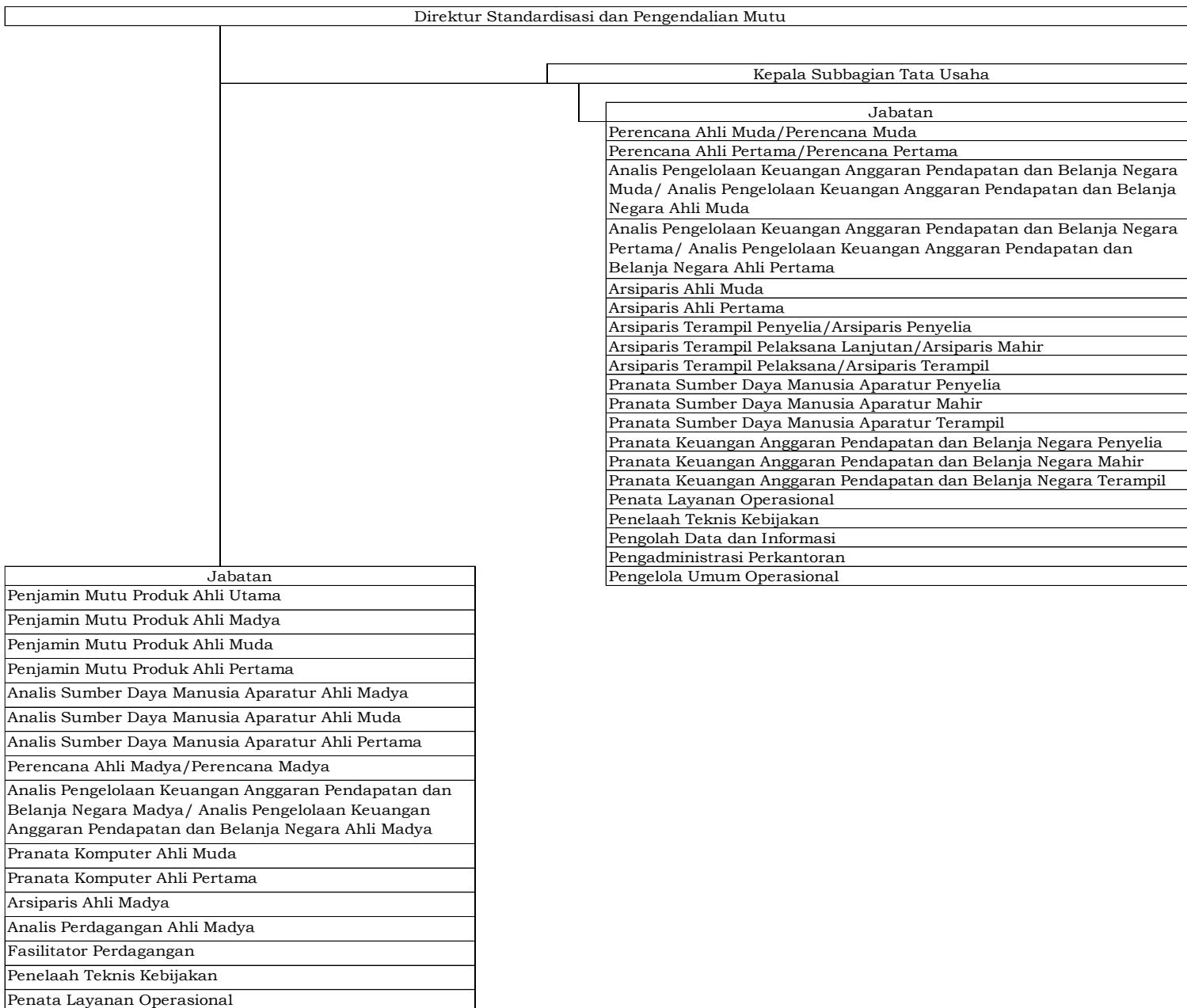
III. PETA JABATAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA  
A. PETA JABATAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA



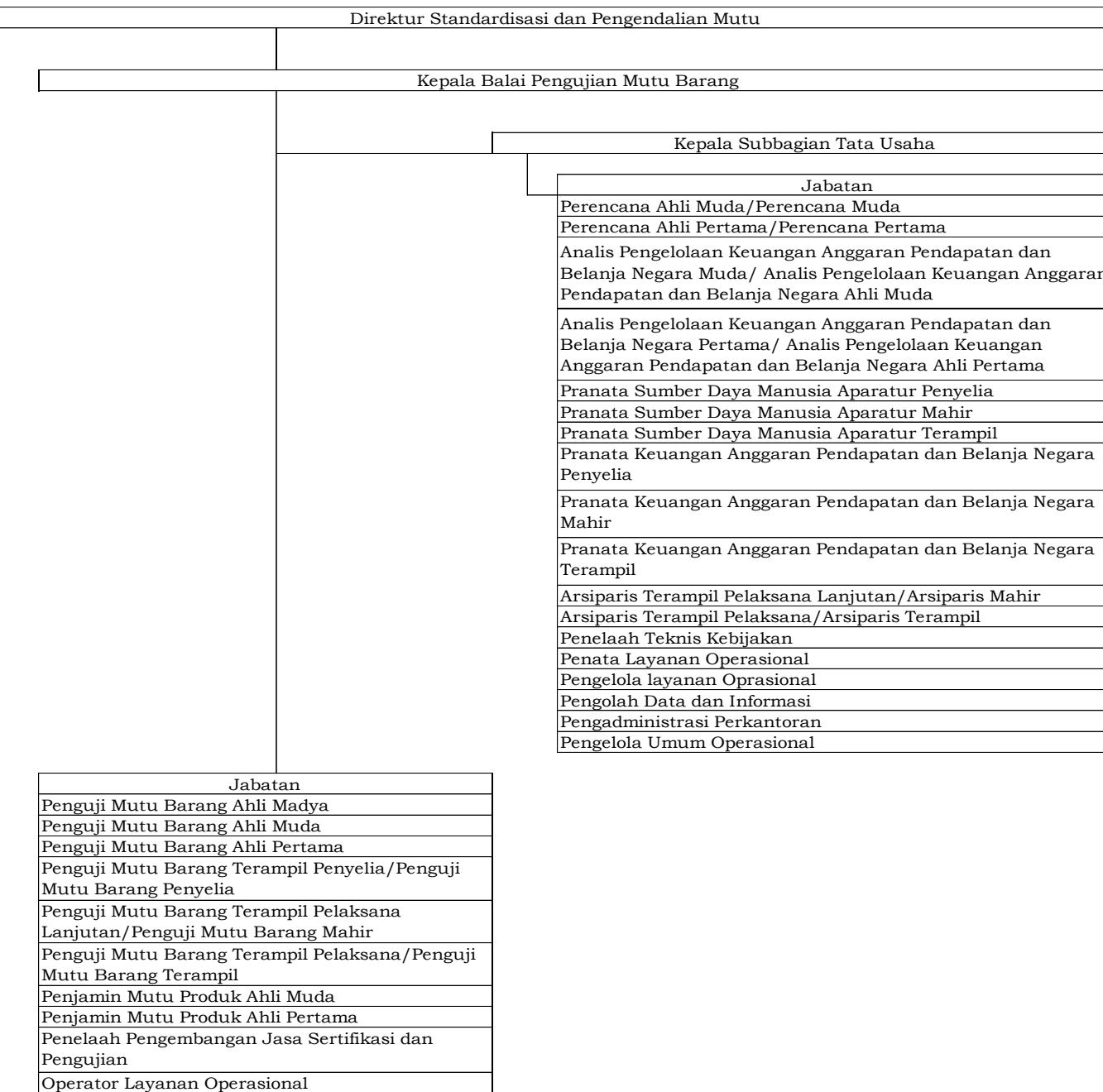
B. PETA JABATAN DIREKTORAT PEMBERDAYAAN KONSUMEN



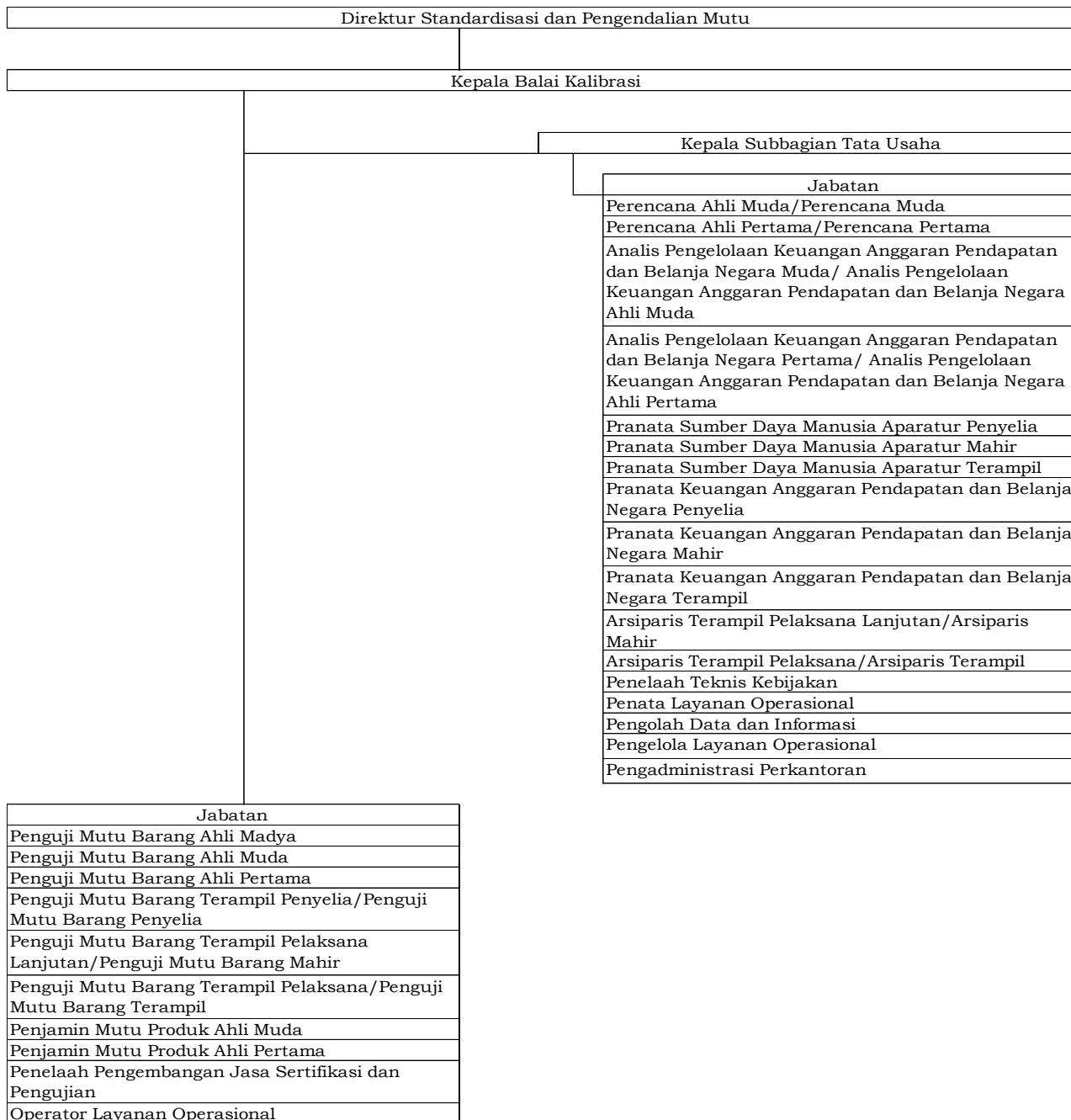
C. PETA JABATAN DIREKTORAT STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU



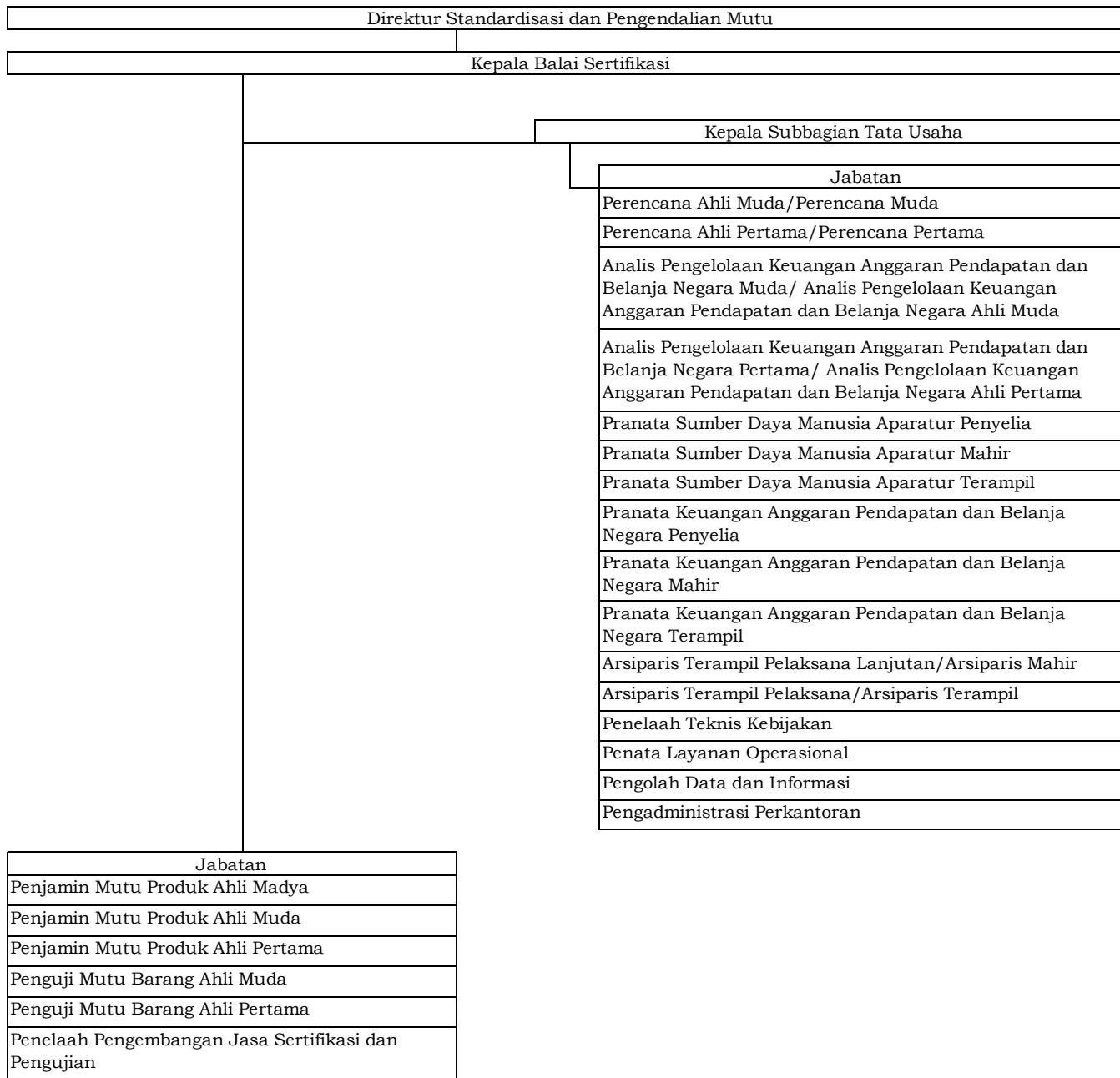
#### D. PETA JABATAN BALAI PENGUJIAN MUTU BARANG



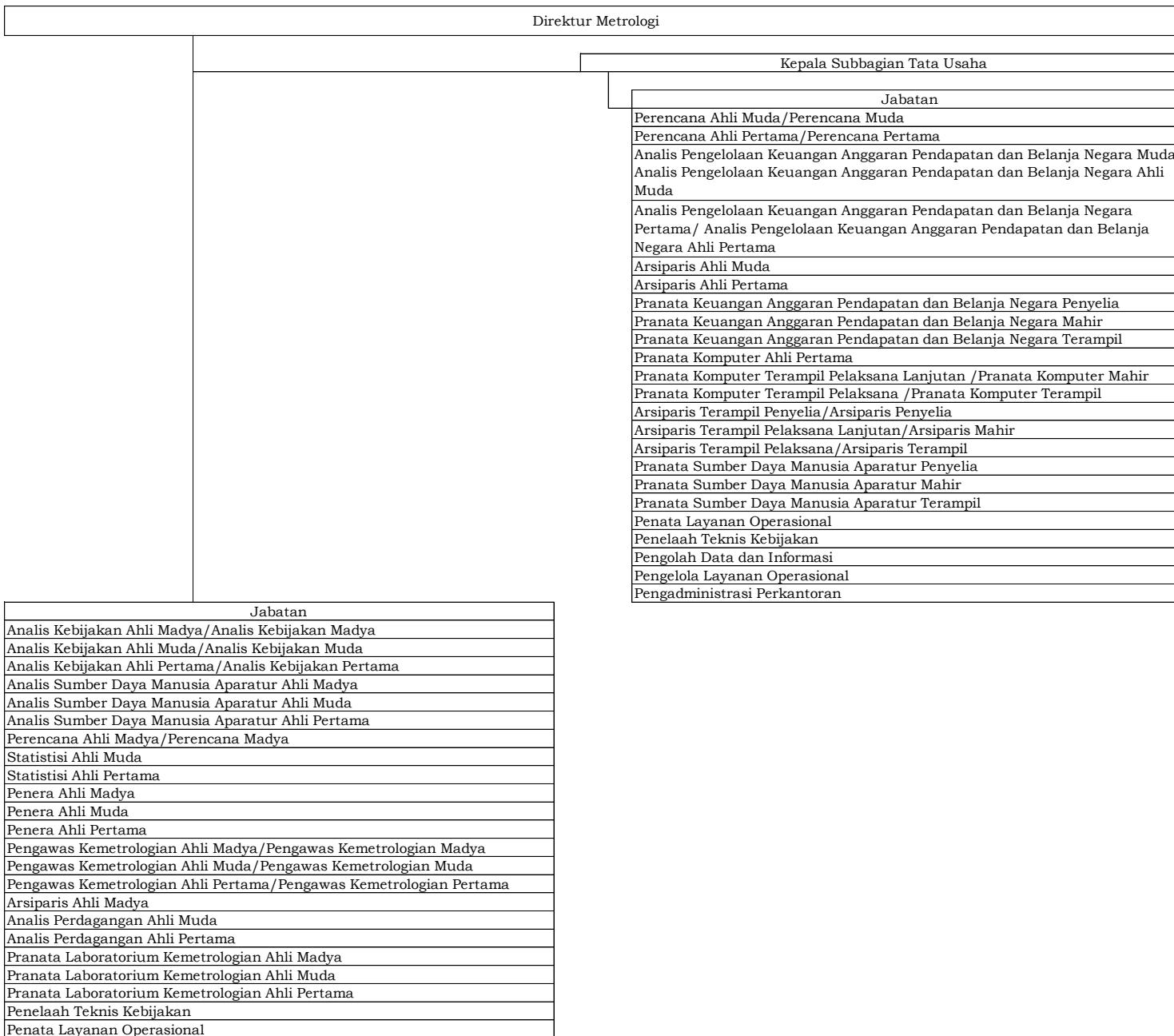
## E. PETA JABATAN BALAI KALIBRASI



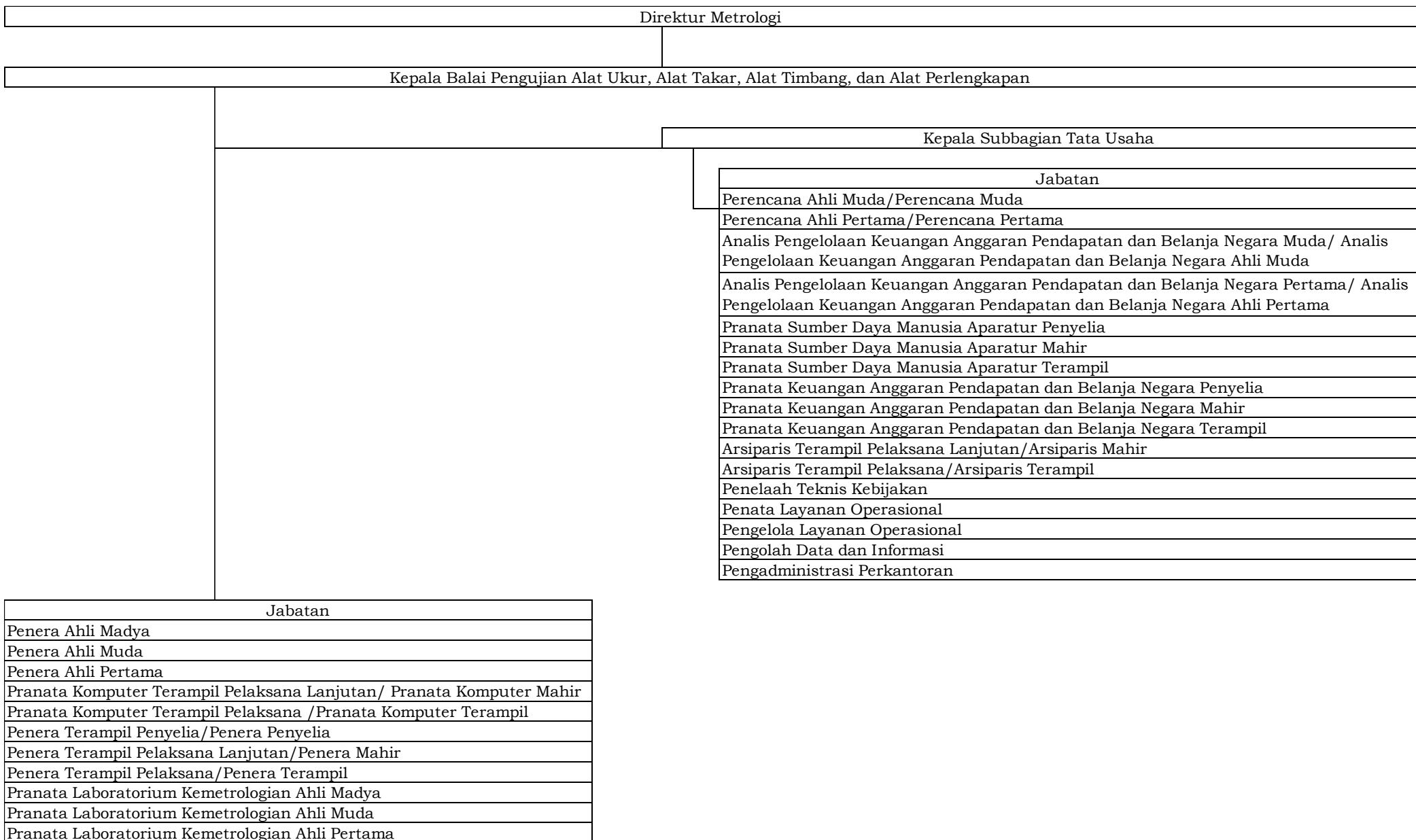
F. PETA JABATAN BALAI SERTIFIKASI



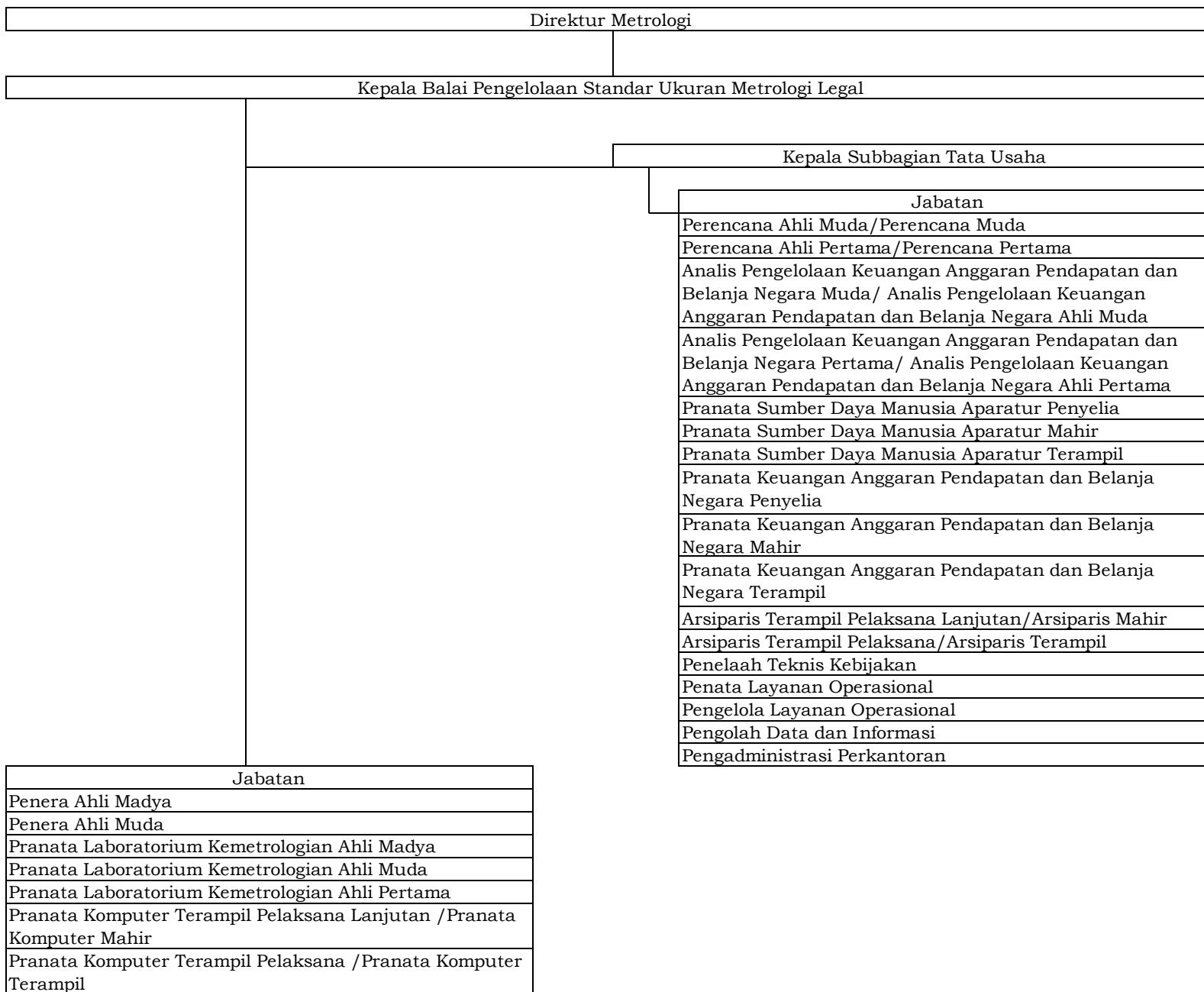
## G. PETA JABATAN DIREKTORAT METROLOGI



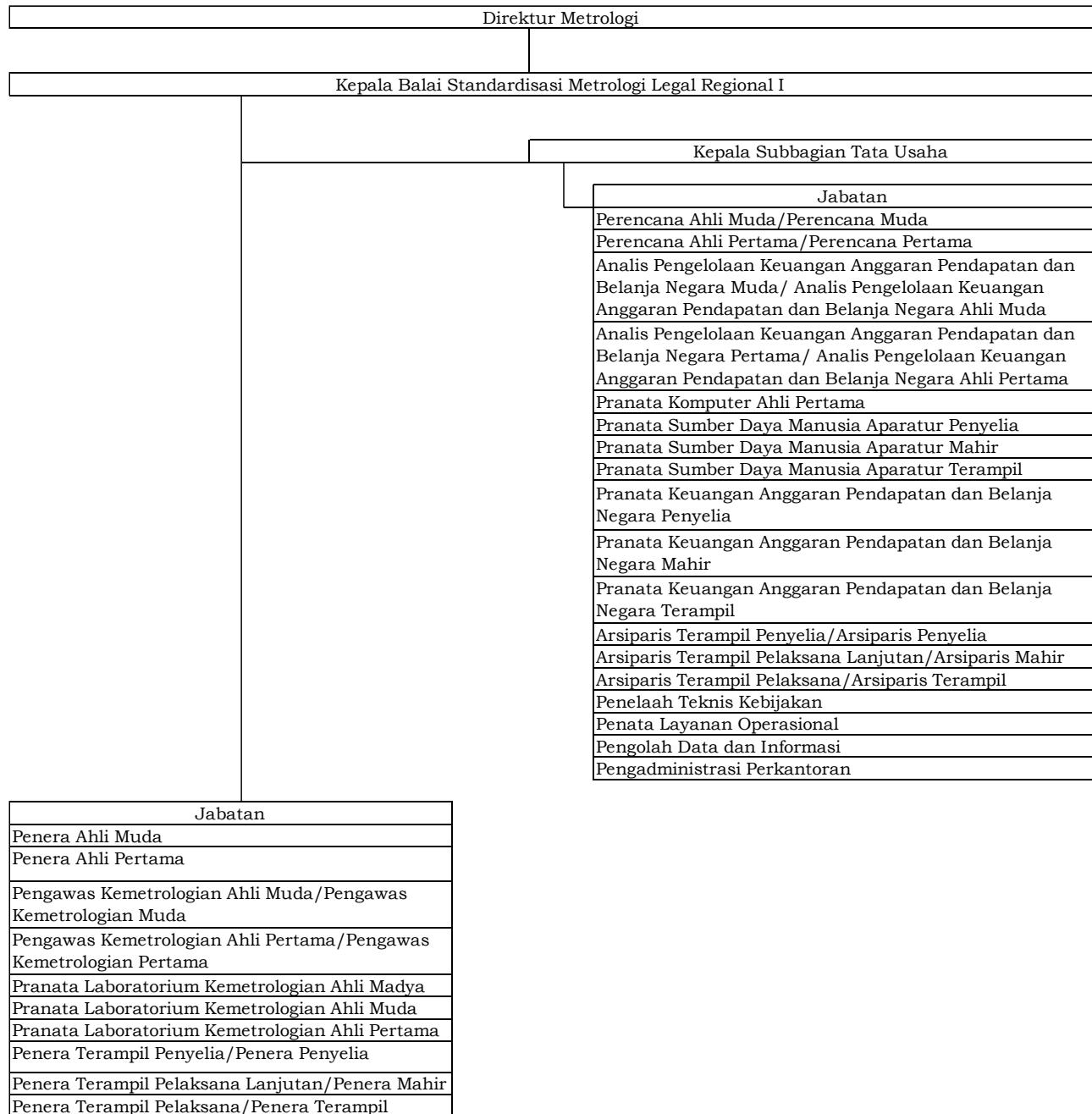
H. PETA JABATAN BALAI PENGUJIAN ALAT UKUR, ALAT TAKAR, ALAT TIMBANG, DAN ALAT PERLENGKAPAN



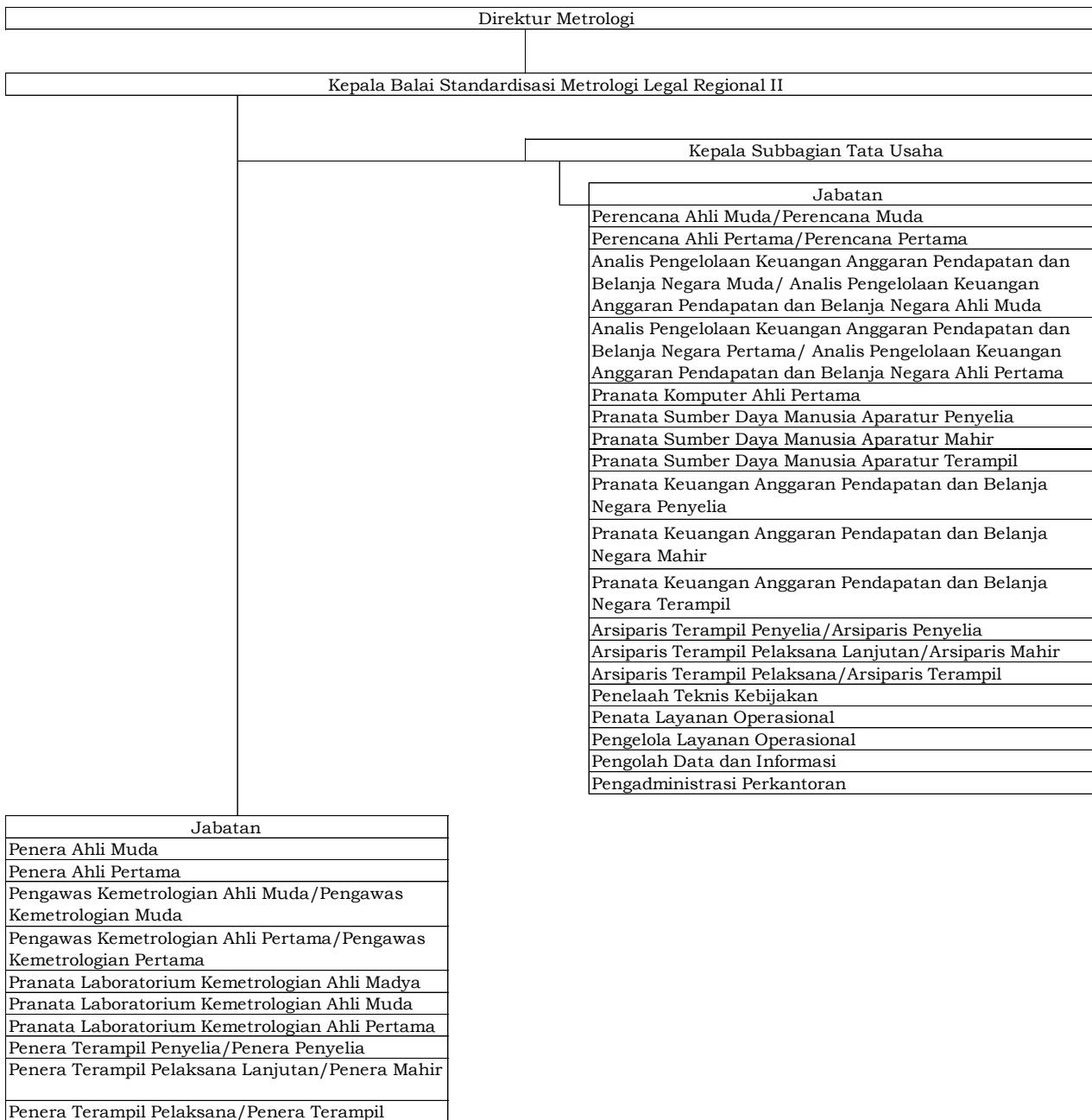
I. PETA JABATAN BALAI PENGELOLAAN STANDAR UKURAN METROLOGI LEGAL



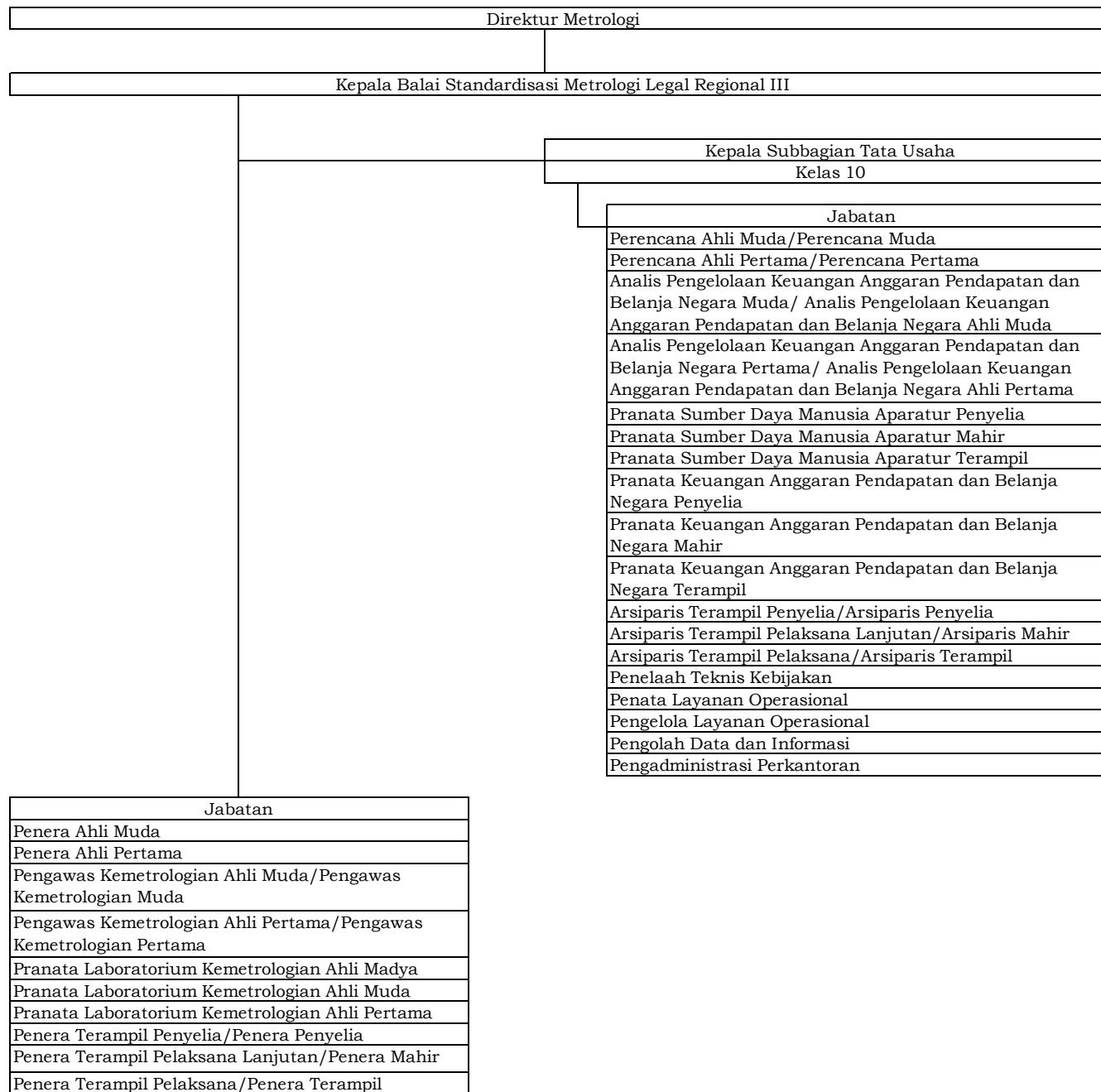
J. PETA JABATAN BALAI STANDARDISASI METROLOGI LEGAL REGIONAL I



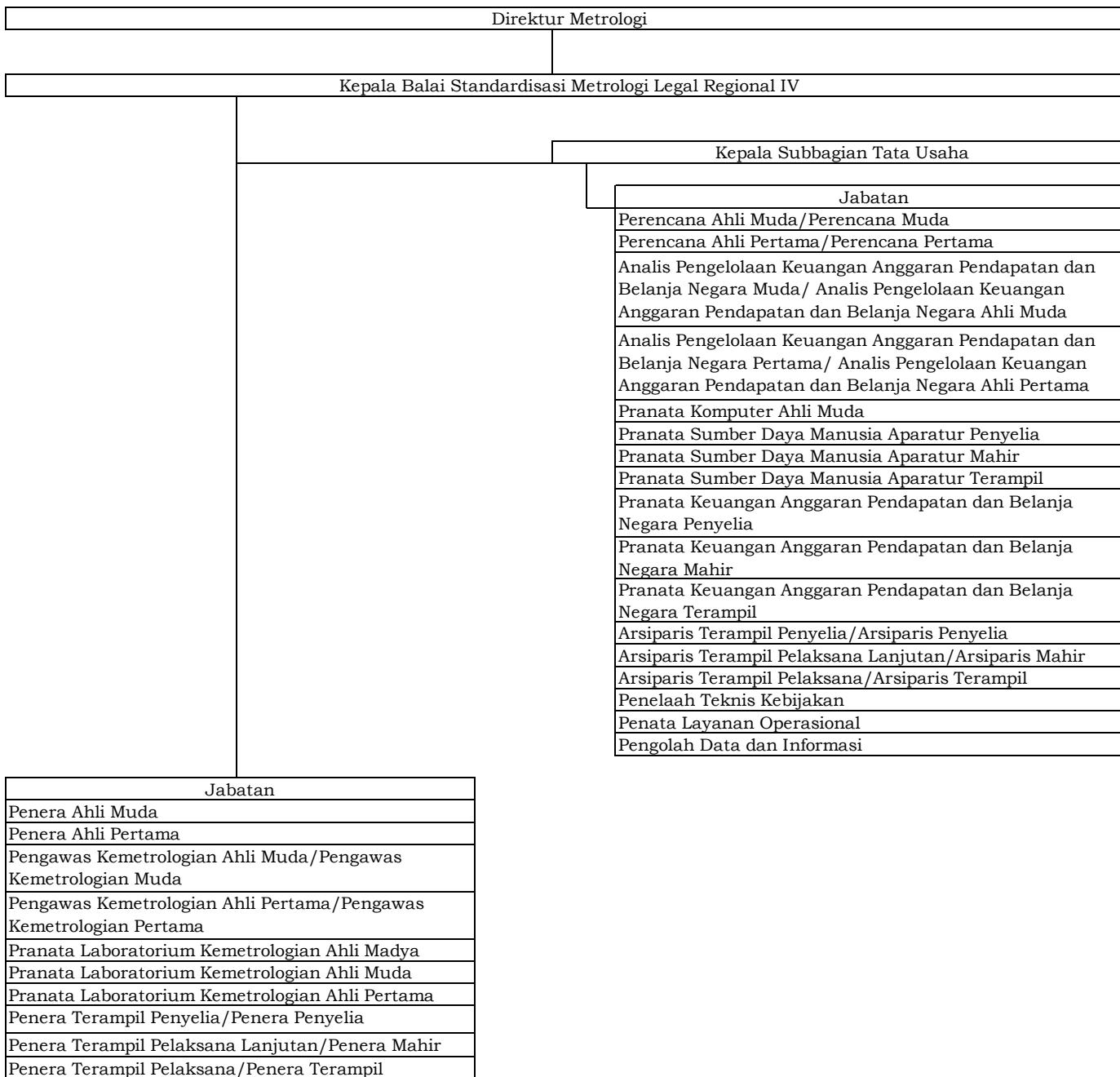
K. PETA JABATAN BALAI STANDARDISASI METROLOGI LEGAL REGIONAL II



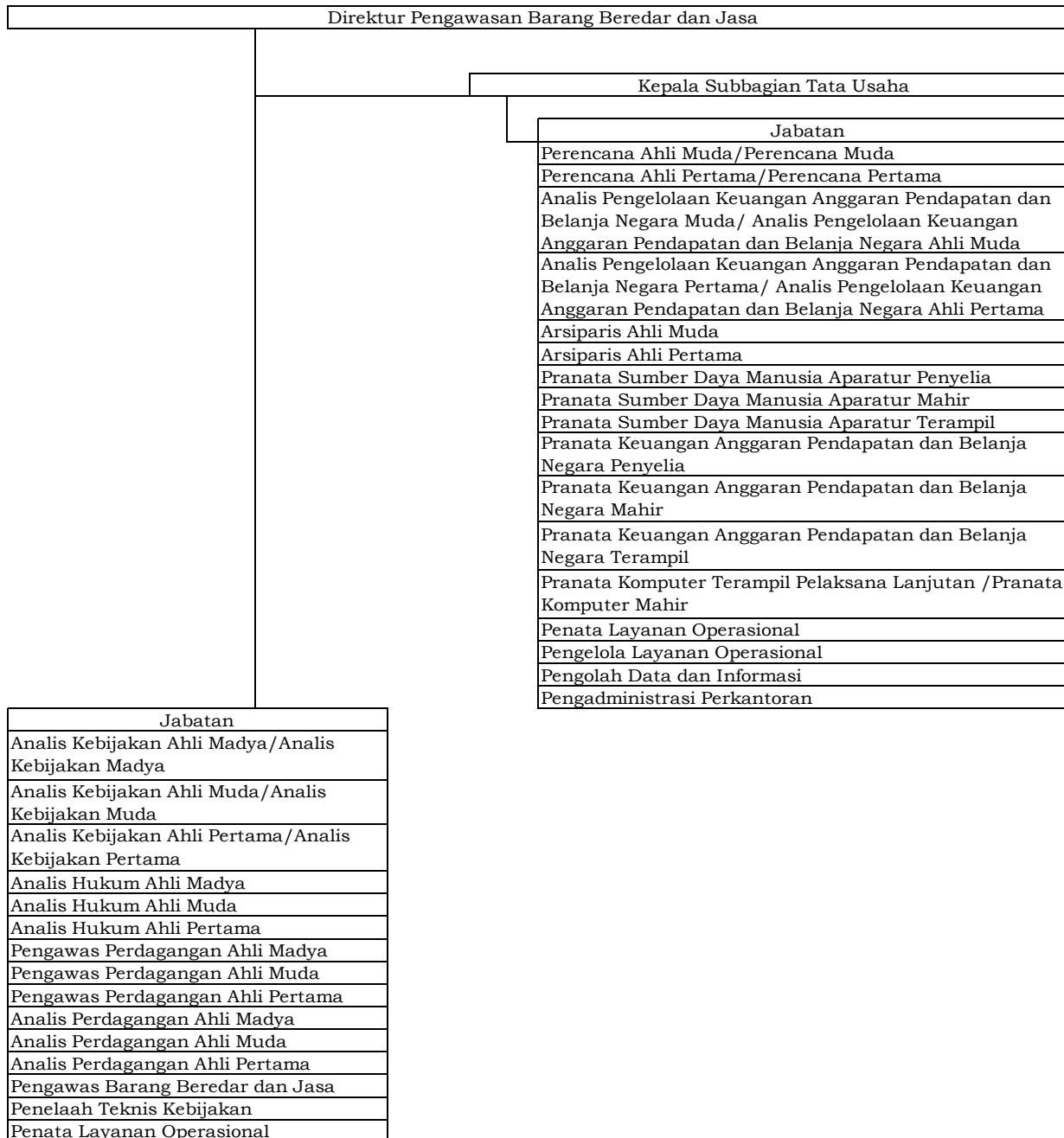
L. PETA JABATAN BALAI STANDARDISASI METROLOGI LEGAL REGIONAL III



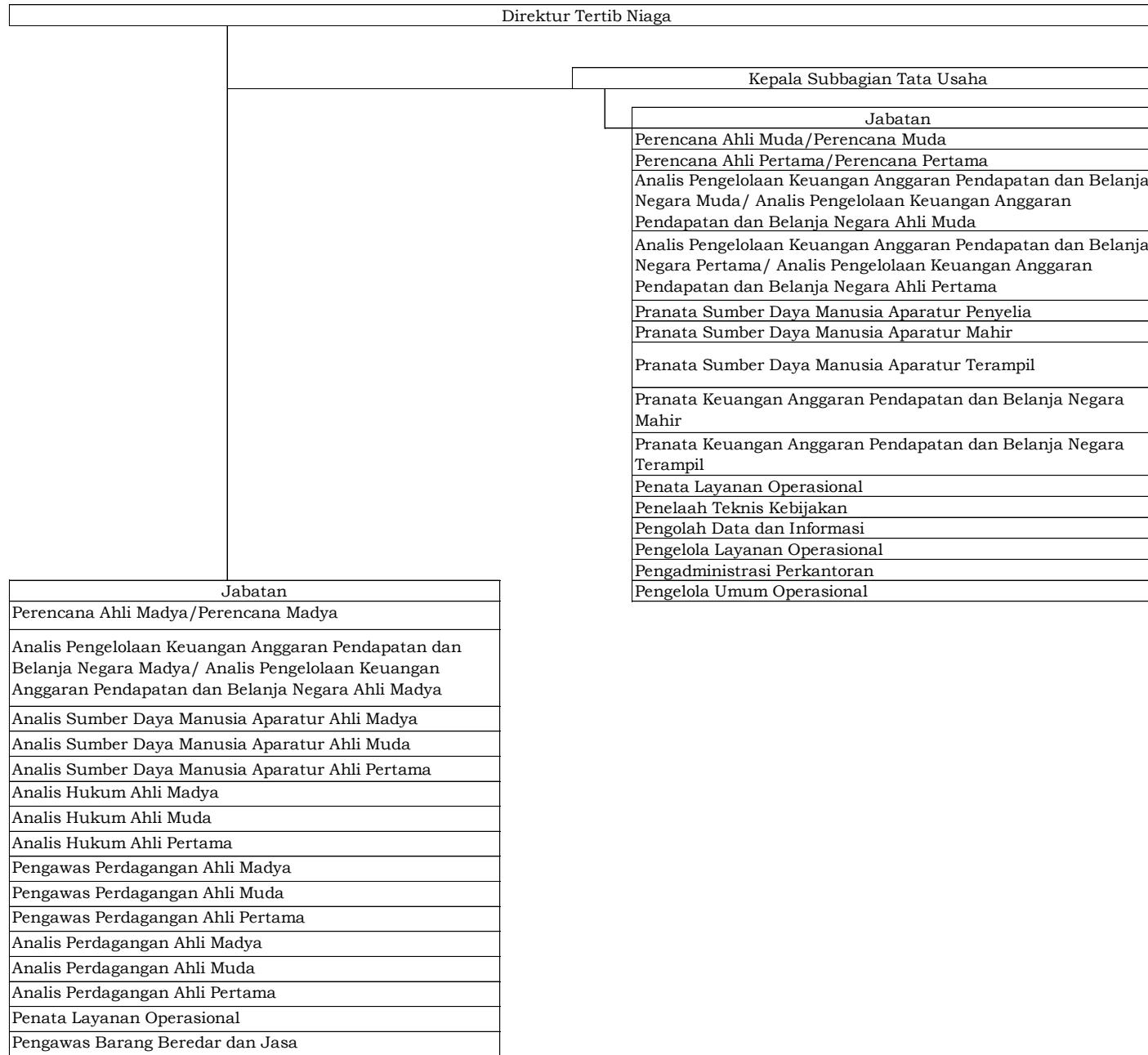
M. PETA JABATAN BALAI STANDARDISASI METROLOGI LEGAL REGIONAL IV



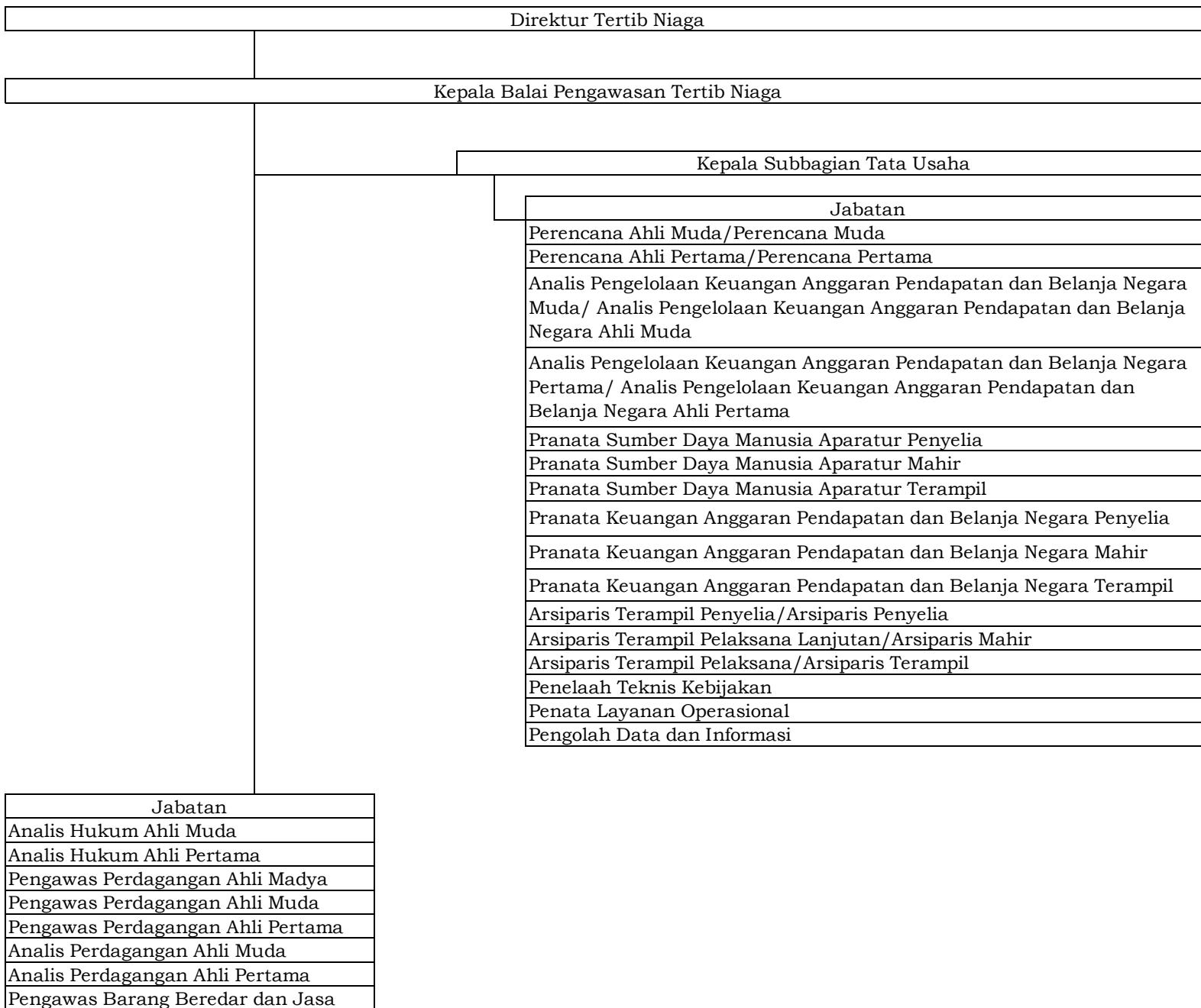
N. PETA JABATAN DIREKTORAT PENGAWASAN BARANG BEREDAR DAN JASA



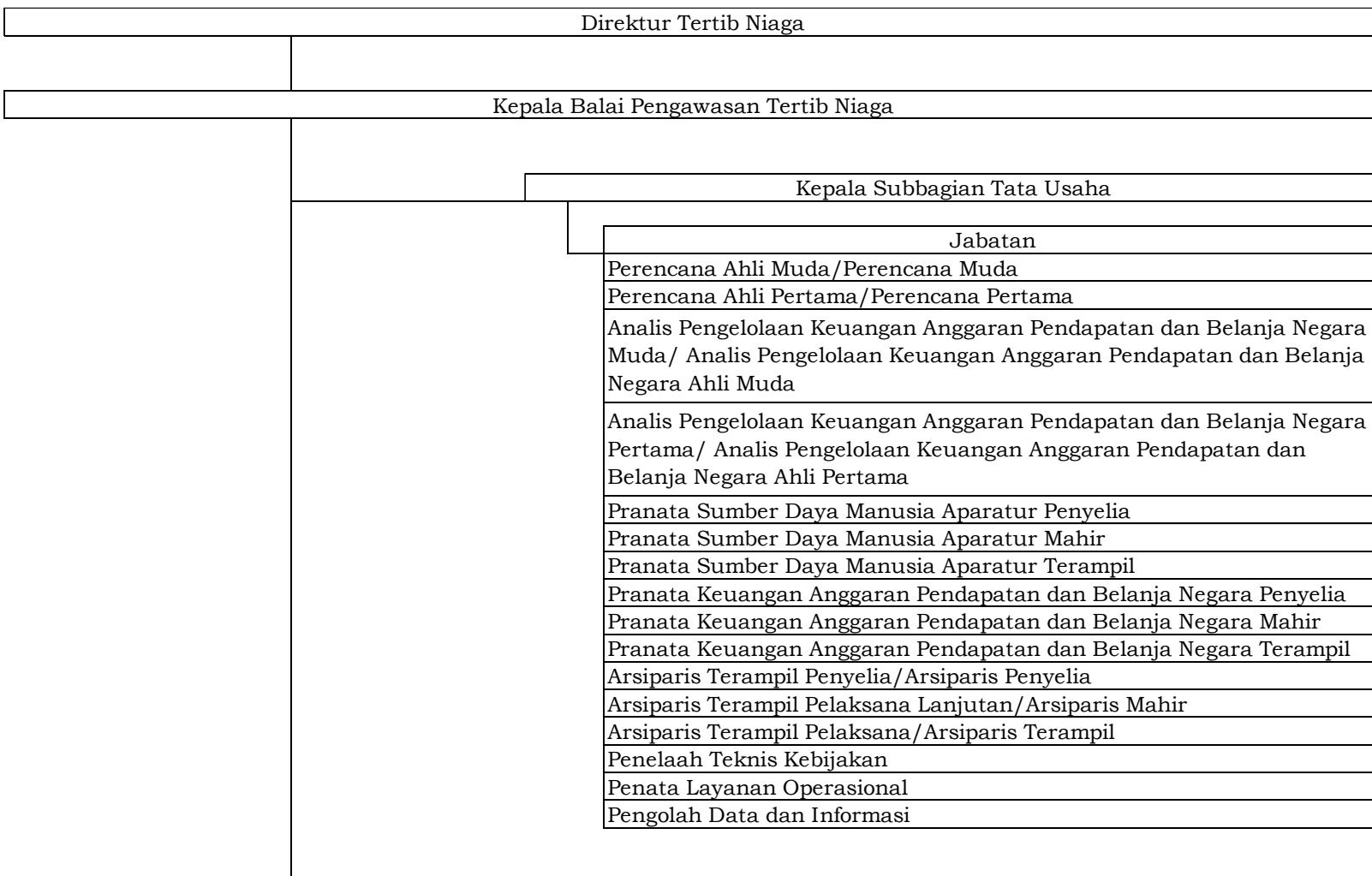
O. PETA JABATAN DIREKTORAT TERTIB NIAGA



P. PETA JABATAN BALAI PENGAWASAN TERTIB NIAGA MEDAN

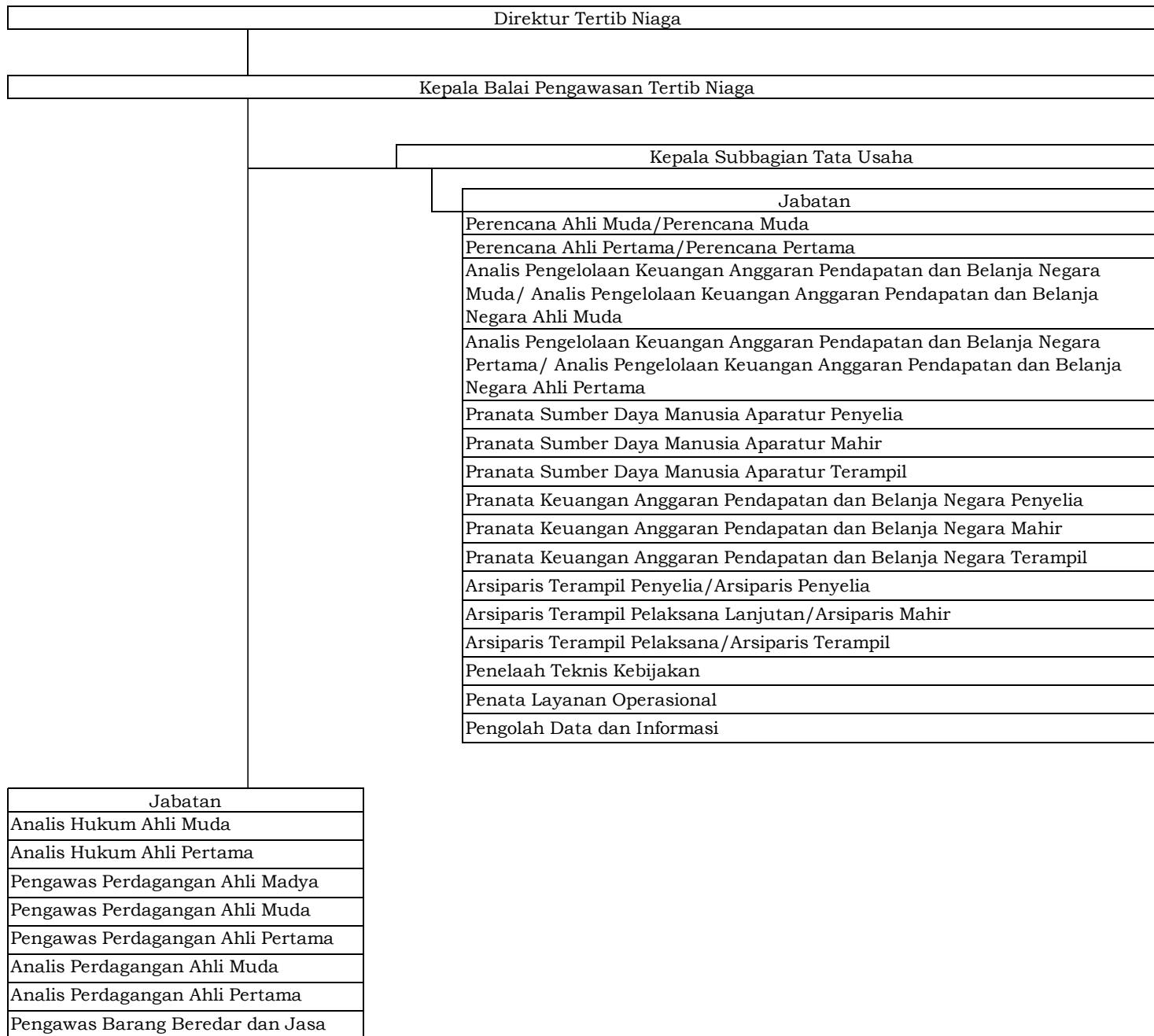


Q. PETA JABATAN BALAI PENGAWASAN TERTIB NIAGA BEKASI

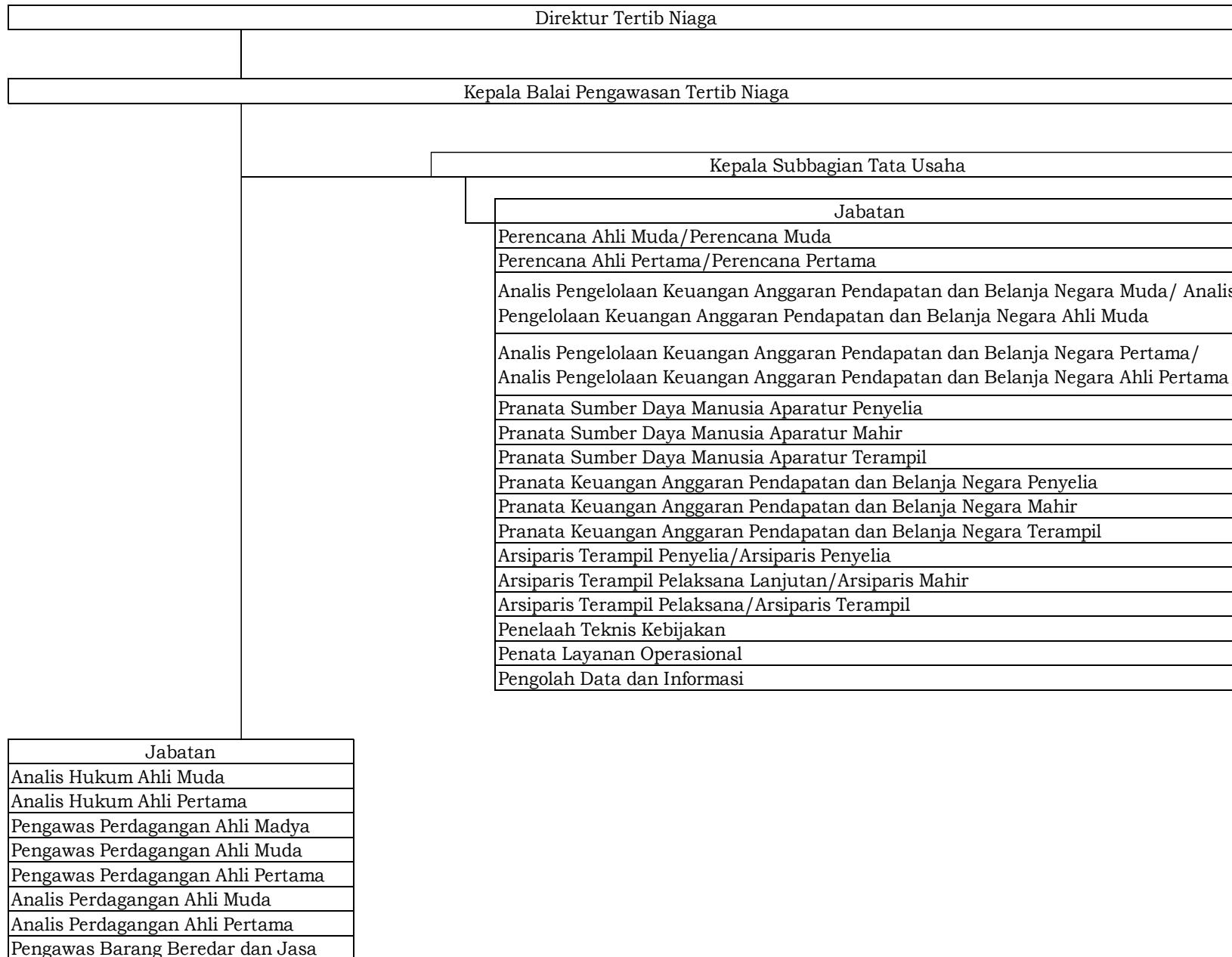


Jabatan
Analis Hukum Ahli Muda
Analis Hukum Ahli Pertama
Pengawas Perdagangan Ahli Madya
Pengawas Perdagangan Ahli Muda
Pengawas Perdagangan Ahli Pertama
Analis Perdagangan Ahli Muda
Analis Perdagangan Ahli Pertama
Pengawas Barang Beredar dan Jasa

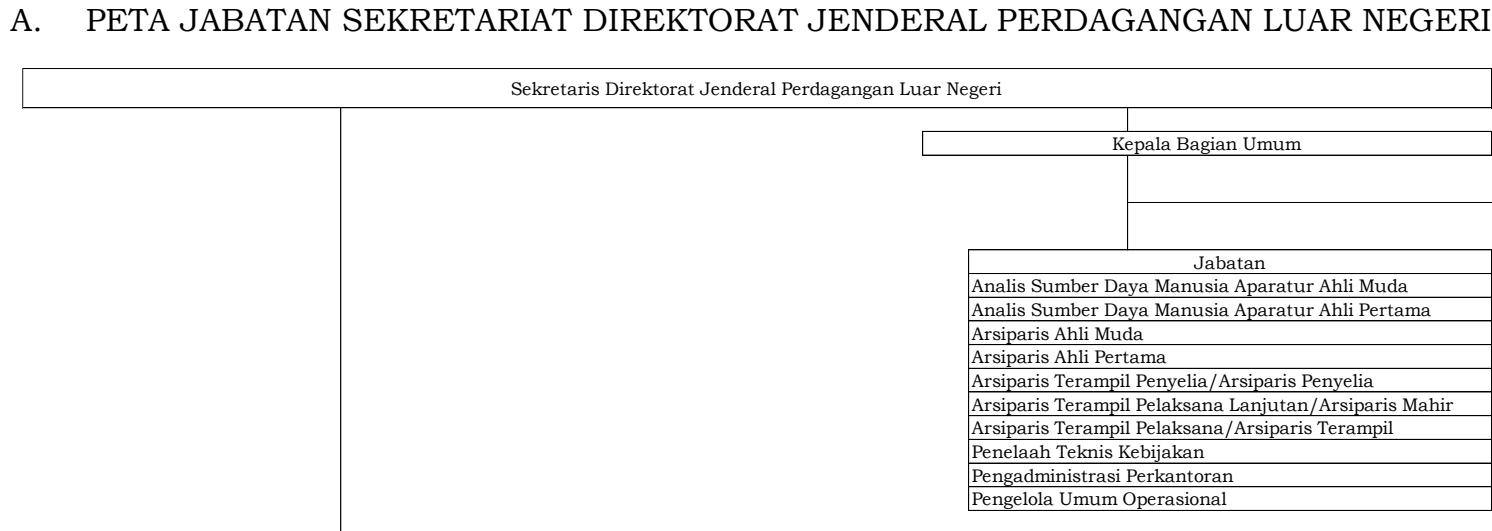
R. PETA JABATAN BALAI PENGAWASAN TERTIB NIAGA SURABAYA



S. PETA JABATAN BALAI PENGAWASAN TERTIB NIAGA MAKASSAR

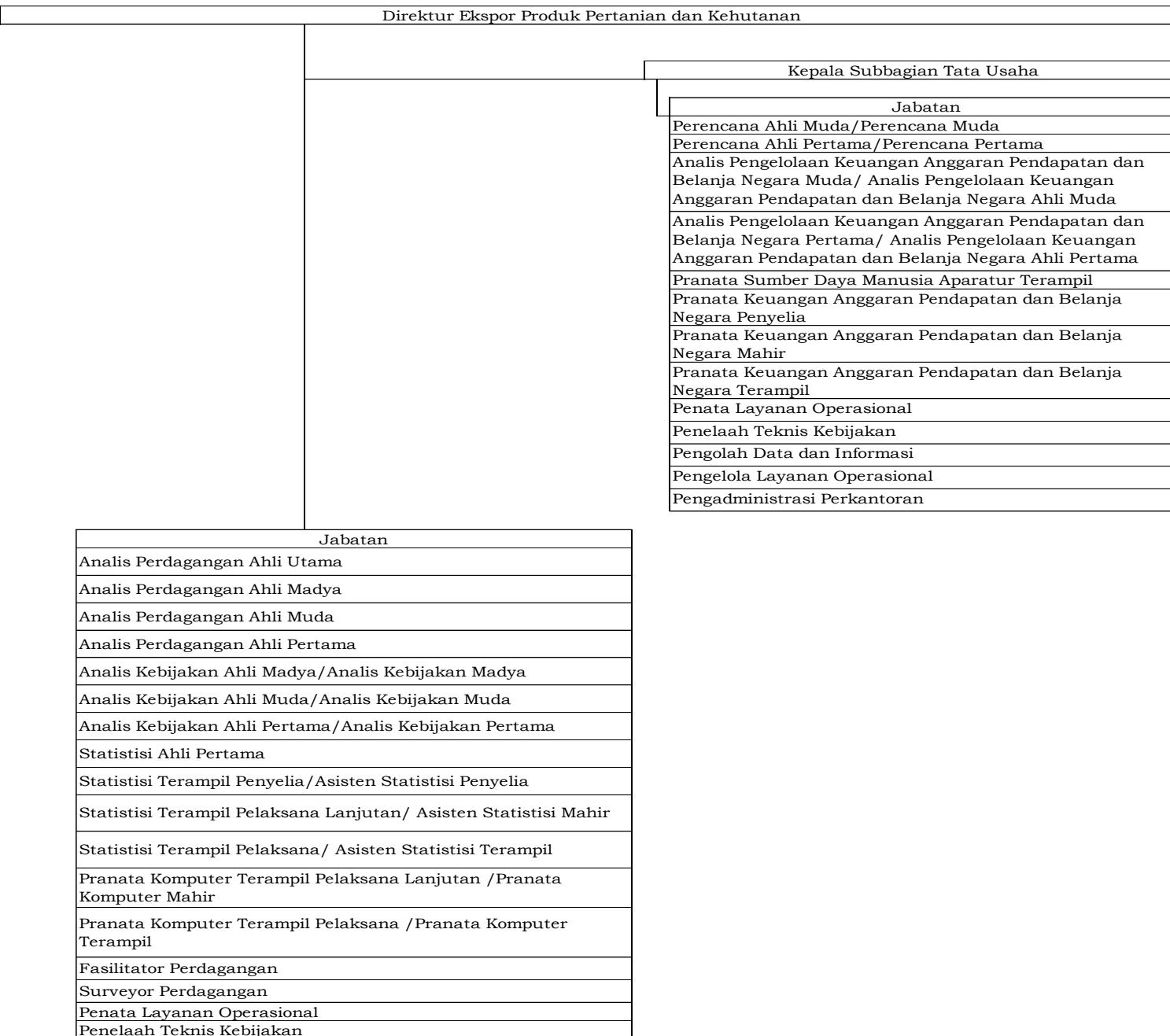


#### IV. PETA JABATAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI

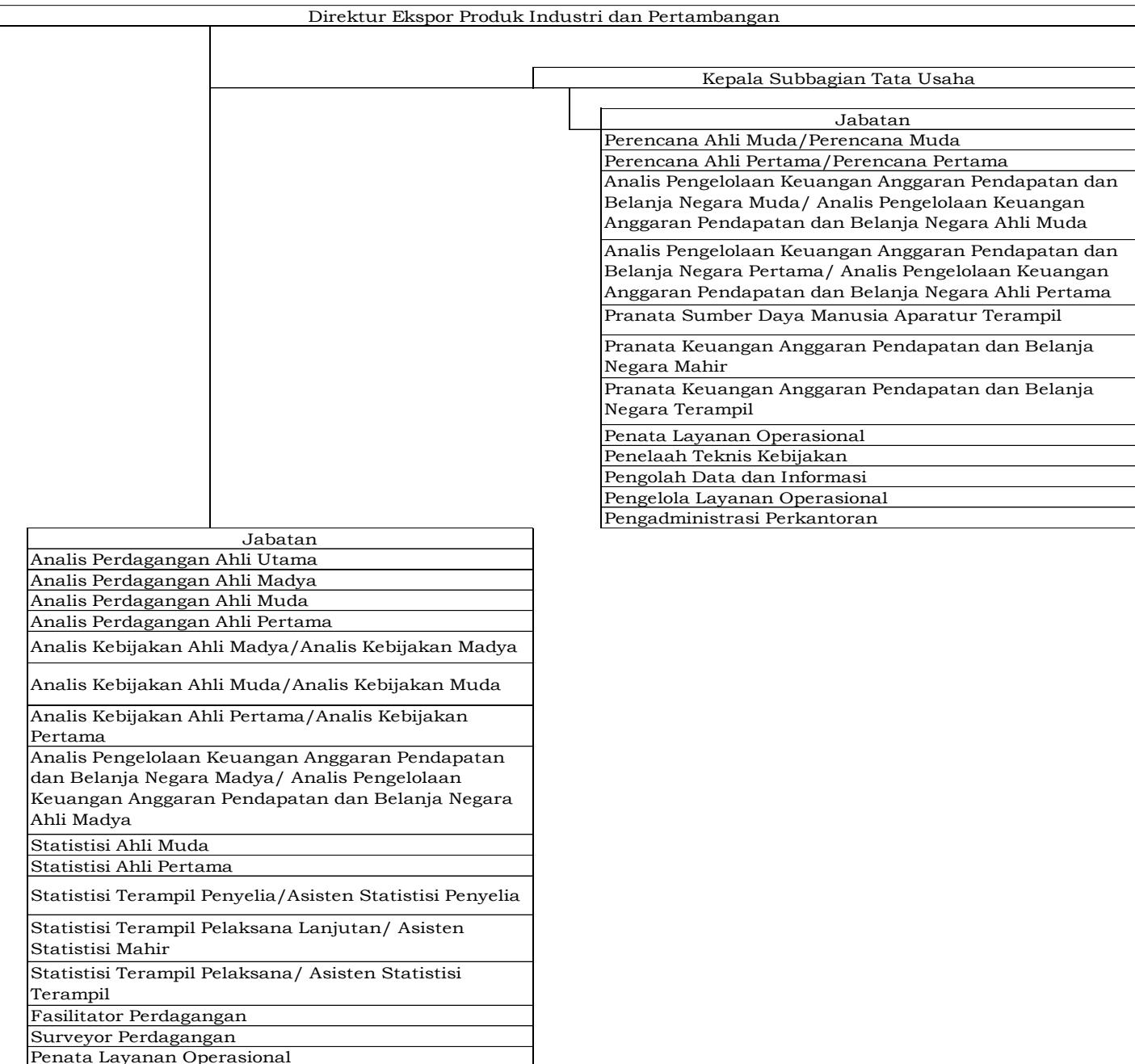


Jabatan
Analisis Kebijakan Ahli Madya/Analisis Kebijakan Madya
Analisis Kebijakan Ahli Muda/Analisis Kebijakan Muda
Analisis Kebijakan Ahli Pertama/Analisis Kebijakan Pertama
Perencana Ahli Madya/Perencana Madya
Perencana Ahli Muda/Perencana Muda
Perencana Ahli Pertama/Perencana Pertama
Analisis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Madya/ Analisis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Madya
Analisis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Muda/ Analisis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Muda
Analisis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pertama/ Analisis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Pertama
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama
Analisis Hukum Ahli Muda
Analisis Hukum Ahli Pertama
Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda/Pranata Hubungan Masyarakat Muda
Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama/Pranata Hubungan Masyarakat Pertama
Pranata Komputer Ahli Pertama
Pranata Komputer Terampil Penyelia/Pranata Komputer Penyelia
Pranata Komputer Terampil Pelaksana Lanjutan/Pranata Komputer Mahir
Pranata Komputer Terampil Pelaksana/Pranata Komputer Terampil
Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Penyelia
Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Mahir
Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Terampil
Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya
Arsiparis Ahli Madya
Penelaah Teknis Kebijakan
Penata Layanan Operasional
Pengolah Data dan Informasi

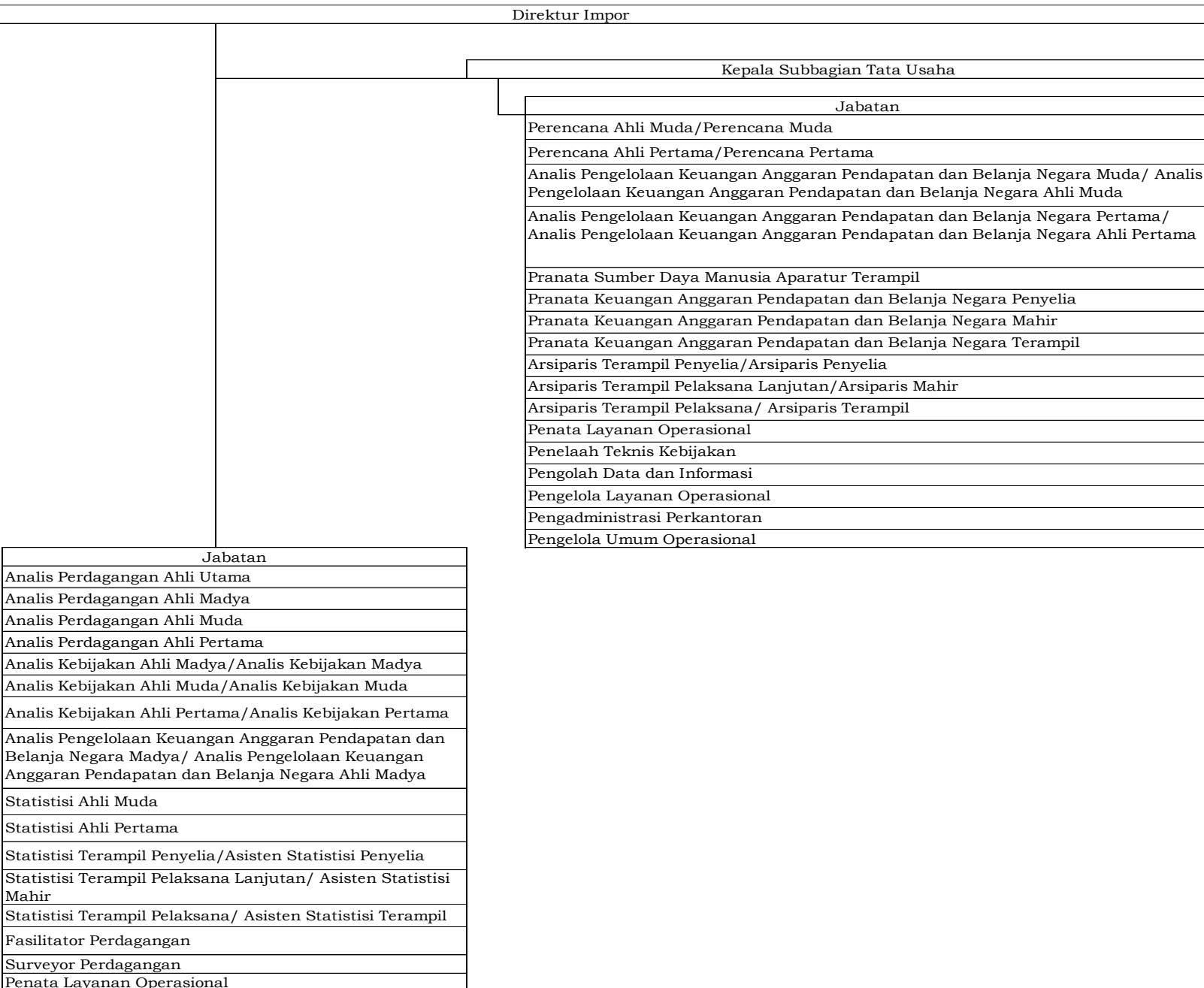
B. PETA JABATAN DIREKTORAT EKSPOR PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN



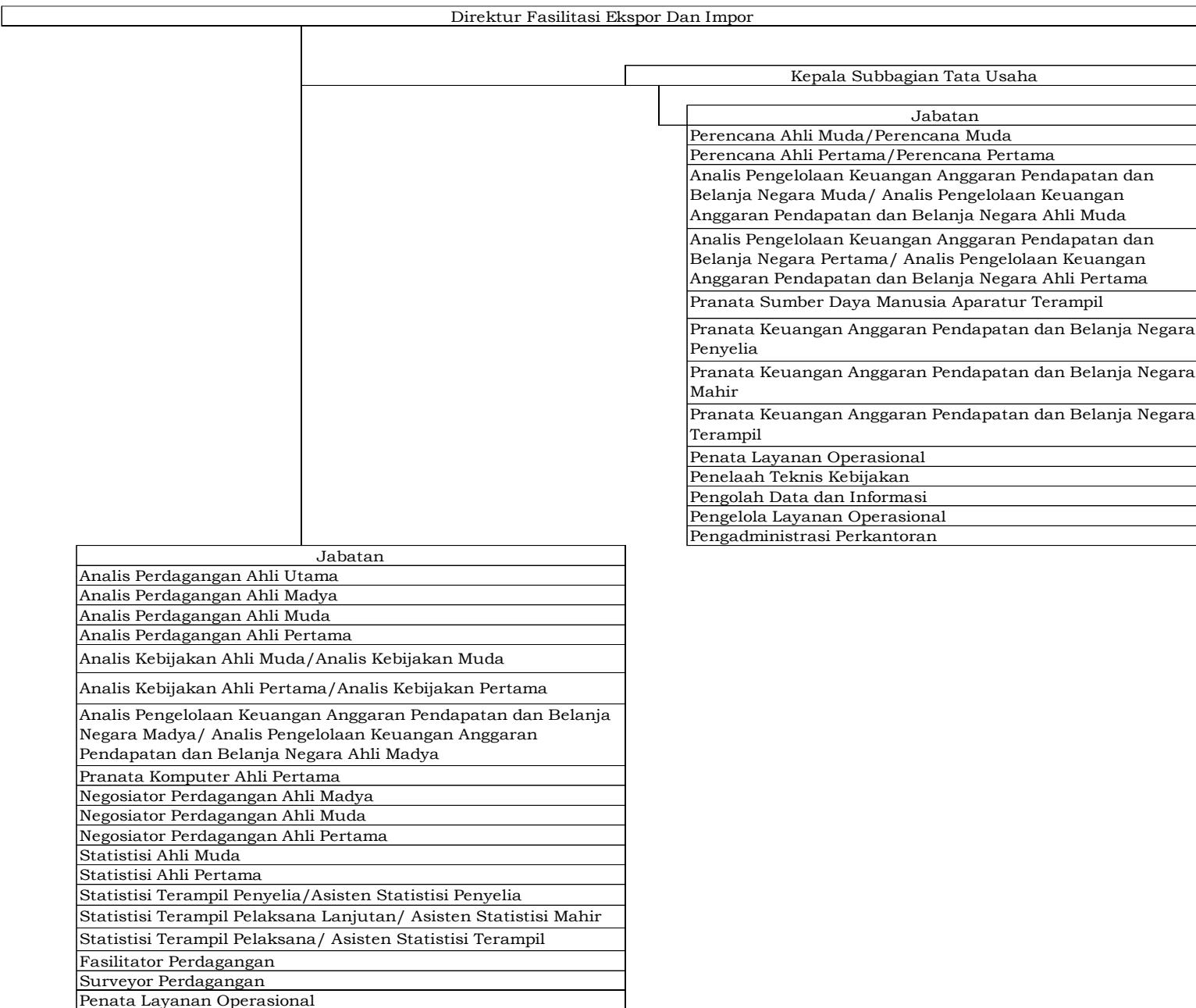
C. PETA JABATAN DIREKTORAT EKSPOR PRODUK INDUSTRI DAN PERTAMBANGAN



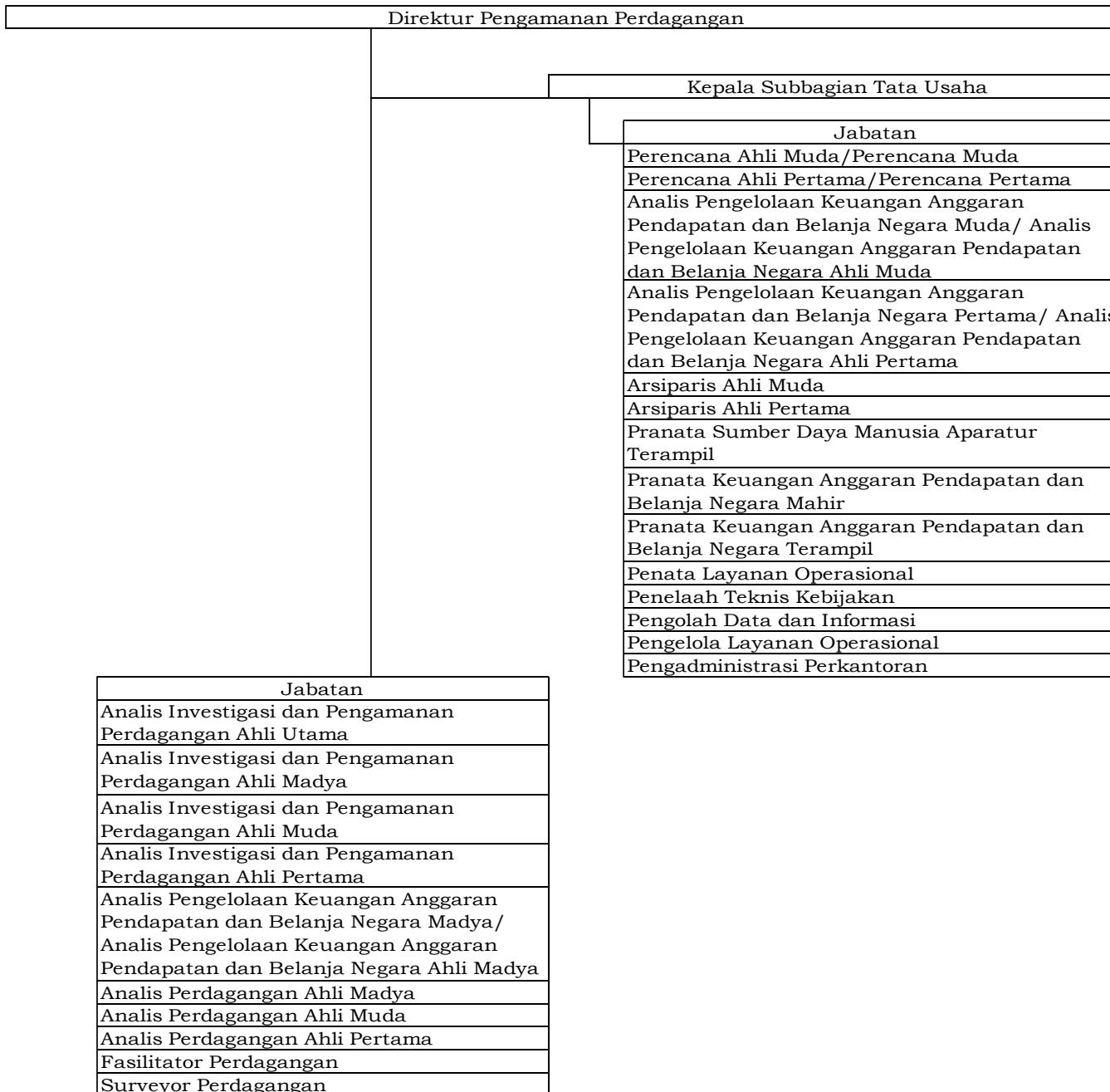
D. PETA JABATAN DIREKTORAT IMPOR



E. PETA JABATAN DIREKTORAT FASILITASI EKSPOR DAN IMPOR

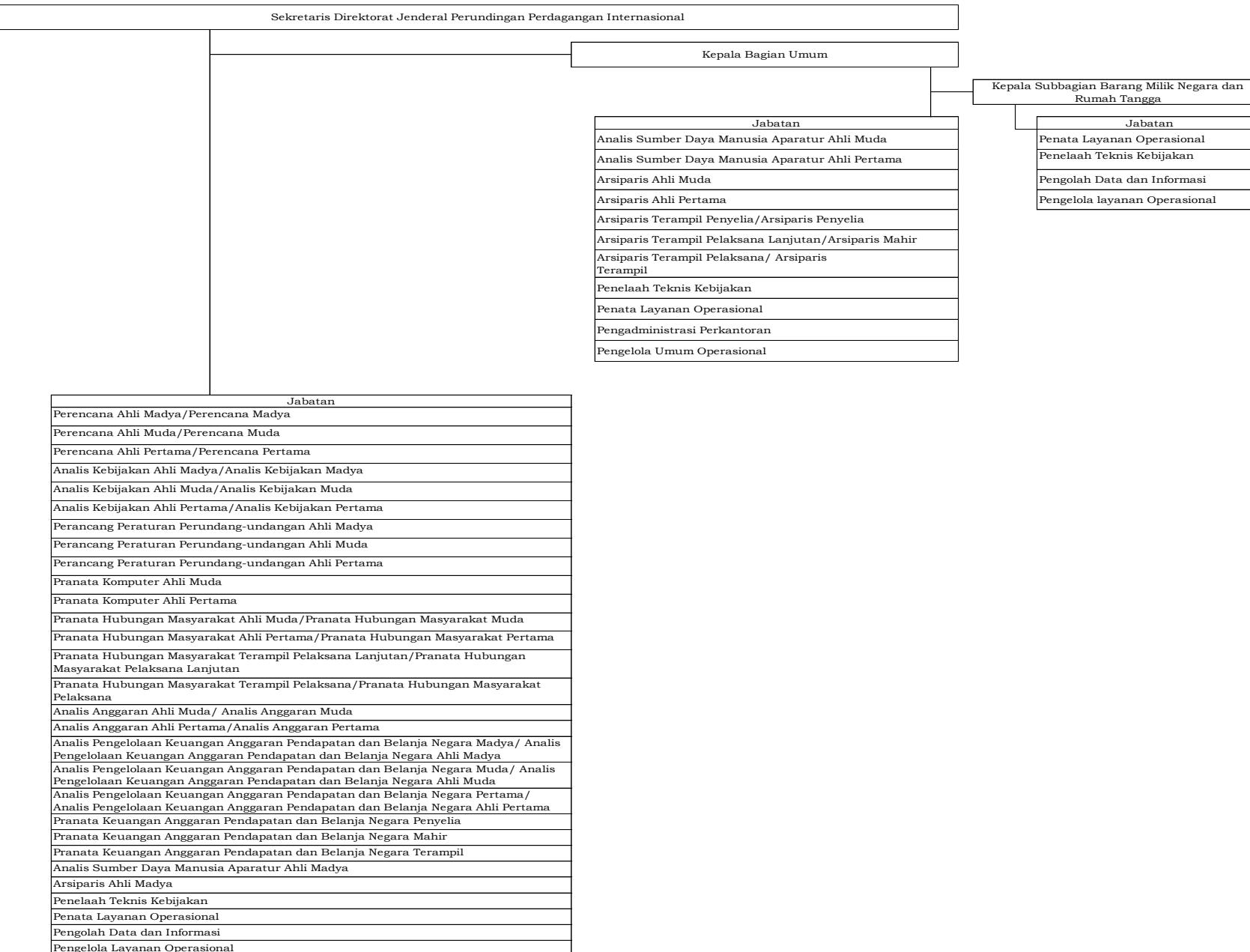


F. PETA JABATAN DIREKTORAT PENGAMANAN PERDAGANGAN

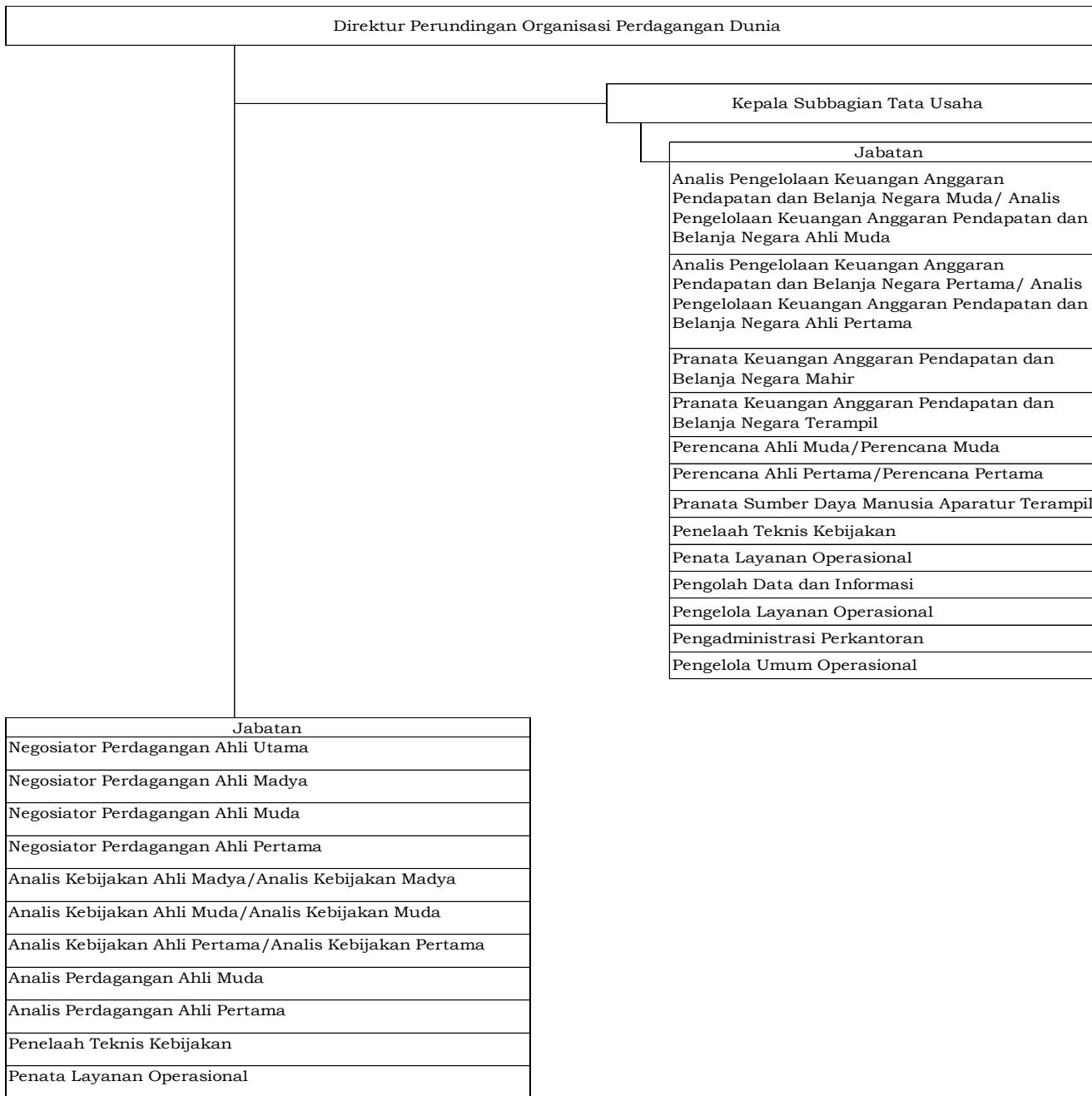


## V. PETA JABATAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

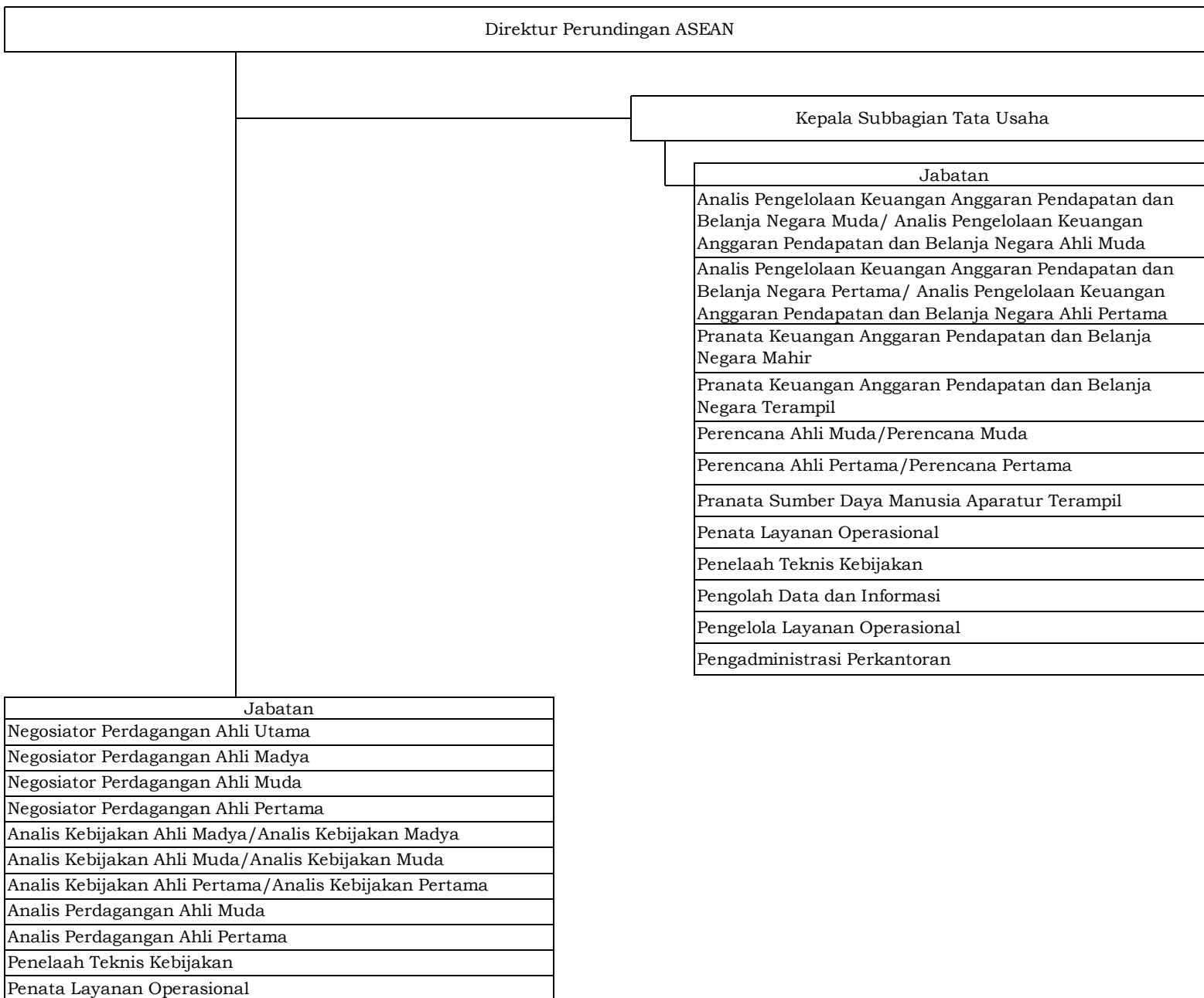
### A. PETA JABATAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL



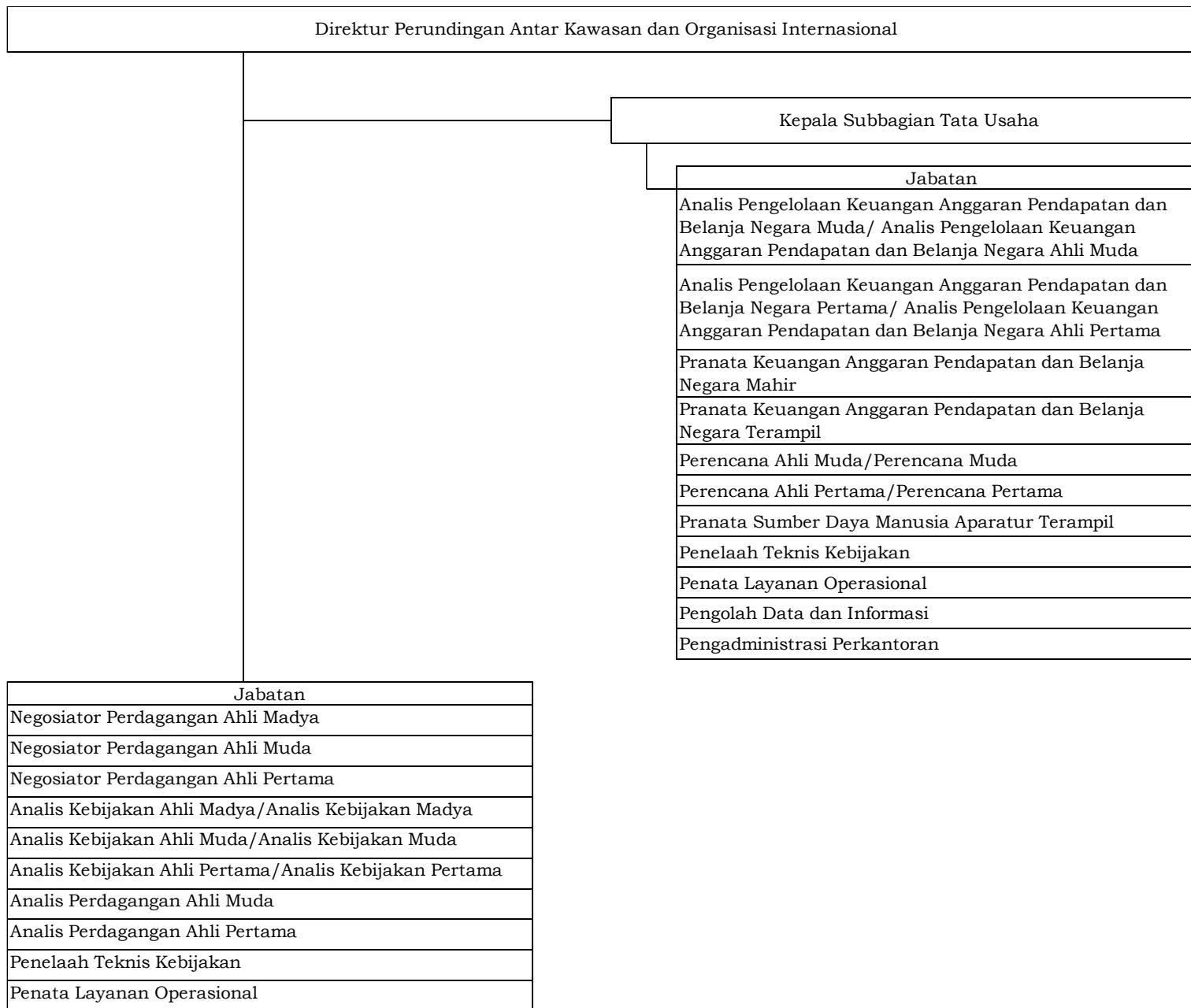
B. PETA JABATAN DIREKTORAT PERUNDINGAN ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA



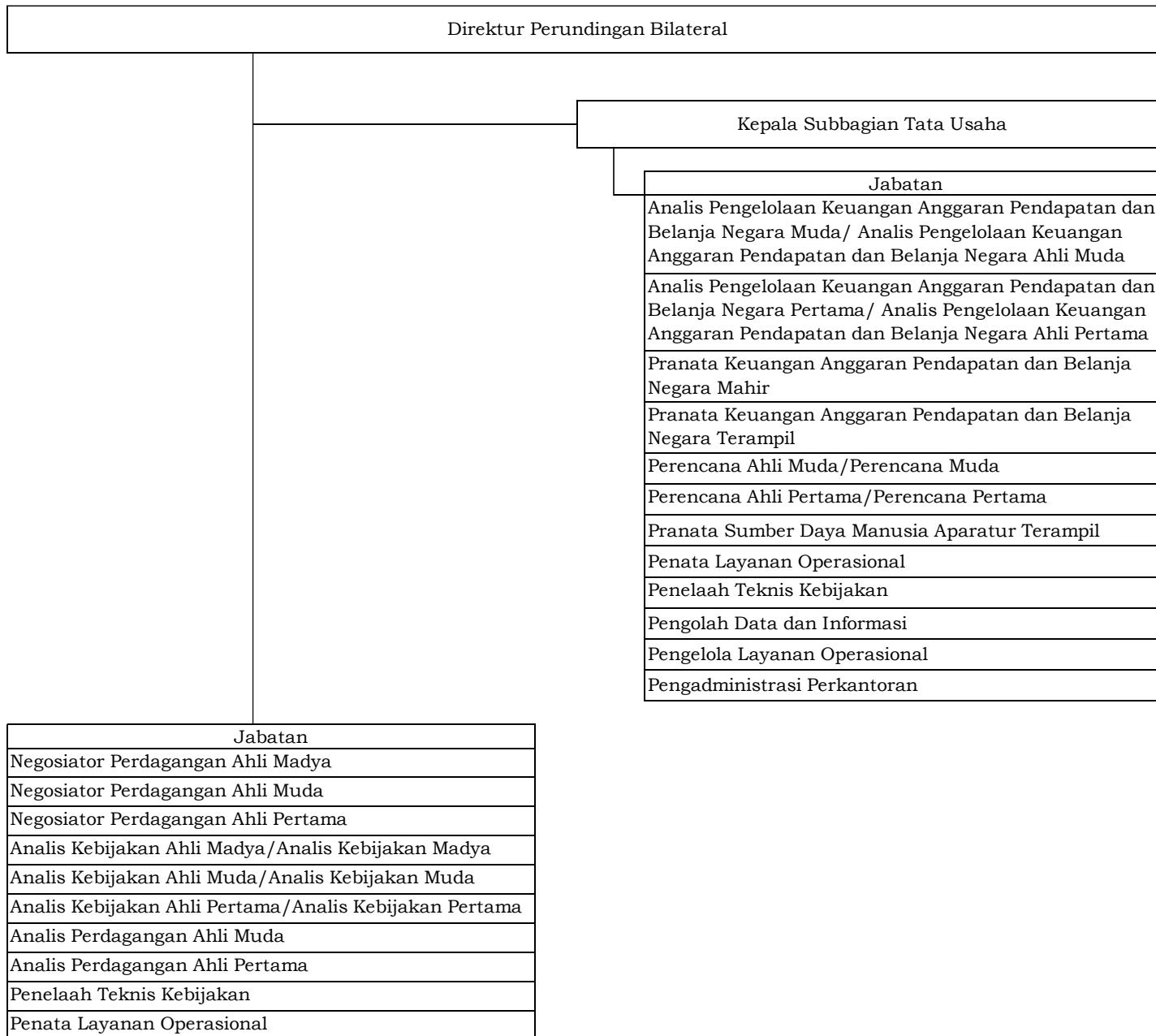
C. PETA JABATAN DIREKTORAT PERUNDINGAN ASEAN



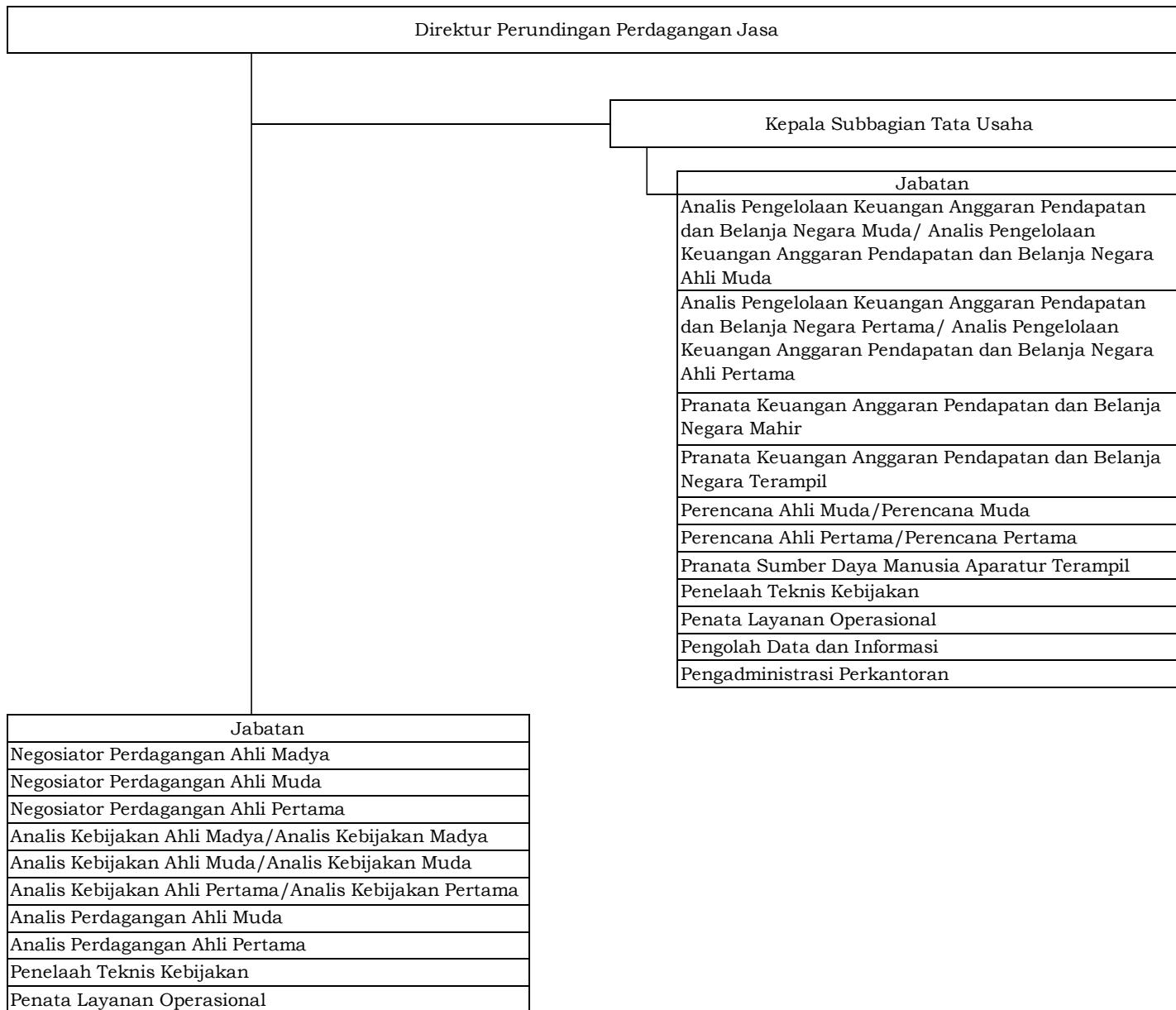
D. PETA JABATAN DIREKTORAT PERUNDINGAN ANTAR KAWASAN DAN ORGANISASI INTERNASIONAL



E. PETA JABATAN DIREKTORAT PERUNDINGAN BILATERAL

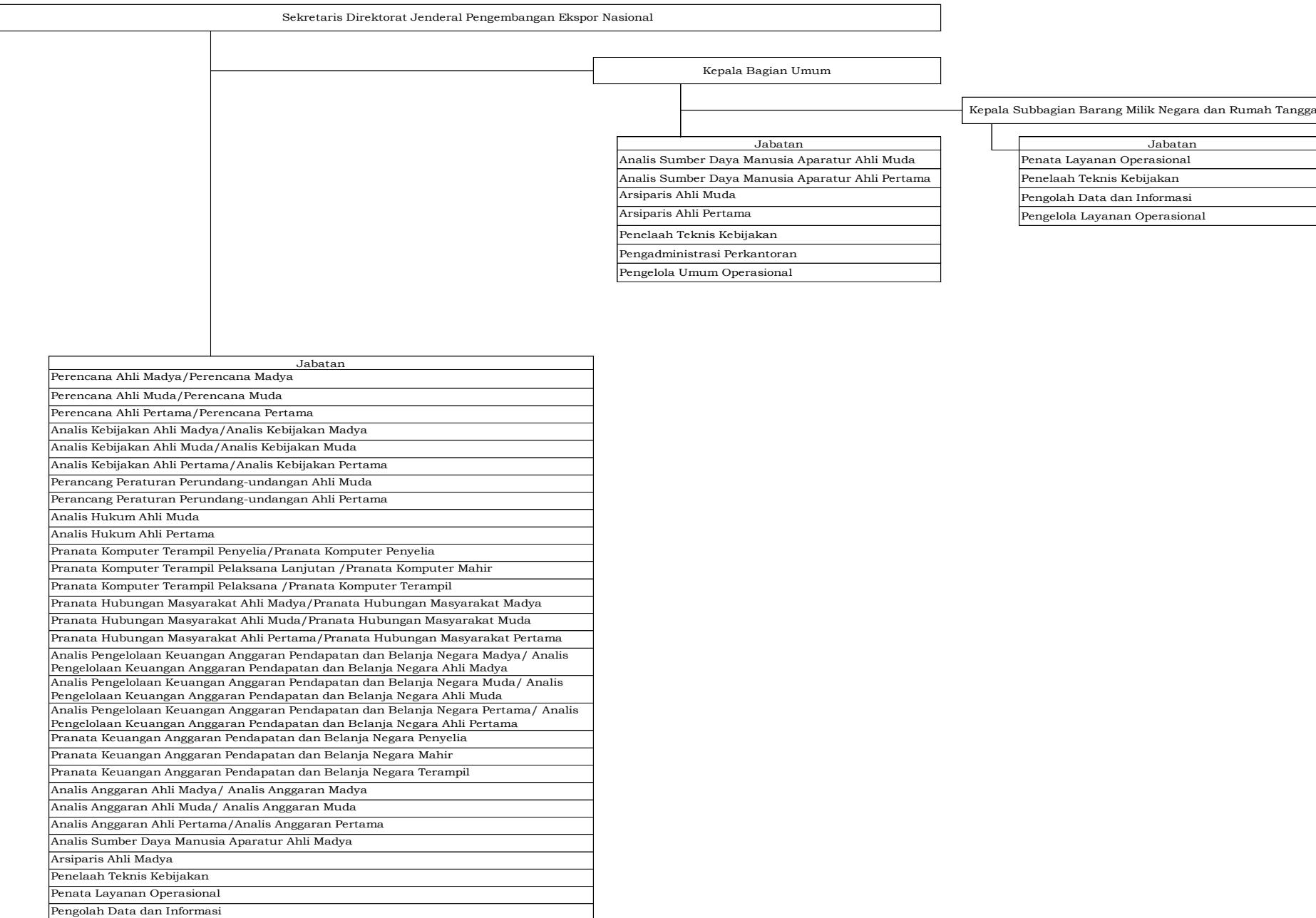


F. PETA JABATAN DIREKTORAT PERUNDINGAN PERDAGANGAN JASA

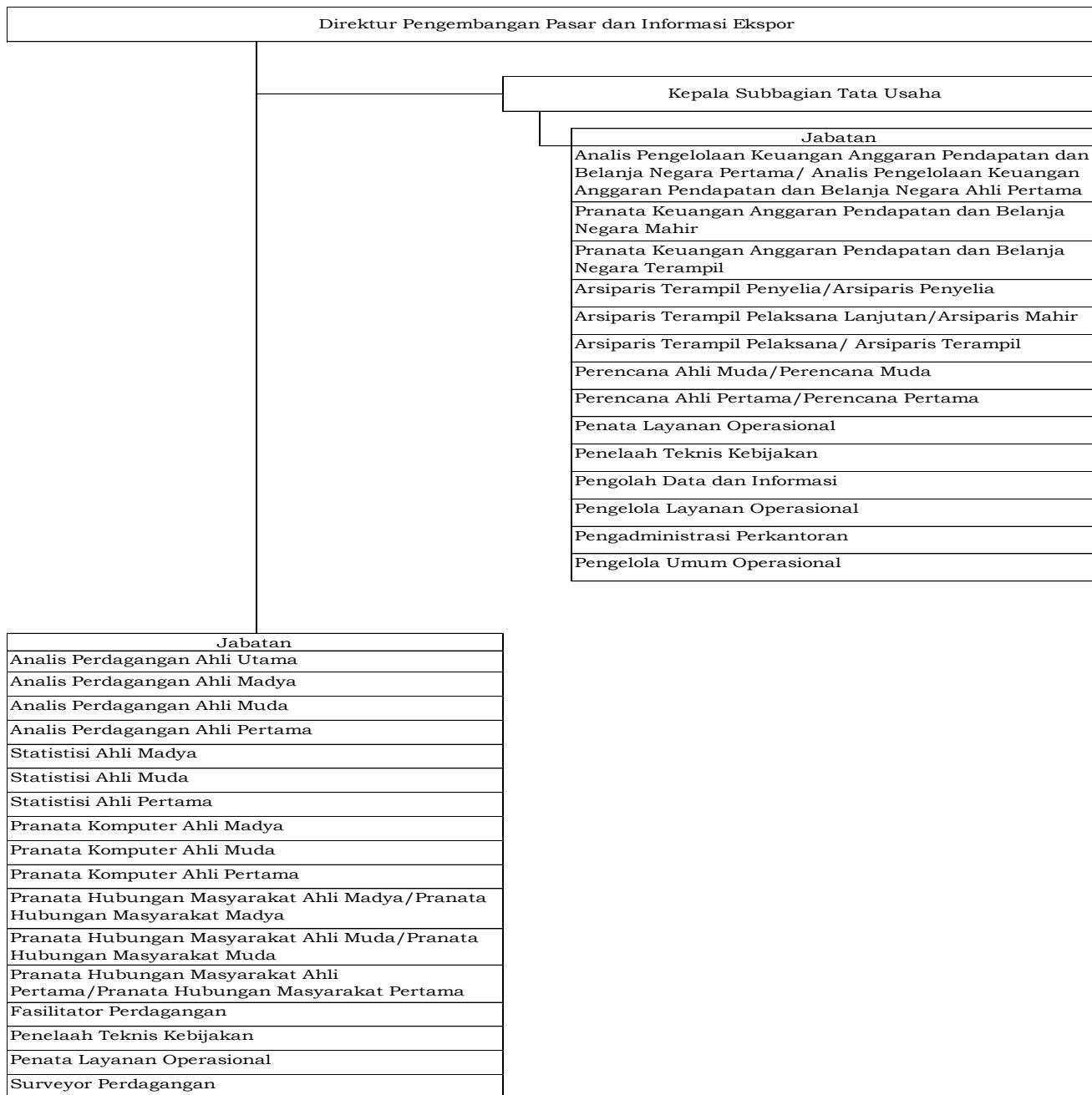


## VI. PETA JABATAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL

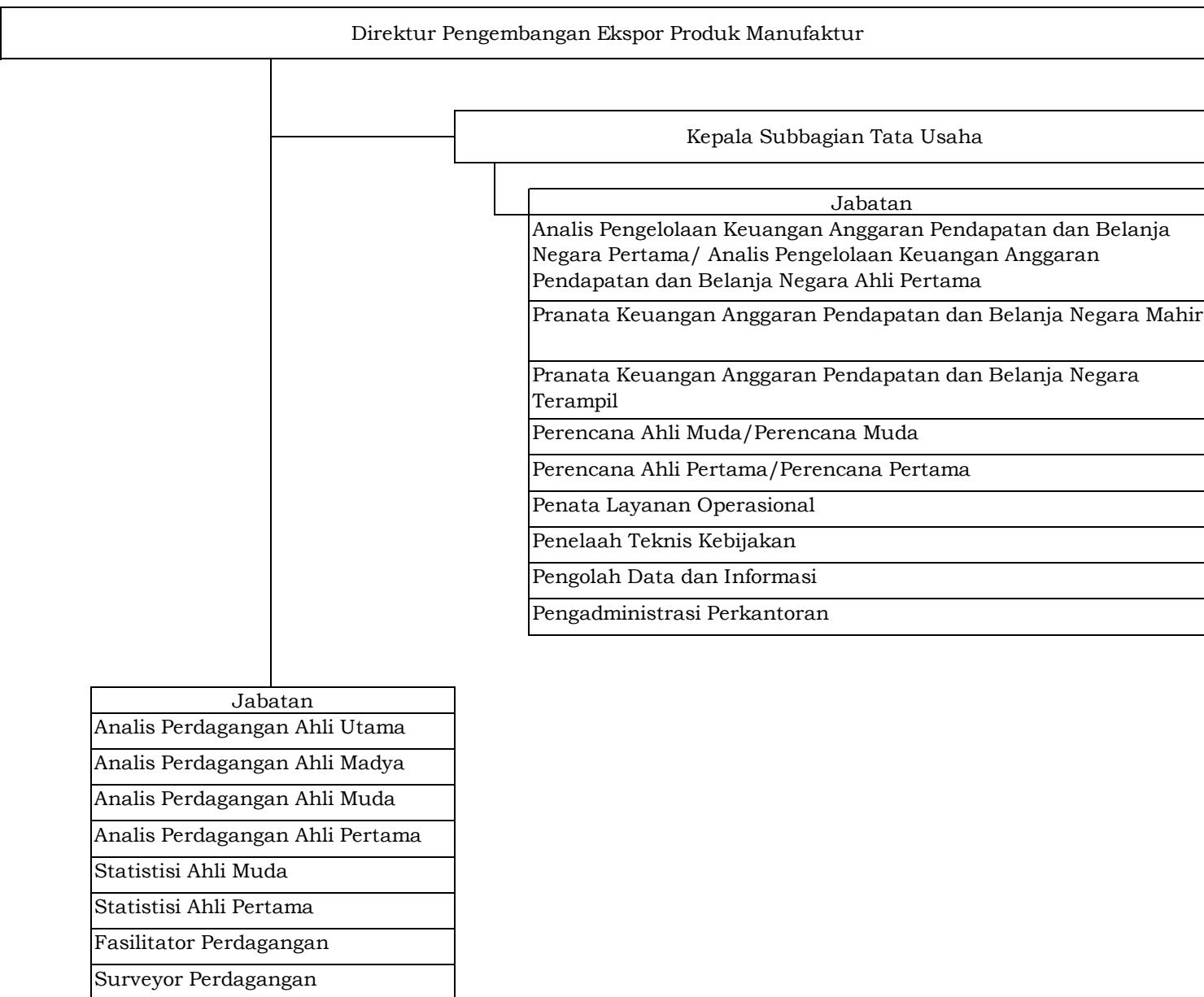
### A. PETA JABATAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL



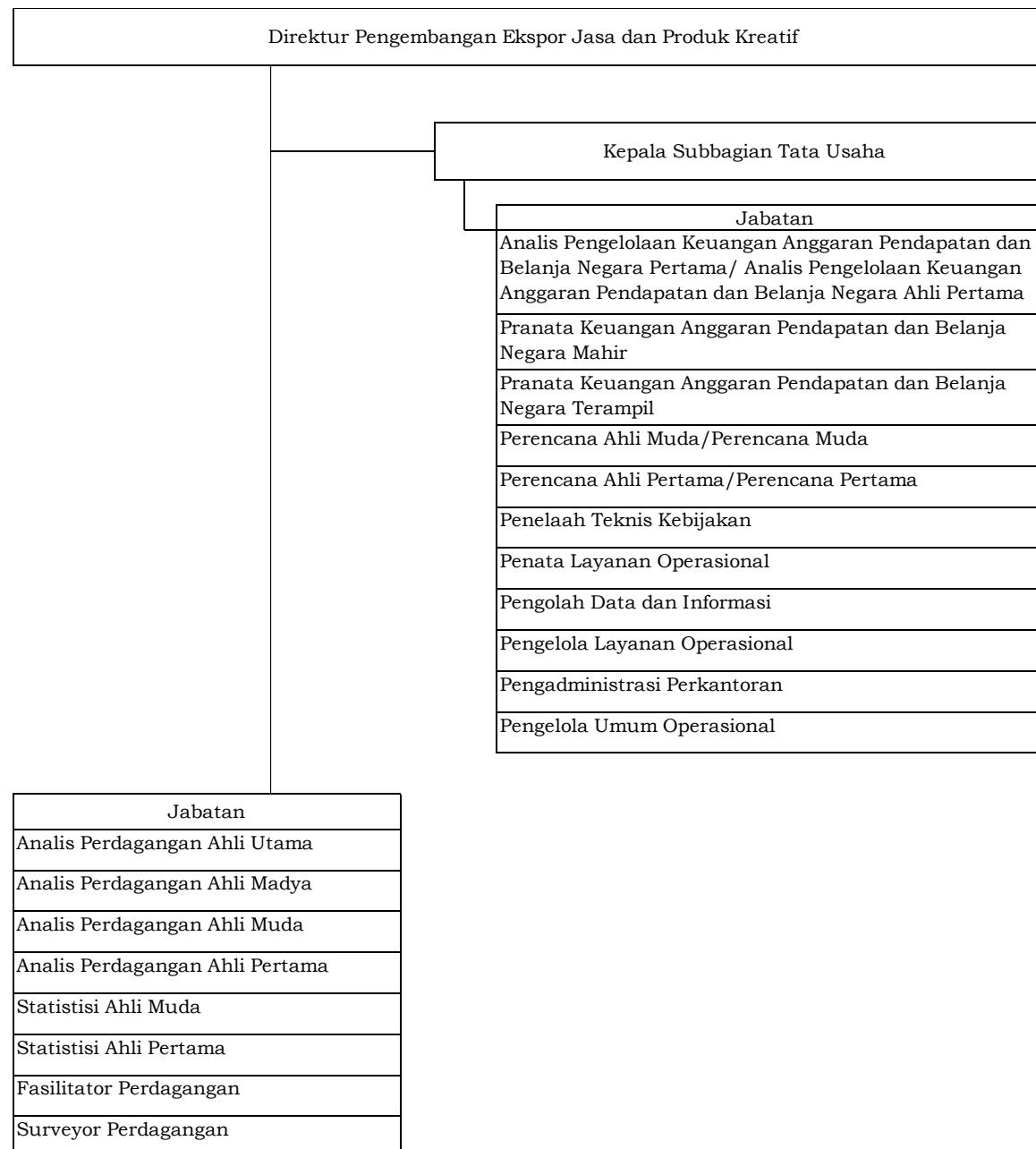
B. PETA JABATAN DIREKTORAT PENGEMBANGAN PASAR DAN INFORMASI EKSPOR



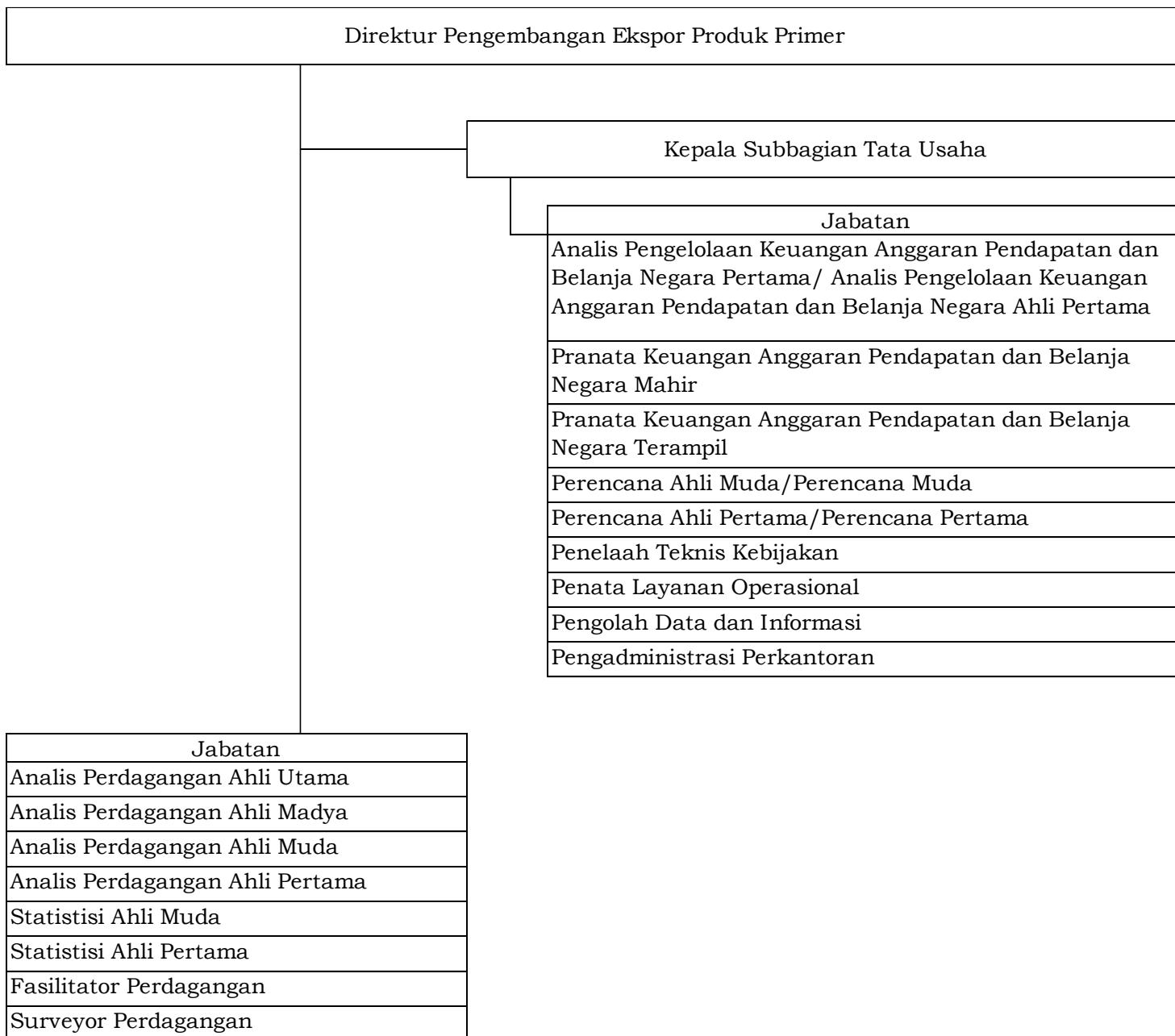
C. PETA JABATAN DIREKTORAT PENGEMBANGAN EKSPOR PRODUK MANUFAKTUR



D. PETA JABATAN DIREKTORAT PENGEMBANGAN EKSPOR JASA DAN PRODUK KREATIF

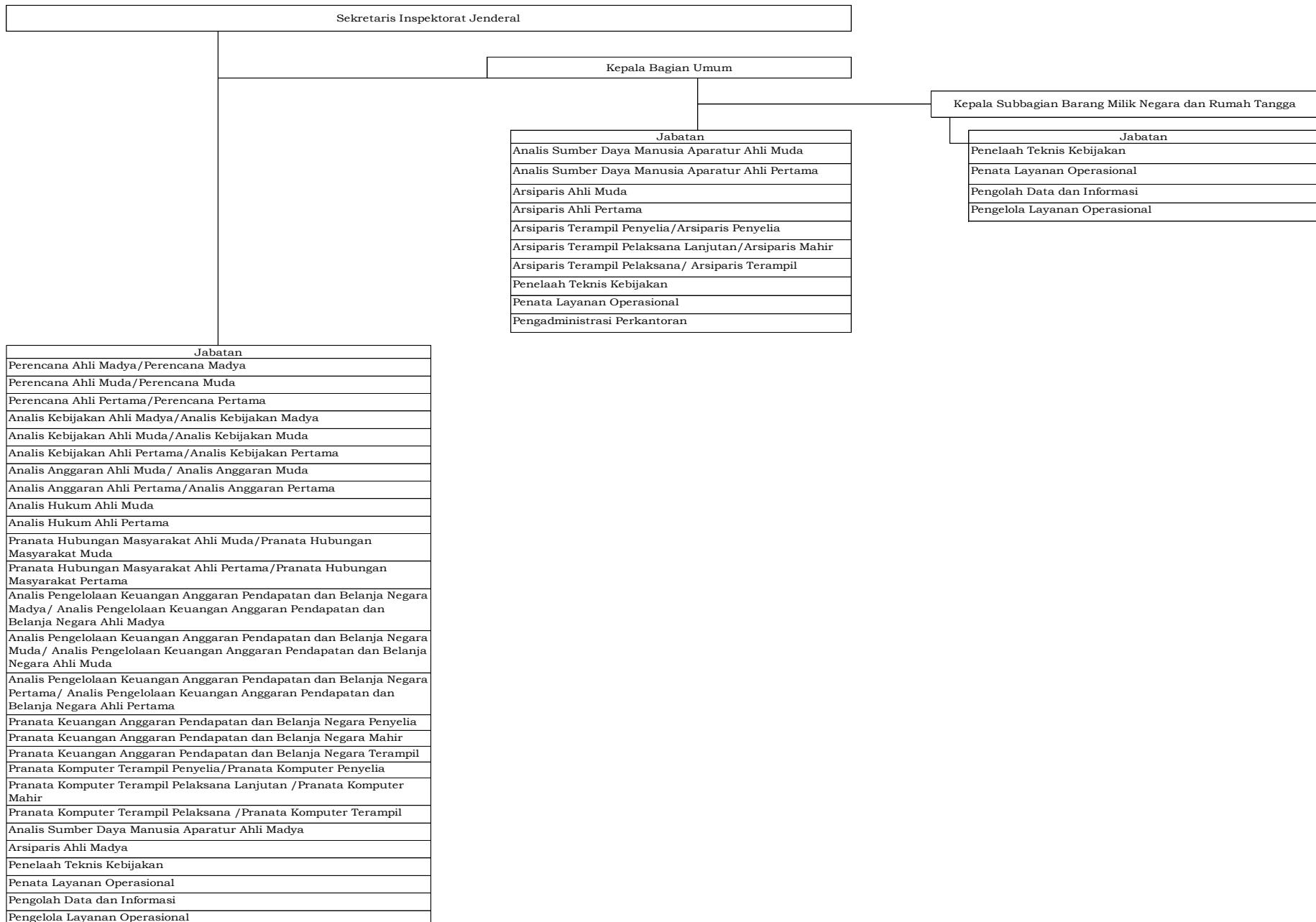


E. PETA JABATAN DIREKTORAT PENGEMBANGAN EKSPOR PRODUK PRIMER

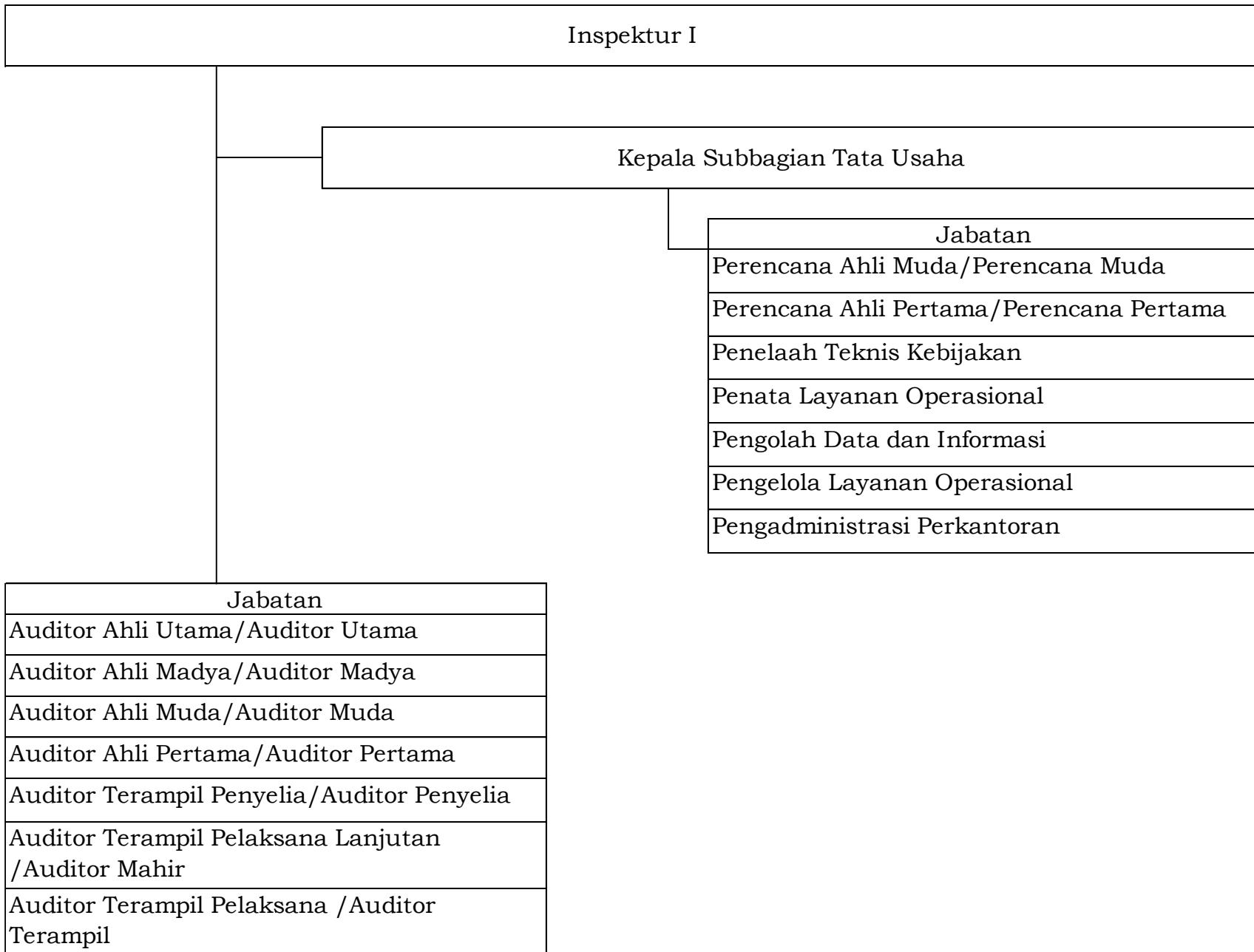


## VII. PETA JABATAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL

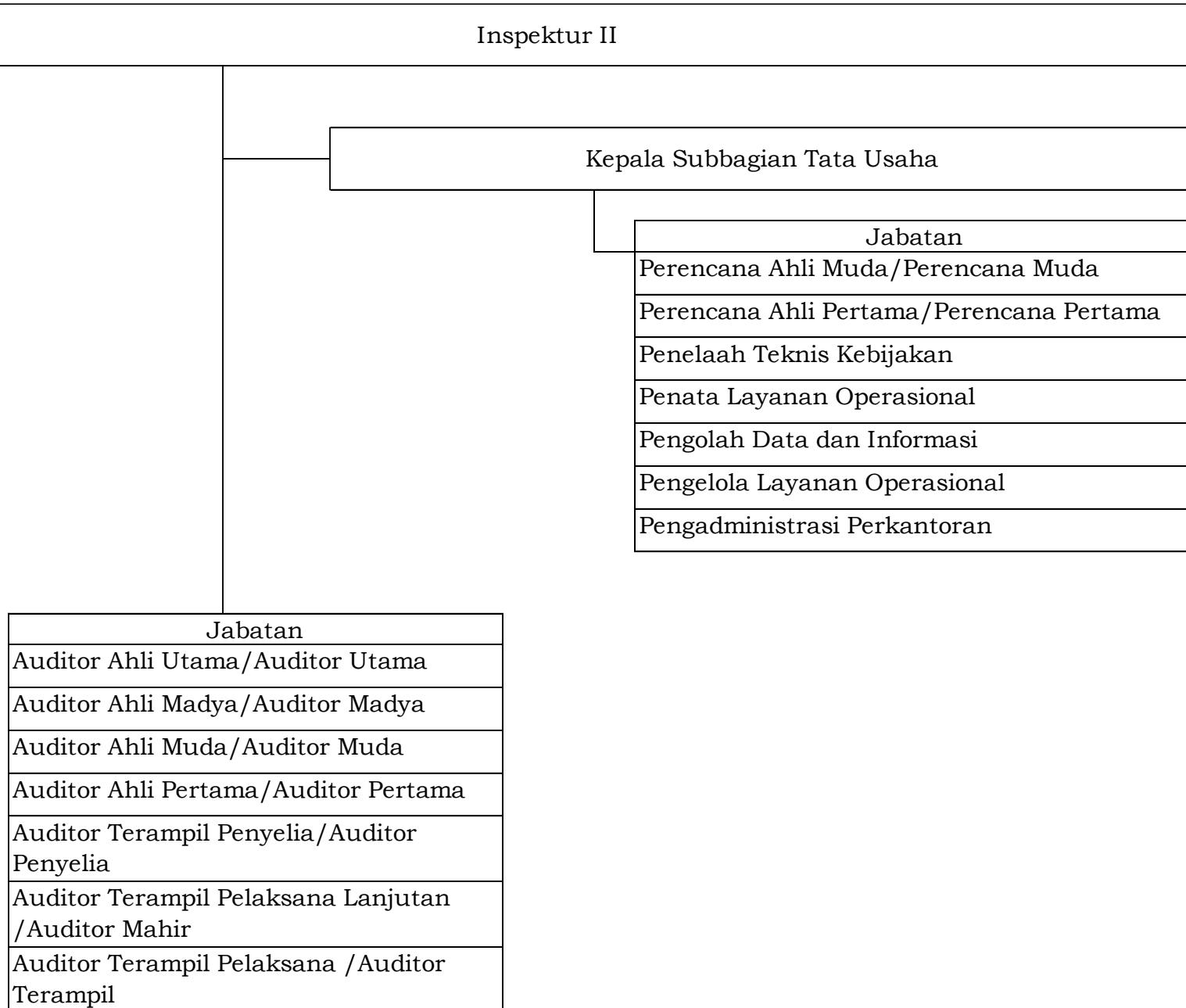
### A. PETA JABATAN SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL



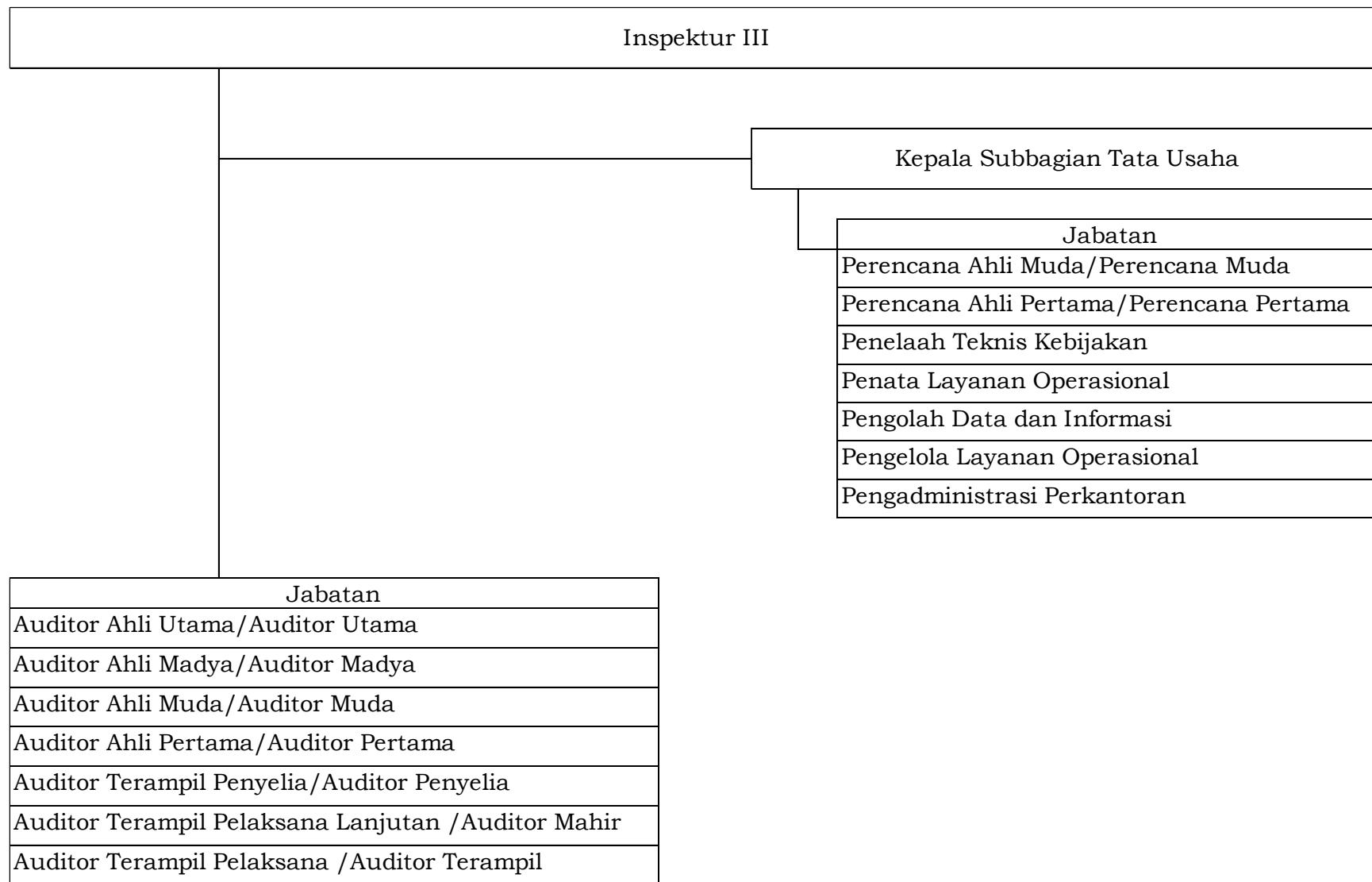
B. PETA JABATAN INSPEKTORAT I



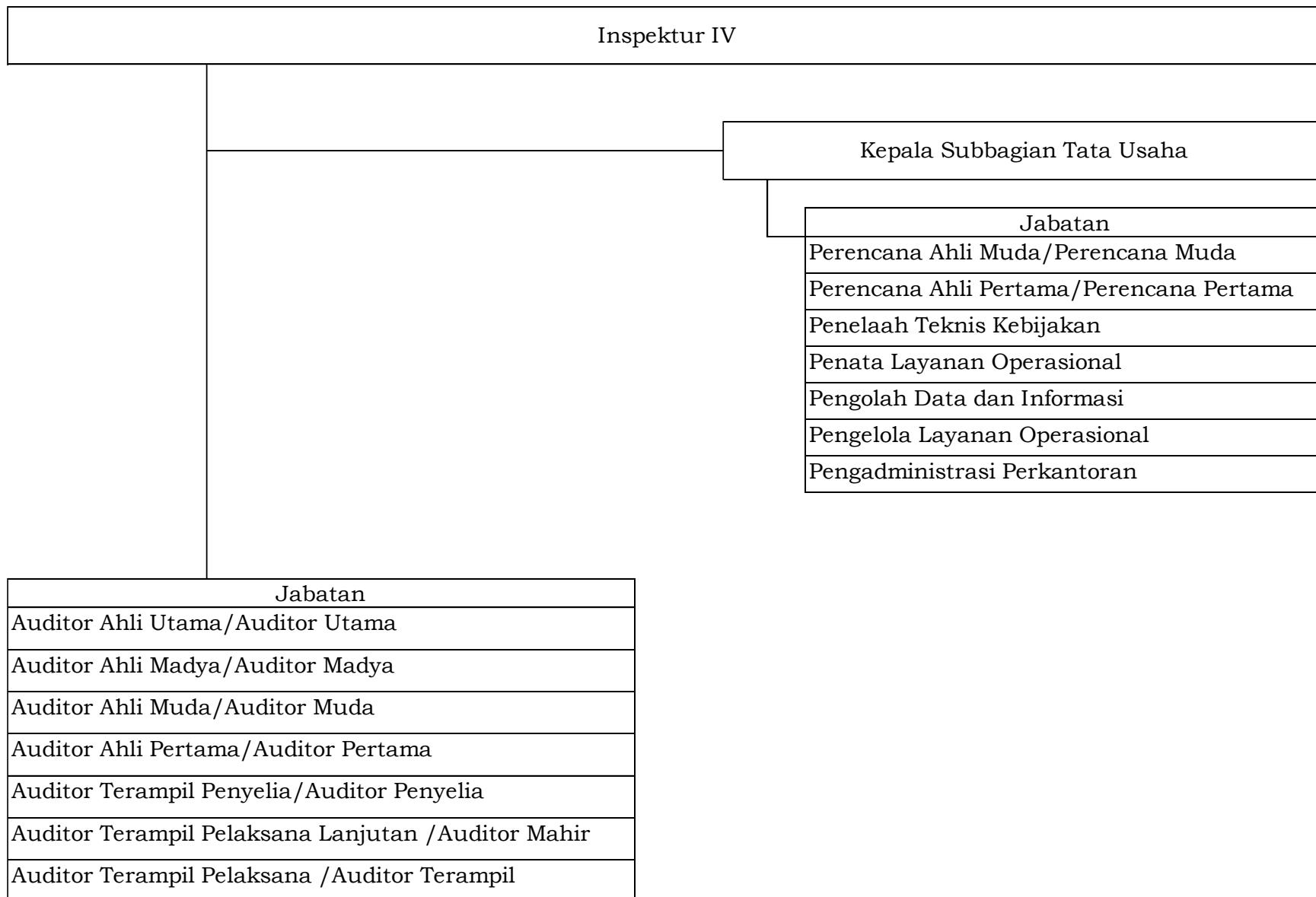
C. PETA JABATAN INSPEKTORAT II



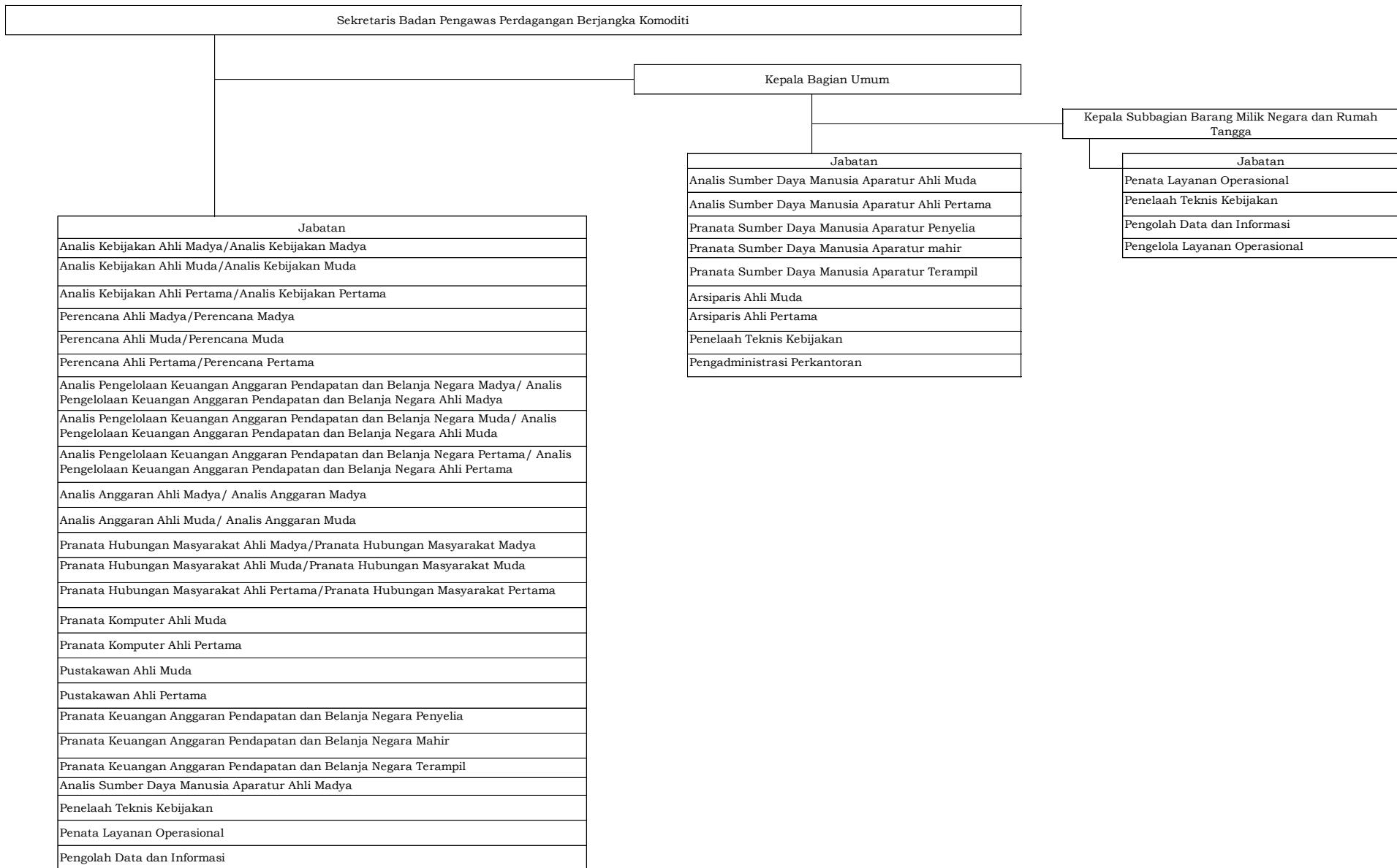
D. PETA JABATAN INSPEKTORAT III



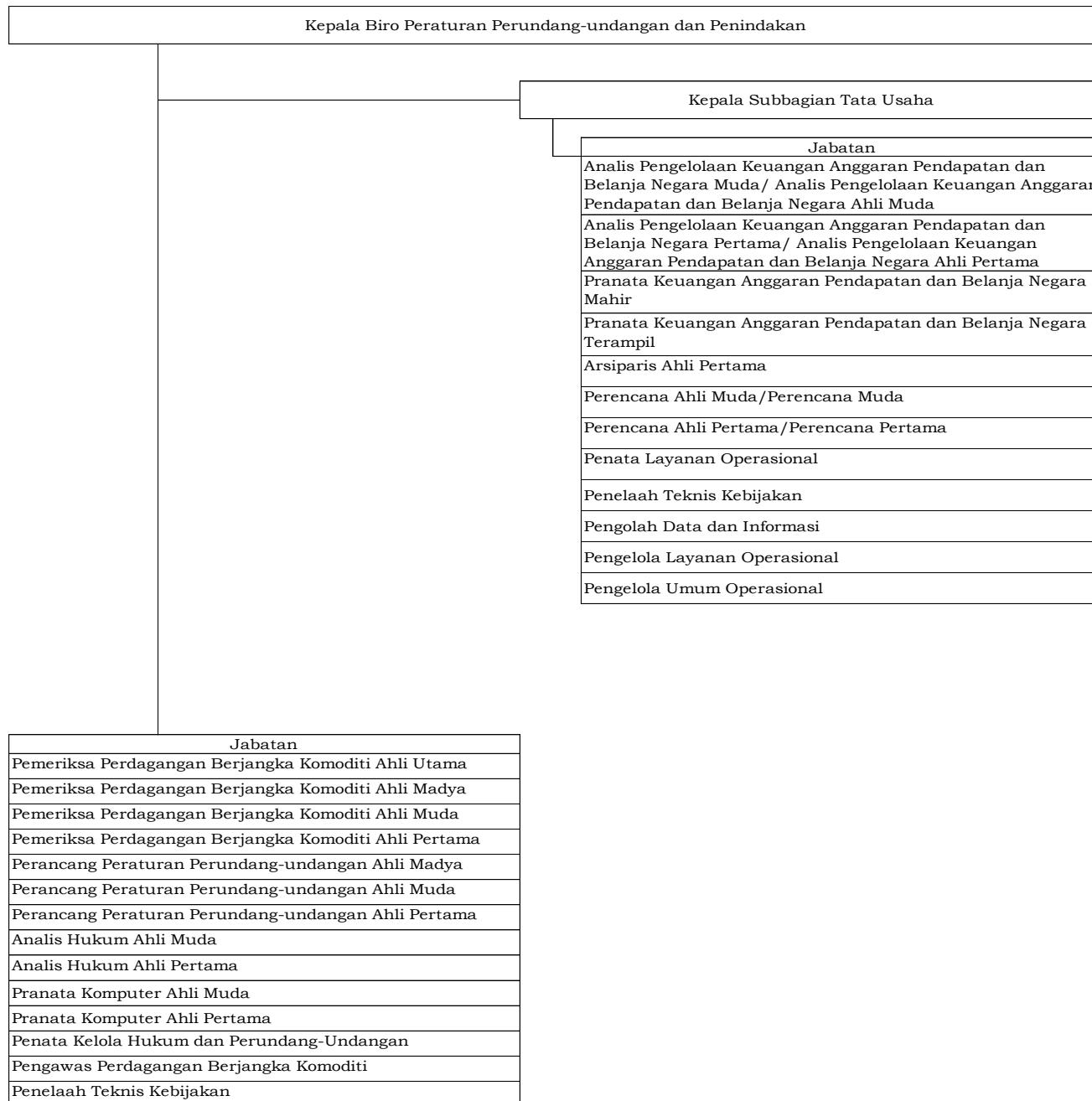
E. PETA JABATAN INSPEKTORAT IV



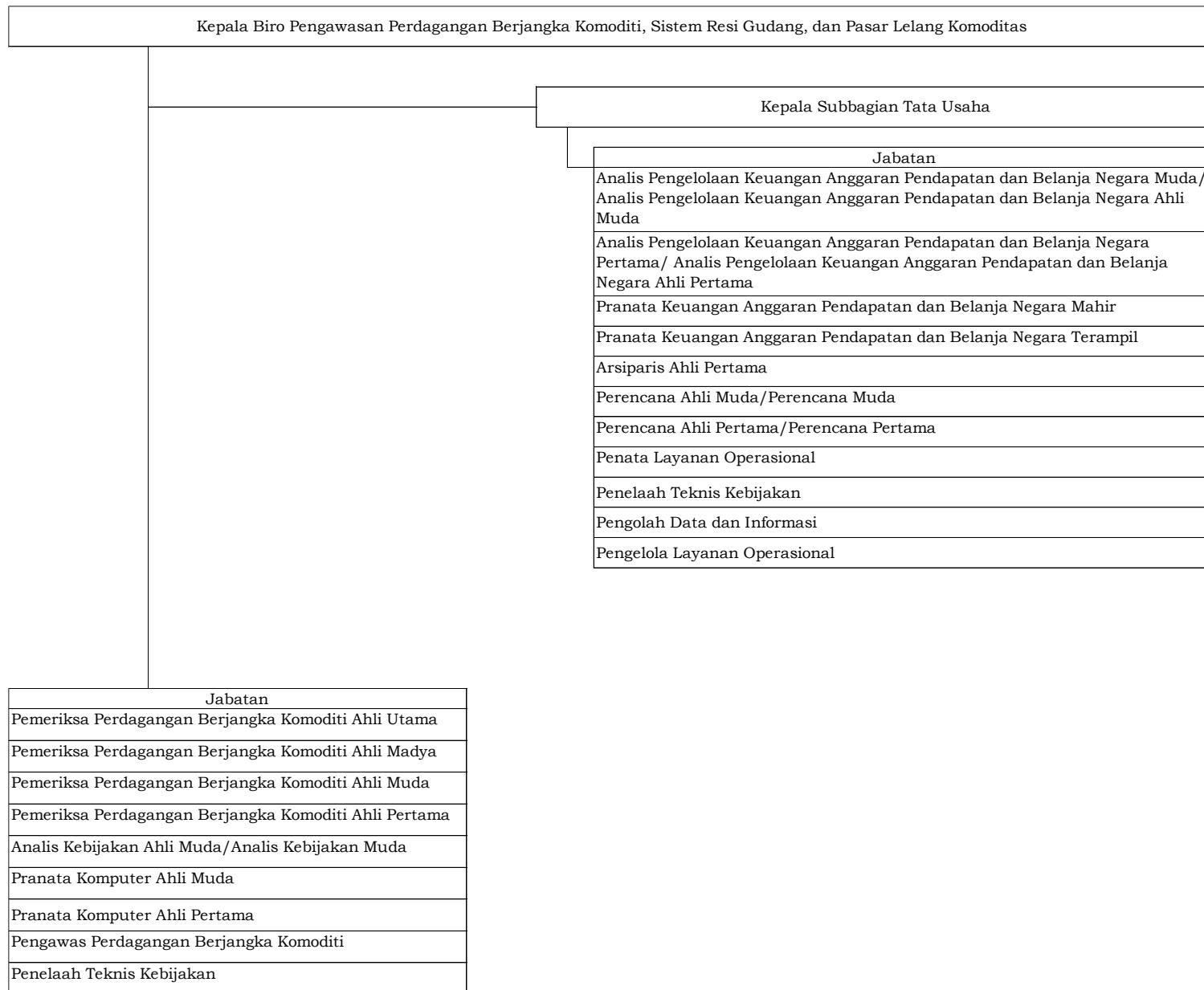
VIII. PETA JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI  
A. PETA JABATAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI



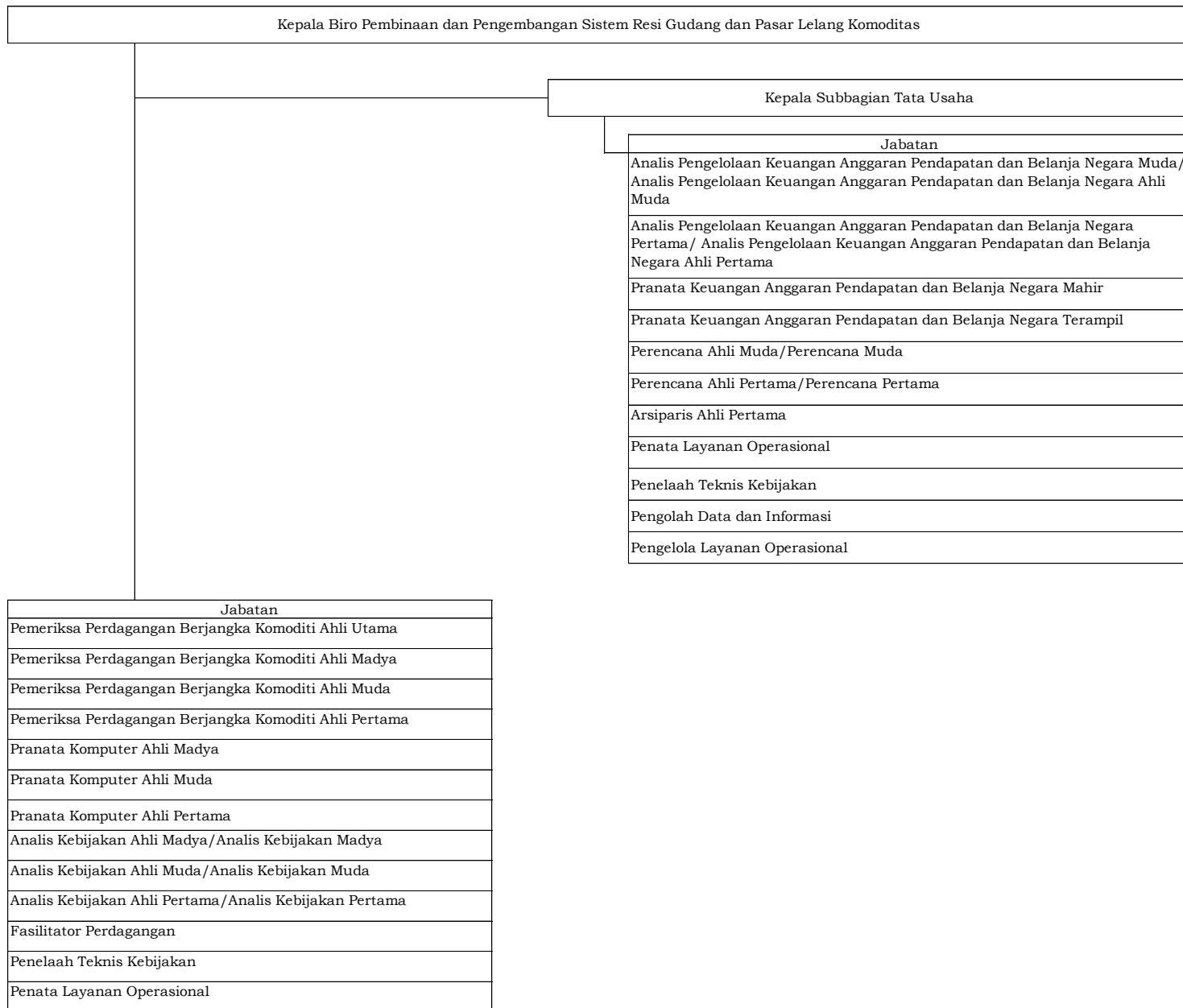
B. PETA JABATAN BIRO PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PENINDAKAN



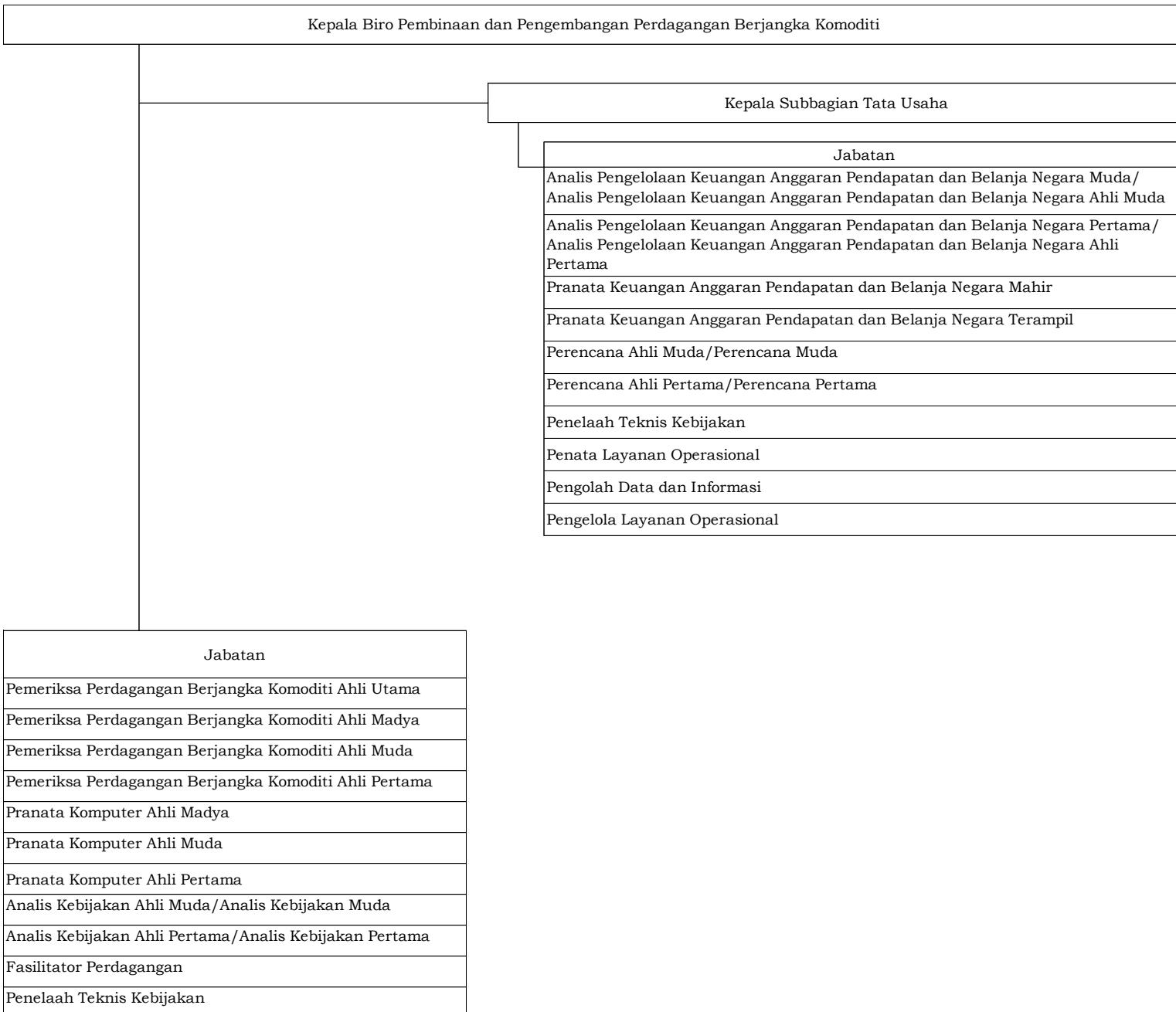
C. PETA JABATAN BIRO PENGAWASAN PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI, SISTEM RESI GUDANG, DAN PASAR LELANG KOMODITAS



D. PETA JABATAN BIRO PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM RESI GUDANG DAN PASAR LELANG KOMODITAS

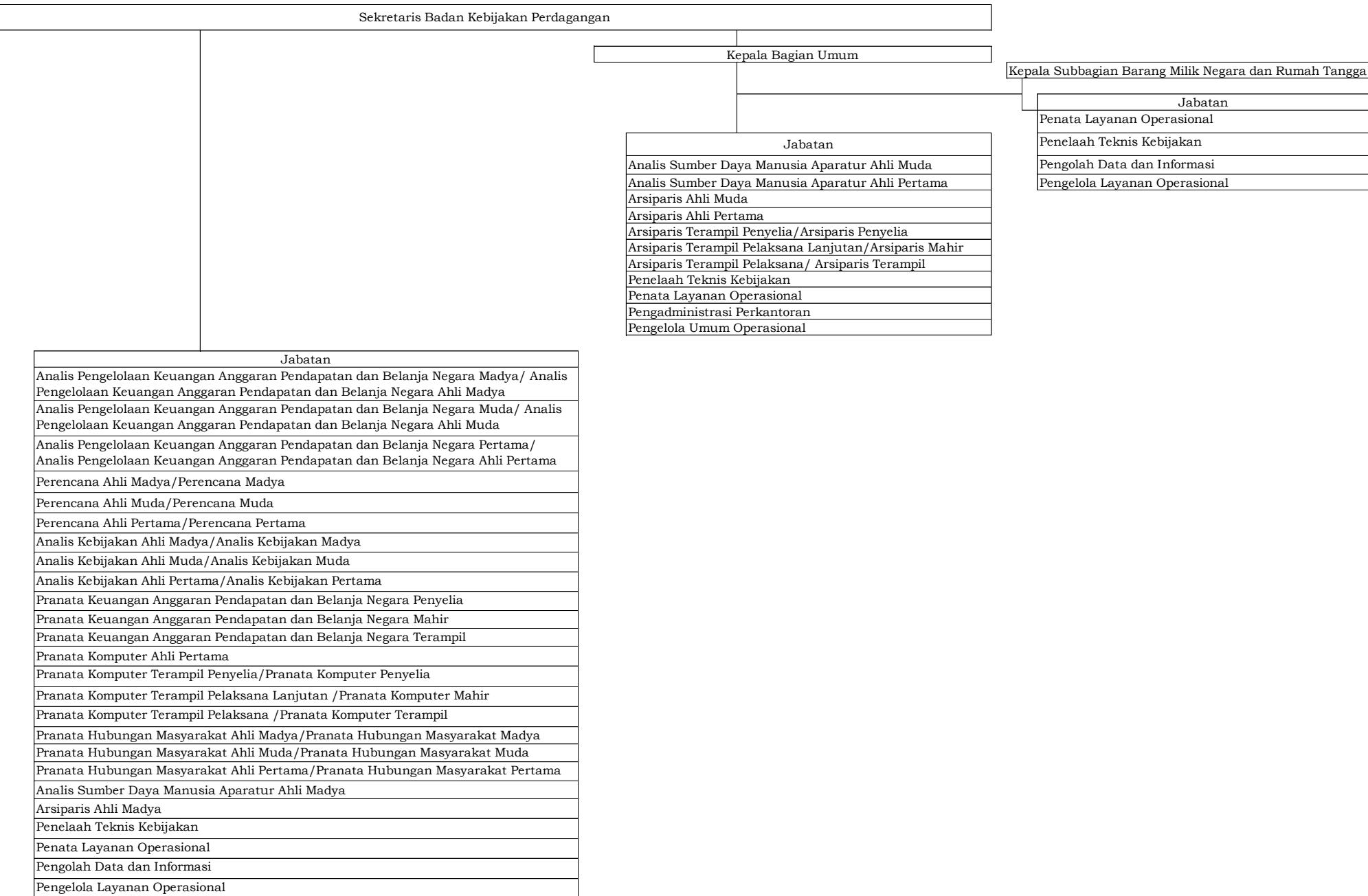


E. PETA JABATAN BIRO PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

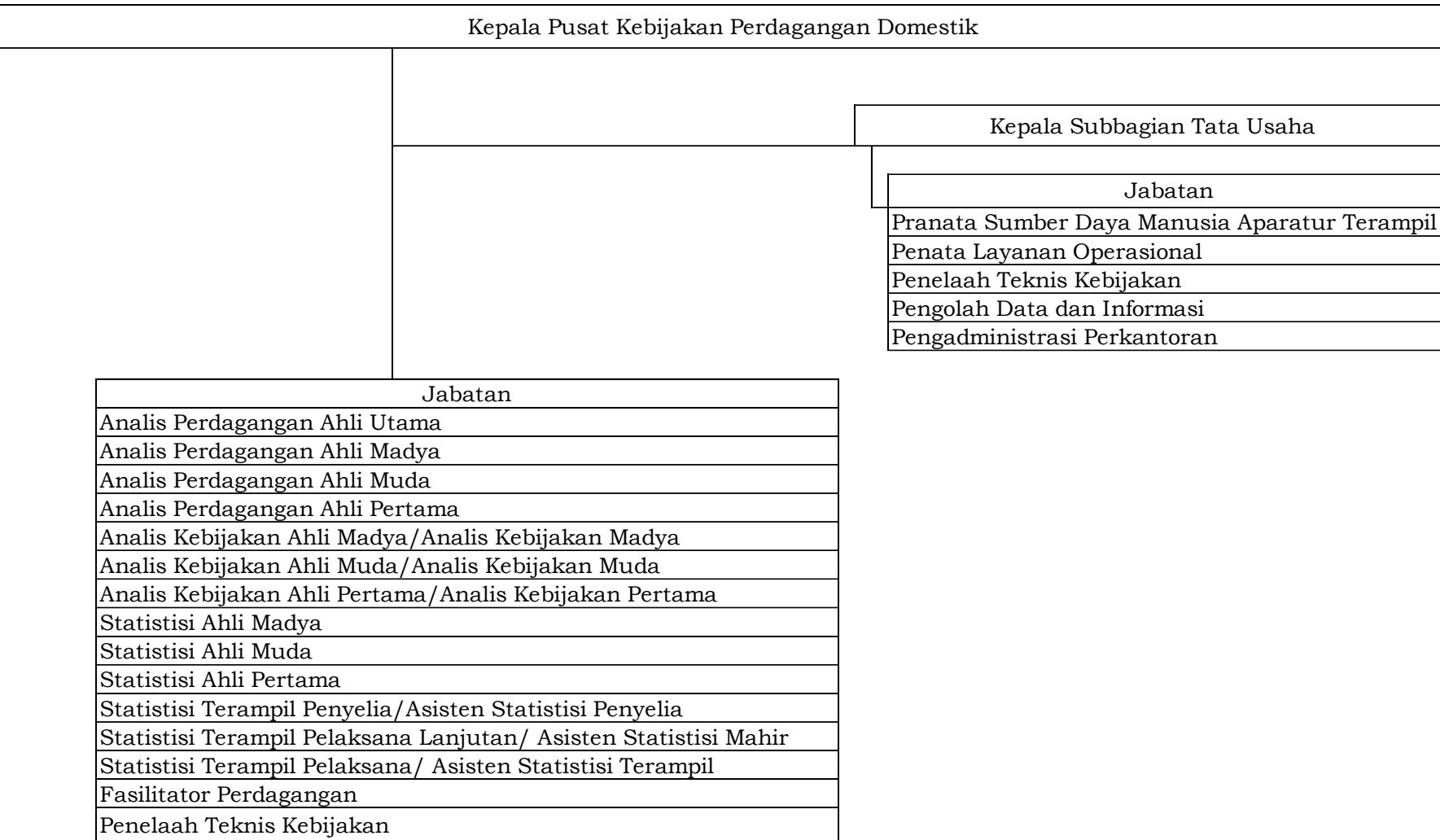


## IX. PETA JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN KEBIJAKAN PERDAGANGAN

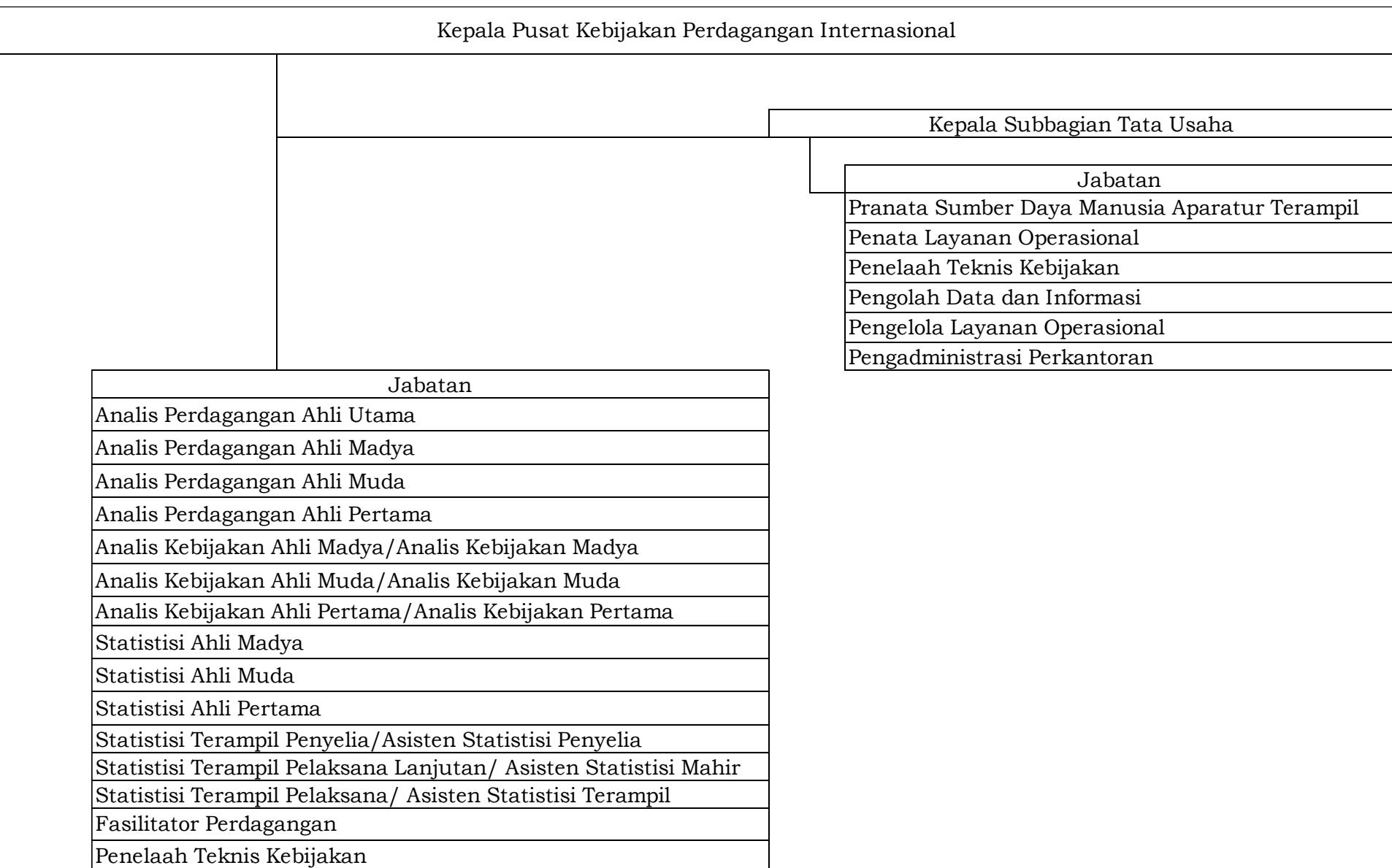
### A. PETA JABATAN SEKRETARIAT BADAN KEBIJAKAN PERDAGANGAN



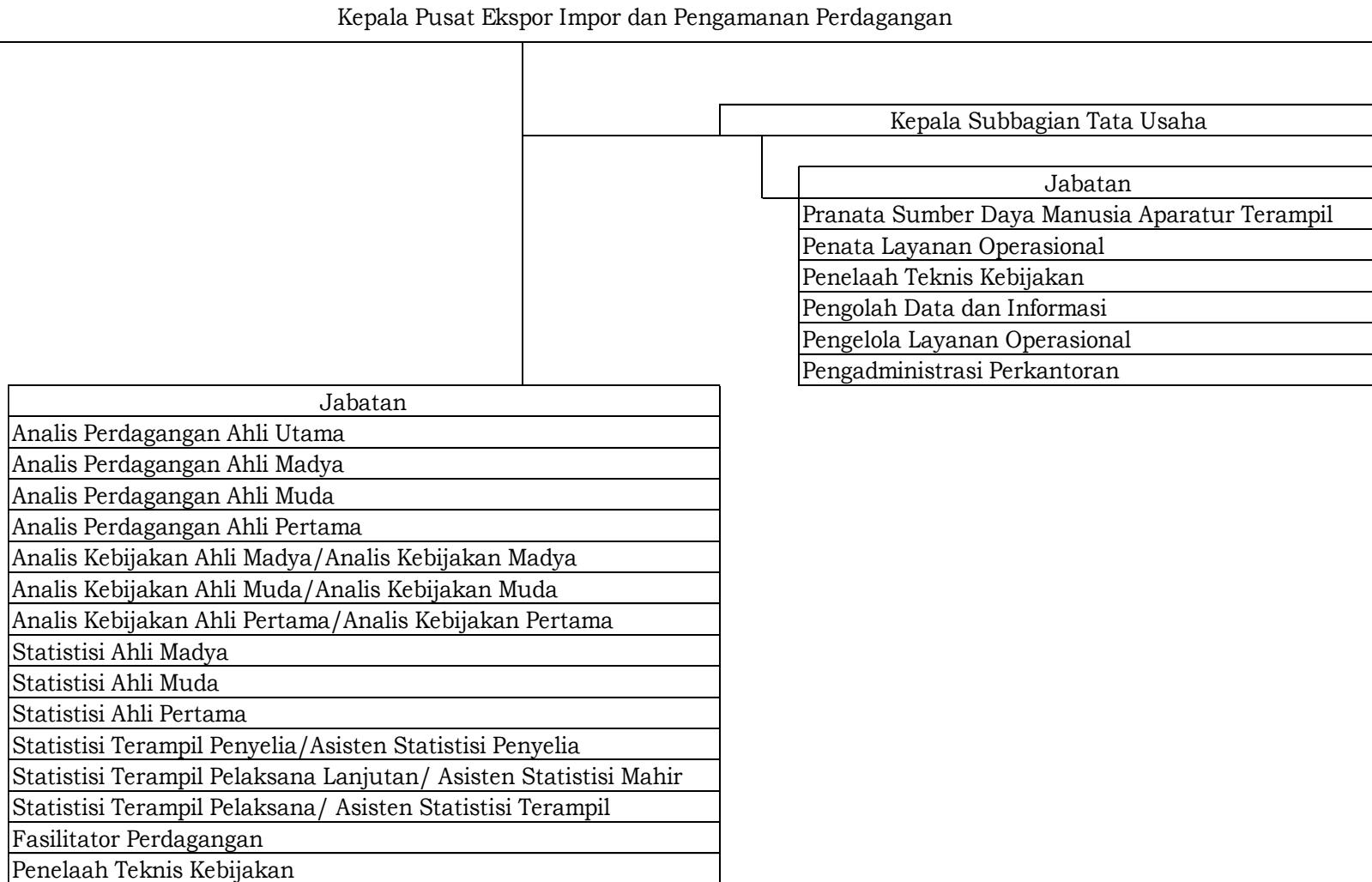
B. PETA JABATAN PUSAT KEBIJAKAN PERDAGANGAN DOMESTIK



C. PETA JABATAN PUSAT KEBIJAKAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL



D. PETA JABATAN PUSAT KEBIJAKAN EKSPOR IMPOR DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN